

**DUGAAN “PAPA MINTA SAHAM” SETYA NOVANTO KEPADA PT.
FREEPORT DALAM RANGKA PERPANJANGAN KONTRAK
PERUSAHAAN KEPADA PEMERINTAH INDONESIA**
(Analisis *Framing* Pemberitaan Vivanews.com dan Tempo.co Periode Bulan
Desember 2015)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

**Oleh:
ADE PANDU NARWASTU
10321051**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

SKRIPSI

**DUGAAN “PAPA MINTA SAHAM” SETYA NOVANTO KEPADA PT.
FREEPORT DALAM RANGKA PERPANJANGAN KONTRAK
PERUSAHAAN KEPADA PEMERINTAH INDONESIA
(Analisis *Framing* Pemberitaan Vivanews.com dan Tempo.co Periode Bulan
Desember 2015)**



Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan

dihadapan tim penguji skripsi,

18 JAN 2018

Tanggal:.....

Dosen pembimbing Skripsi,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا فِضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ

Holy Rafika Dhona, S.I.Kom.,M.A

NIDN. 0512048302

SKRIPSI

**DUGAAN “PAPA MINTA SAHAM” SETYA NOVANTO KEPADA PT.
FREEPORT DALAM RANGKA PERPANJANGAN KONTRAK PERUSAHAAN
KEPADA PEMERINTAH INDONESIA**

**(Analisis *Framing* Pemberitaan Vivanews.com dan Tempo.co Periode Bulan
Desember 2015)**

Disusun oleh

ADE PANDU NARWASTU

10321051

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

18 JAN 2018

Tanggal

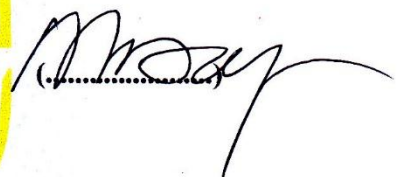
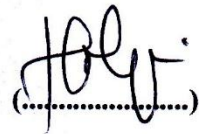
Dosen Penguji :

1. Holy Rafika Dhona, S.I.Kom.,M.A

NIDN. 0512048302

2. Muzayin Nazzaruddin. S.Sos.,MA

NIDN 0516087901

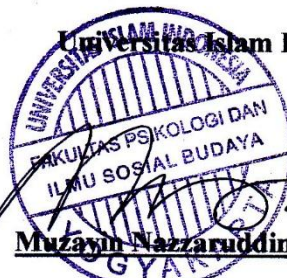


Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



Muzayin Nazzaruddin. S.Sos.,MA

NIDN 0516087901

HALAMAN PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ade Pandu Narwastu


No. Mahasiswa : 10321051

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Dugaan “Papa Minta Saham” Setya Novanto Kepada Pt. Freeport Dalam Rangka Perpanjangan Kontrak Perusahaan Kepada Pemerintah Indonesia (Analisis Framing Pemberitaan Vivaneews.Com Dan Tempo.Co Periode Bulan Desember 2015)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian ini dan pembuatan laporan penelitian saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang di junjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam uji skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagai mana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademikyang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta.....
Yang Menyatakan,

ADE PANDU NARWASTU

10321051

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ABAH dan UMIK

Terimakasih atas segala kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, pengertian, perhatian, sujud panjang dan untaian doa yang senantiasa terlantun untuk anakmu.

ISTRIKU IFA dan ANAKKU EMIR

Kalian berdua adalah motivasi yang tiada henti, penyemangat hidup untukku agar bisa berbuat lebih baik kedepan.

HALAMAN MOTTO

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri” (Ibu Kartini)

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan ; dan saya percaya pada diri saya sendiri” (Muhammad Ali)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Robbil'aalamiin. Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'alla*, atas segala kasih sayang dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan karya sederhana yang berupa skripsi. Skripsi ini tentang “*Dugaan “Papa Minta Saham” Setya Novanto Kepada Pt. Freeport Dalam Rangka Perpanjangan Kontrak Perusahaan Kepada Pemerintah Indonesia (Analisis Framing Pemberitaan Vivaneews.Com Dan Tempo.Co Periode Bulan Desember 2015)*”, dengan menggunakan metode framing Robert N. Entman, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaiian ketiga media online tersebut terhadap pemberitaan kasus Papa Minta Saham.

Penulis menyadari bahwa selama menjalani proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, dorongan, motivasi, masukan, dan doa yang diperlukan penulis dari mulai persiapan hingga terusunnya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno,SH.,M.Hum.,LLM.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya.

3. Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, S.I.P., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah mendampingi dan memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di FPSB UII.
4. Bapak Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang terus memberikan motivasi kepada penulis untuk terus berkembang.
5. Seluruh dosen FPSB UII atas ilmu dan pelajaran berharga yang diberikan kepada penulis. Pendekar Prodi Ilmu Komunikasi Mas Oni, Mas Yudi, dan Mas Gun yang telah memberikan tempat yang begitu nyaman untuk mengerjakan skripsi.
6. Kedua Orang Tua, Umik Nur Illaina dan Abah Sunaryo, terimakasih atas jasanya, kesabaran, do'a dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepadaku semenjak kecil.
7. Kedua mertua Bapak HM Mujab dan Ibu F Fatimiyah yang telah banyak memberikan dorongan semangat demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga kecilku keluarga bahagia.istriku Nurul Latifah dan anakku Emir Zhafran Al-Arkhan Narwastu terimakasih atas segala motivasi, bantuan baik secara moril maupun materi, semangat dan perjuangan yang tiada henti. Penulis sangat beruntung ada ditengah-tengah keluarga yang begitu perhatian.
9. Saudara saudara tercinta Kakakku Panji dan adekku Pundan dan Pundi, Kalian telah menjadi keluarga yang telah menjadikan penulis pribadi kuat dan bertanggung jawab. Kakak ipar Nana dan adek ipar Tika terimakasih atas semua doa, yang diberikan.

10. Kakak ipar Mbak Ida, Mas Sulis, Mas Uzy, Mbak Tatik, Mbak Hid, Mas Haris, Mas Aan dan Mbak Rina, Terimakasih atas doa, dorongan, motivasi dan semangat yang begitu kuat kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Ponakan-ponakan yang lucu Azra, Nashwa, Salma, Satria, Hafshoh, Safa, Shanza, Wirda, Alvin, Fahri, kalian adalah semangat yang luar biasa dan begitu tulus kepada penulis.
12. Teman – teman kuliah yang selalu mendukung Rizal Palevi, Aan Mei handoko, Hafizd, atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis.
13. Teman-teman club mobil SCI dan Gravitic yang tidak bisa disebutkan satu-satu, kalian luar biasa tanpa kalian penulis hanya butiran debu.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, telah membantu dan mendoakan penulis. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Januari 2018

Ade Pandu Narwastu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	26
BAB II PEMBERITAAN KORUPSI DALAM MEDIA ONLINE.....	29
A. Kasus Dugaan Korupsi Setya Novanto.....	29
B. Vivanews.com.....	31
C. Tempo.co.....	34

D. Katagorisasi.....	37
BAB III KASUS DUGAAN KORUPSI SETYA NOVANTO	
“PAPA MINTA SAHAM DALAM <i>FRAMING</i> ROBERT ENTMAN..	46
A. Analisis Framing Vivanews.com.....	50
B. Analisis Framing Tempo.co.....	86
BAB IV PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Analisis Framing	27
Tabel 2.1. Berita Vivanews.com “Papa Minta Saham” bulan Desember 2015.....	38
Tabel 2.2 Daftar 12 Judul Berita yang diambil dalam Pembahasan “ Papa Minta Saham” di Situs Vivanews.com	43
Tabel 2.3. Berita Tempo.co “Papa Minta Saham” bulan Desember 2015.....	44
Tabel 2.4 Daftar 12 Judul Berita yang diambil dalam Pembahasan “ Papa Minta Saham” di Situs Tempo.co.....	45
Tabel 3.1 Daftar Judul Berita dengan Pembahasan “ Papa Minta Saham” di Situs <i>Vivanews.com</i>	48
Tabel 3.2 Daftar Judul Berita dengan Pembahasan “ Papa Minta Saham” di Situs <i>Tempo.co</i>	49
Tabel 3.3 tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	51
Tabel 3.4. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	54
Tabel 3.5. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	56
Tabel 3.6. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	60
Tabel 3.7. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	63
Tabel 3.8. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	65
Tabel 3.9. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	67
Tabel 3.10. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	69

Tabel 3.11. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	71
Tabel 3.12 tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	73
Tabel 3.13. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	79
Tabel 3.14. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com	84
Tabel 3.15. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co.....	86
Tabel 3.16. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co.....	89
Tabel 3.17. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co.....	92
Tabel 3.18. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co.....	95
Tabel 3.19. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co.....	99
Tabel 3.20. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co.....	101
Tabel 3.21. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co.....	103
Tabel 3.22. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co.....	106
Tabel 3.23. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co.....	108
Tabel 3.24. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co	110
Tabel 3.25. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co.....	114
Tabel 3.26. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co.....	119

ABSTRAK

Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembedaan dan apa bingkai yang digunakan oleh media online vivanews.com dan tempo.com terkait berita kasus “Papa Minta Saham” pada bulan berita bulan Desember 2015.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Analisis *Framing* Pemberitaan Vivanews.com dan Tempo.co Periode Bulan Desember 2016. Pemilihan berita pada penelitian ini menggunakan metode Non-Probability Sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis framing Robert Entman.

Hasil penelitian menunjukkan ada bingkai yang berbeda diantara berita yang ditayangkan oleh Vivanews.com dan Tempo.co. Vivanews.com membingkai sidang MKD memihak kepada Setya Novanto. Konstruksi disusun dengan memilih fakta tentang keganjilan-keganjilan prosesi sidang. Sedangkan Tempo.co di arah berbeda dengan Vivanews.com. Bingkai Tempo.co adalah Sidang MKD dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang. Berita Tempo.co terlihat tidak membela Setya Novanto secara terang-terangan maupun tersirat. Dari cara mengemas berita, Tempo.co memilih bahasa-bahasa yang terkesan memberika kritik dan sindiran-sindiran terhadap Setya Novanto. Kemudian penalaran-penalarannya menguatkan kredibilitas sidang MKD. Tempo.co menilai Setya Novanto bersalah, pengunduran dirinya hanya untuk melepaskan jeratan dari kasus “papa minta saham” yang melibatkan Setya Novanto.

Kata Kunci: Framing, Viva.co.id, Tempo.co berita Kasus “Papa Minta Saham” Setya Novanto

ABSTRACT

The purpose of the study to find out how the comparison of framing and what frames used by online media vivanews.com and tempo.com related news case "Papa Request Share" in December 2015 news month.

Research method using the approach used in this research is a qualitative approach . Framing Analysis of Vivanews.com and Tempo.co Period December 2016. Selection of news in this study using the method of Non-Probability Sampling. The data analysis technique uses framing analysis of Robert Entman.

The results show there are different frames between news broadcast by Vivanews.com and Tempo.co. Vivanews.com framed the MKD session in favor of Setya Novanto. Construction is prepared by selecting facts about the peculiarities of the trial procession. While Tempo.co in a different direction with Vivanews.com. Tempo.co Frame is MKD Session carried out in accordance with the Act. News Tempo.co is seen not to defend Setya Novanto openly or implicitly. From the way the news is packaged, Tempo.co selects the languages that seem to give criticism and allusions to Setya Novanto. Then the reasoning reinforces the credibility of the MKD trial. Tempo.co considers Setya Novanto guilty, his resignation only to release the bondage from the case "papa minta shares" involving Setya Novanto.

Keywords: Framing, Viva.co.id, Tempo.co news Case "Papa Request Share"
Setya Novanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi sekarang ini ketergantungan pada suatu informasi dalam media menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Khalayak saat ini menyukai informasi yang aktual, akurat dan menarik dan juga kecepatan berita. Sekarang ini Informasi tidak hanya dapat ditemukan dan dilihat pada media cetak maupun media televisi. Tetapi, pada media *online* juga. Khalayak sekarang mulai memanfaatkan media *online* karena informasi yang didapat lebih mudah diakses dengan koneksi internet dibanding dengan media konvensional yang masih memiliki keterbatasan waktu¹.

Media sekarang ini memang dijadikan ajang untuk melakukan promosi politik. Tujuan dari promosi politik adalah untuk meraih simpati dari publik untuk mau memberikan dukungan dan suaranya di pesta demokrasi ini. Namun publik harus cerdas dalam memilih pemimpin yang nanti akan mewakilinya. Publik tidak boleh terjebak dalam pencitraan yang dibungkus oleh iklan politik, selain itu publik juga harus mengkritisi setiap rangkain peristiwa yang tersaji dalam pemberitaan media massa supaya tidak terjebak dalam wilayah rangkain sajian berita yang di seting oleh para PR politik².

¹ Ana Maria Sarmiento Gaio (2015) Judul Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik Kpk Vs Polri Di Vivanews.Co.Id Dan Detiknews.Com. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 3 (2015)

² Ayub Dwi Anggoro (2014) judul Media, Politik Dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV). Jurnal Aristo Vol.2 No. 2 Juli 2014.

Menurut Joseph Turow³ menyatakan bahwa:

“the industrialized production and multiple distribution of messages through technological devices” Artinya, media massa adalah instrumen teknologi dari komunikasi massa.

“a network of networks that connects computers worldwide... “ Artinya, konvergensi antara media massa, komputer, dan telekomunikasi berujung pada internet yang akhirnya melahirkan sebuah masyarakat informasi⁴.

Media Massa Online disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Didalamnya terdapat portal dengan karakteristik masing-masing seperti website (situs web), radio, TV, pers, mail yang berbasis online, dan lain-lain. Situs berita adalah salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern pada masa sekarang. Situs berita atau portal informasi merupakan pintu gerbang informasi untuk memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita didalamnya⁵.

Berita yang menjadi trending topic sepanjang tahun 2015, baik dalam media massa cetak, televisi maupun online adalah pemberitaan masalah “papa minta saham”. Pemberitaan ini, dimulai pada saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membeberkan kronologis kejadian anggota DPR pencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef

³ Dalam C. Teguh Dalyono. Pengaruh Media Massa Dan Pengetahuan Tentang Teknologi Informasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Tingkat Modernitas Generasi Muda Kota Yogyakarta. FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010. Hal.2

⁴ Ibid

⁵ Ana Maria Sarmiento Gaio (2015) dengan judul Analisis *Framing* Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik Kpk Vs Polri Di Vivanews.Co.Id Dan Detiknews.Com. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 3 (2015)

Sjamsuddin mengungkapkan inisiatif tiga pertemuannya dengan Ketua DPR Setya Novanto, yang di antaranya membahas kontrak karya dan permintaan saham PT Freeport, berasal dari Novanto. Kasus ini menjadi headline diberbagai media massa baik cetak, elektronik maupun online⁶.

Berita dari Merdeka.com yang membahas tentang dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto ke MKD pada 16 November 2015 dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Novanto karena diduga telah membahas kontrak kerja PT Freeport Indonesia dan pembagian saham PT Freeport Indonesia, meminta saham kosong dan proyek pembangkit listrik di Timika, Papua, saat bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Novanto mengajak pengusaha minyak yang diduga punya kepentingan dalam pertemuan tersebut. Untuk menguatkan laporan, Sudirman menyerahkan rekaman dan transkrip percakapan antara Novanto didampingi pengusaha minyak M Riza Chalid dan Maroef tersebut⁷.

Isu pelanggaran etika ketua DPR yang berujung pada mundurnya Setya Novanto dari posisi ketua DPR menjadi trending topic media sosial seperti twittwr dan facebook serta mainstream media online selama satu bulan dimana pada dunia maya dengan gampang dijumpai hastag “Papa Minta Saham”, suatu istilah yang cepat menyebar dan dipakai oleh mainstream media massa konvensional dan media online. Kasus ini berakhir dengan mundurnya Novanto

⁶ Merdeka.com. Kronologi lengkap kasus Papa Minta Saham sampai bikin Setnov mundur. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html>. diakses pada 7 September 2017

⁷ ibid

dari ketua DPR⁸.

Analisis *framing* milik Robert Entman digunakan untuk membingkai fakta berita yang ada. Analisis ini yaitu penekanan tentang penggambaran suatu proses seleksi dan memunculkan aspek tertentu dari keadaan fakta media.

“*Framing* Robert Entman dibagi menjadi 4 elemen yaitu: pertama pendefinisian masalah (*Define Problems*), artinya bagaimana melihat suatu peristiwa dilihat sebagai apa, kedua memperkirakan penyebab suatu masalah (*Diagnose Causes*), artinya memperkirakan masalah atau sumber dari masalah, ketiga membuat pilihan moral (*Make Moral Judgement*) artinya nilai moral apa yang akan disajikan dalam suatu berita, dan keempat menekankan penyelesaian (*Treatment Recommendation*), yaitu penyelesaian apa saja yang ingin ditawarkan untuk mengatasi konflik berita”⁹.

Dari kasus berita diatas, terlihat bahwa fungsi dan peran media massa dapat dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lasswell yang dibagi menjadi tiga, yakni: pertama pengamatan lingkungan, kedua korelasi bagian-bagian dalam masyarakat untuk merespon lingkungan, dan ketiga penyampaian warisan masyarakat dari generasi ke generasi¹⁰. Pengertian fungsi yang kedua, tentang korelasi, yaitu fungsi dimana media memberikan penjelasannya tentang suatu informasi pada masyarakat. Fungsi ini, membuat media sering memasukkan kritik terhadap isu-isu yang mempunyai penilaian menyimpang. Media juga sebagai pengontrol sosial tentang lingkungannya. Media juga memberikan pandangan kepada pemerhati berita untuk mempunyai sikap bahwa suatu kejadian melalui editorialnya. Maka, melalui fungsi ini tajuk rencana dapat mampu menjadikan sebuah opini publik tentang suatu kasus berita.

⁸ *ibid*

⁹ Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Group. Hal.223

¹⁰ Severin, Werner J. & James W. Tankard, Jr., *Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa* edisi kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perbandingan tentang pembingkai yang dilakukan oleh media online *vivanews.com* dan *tempo.co* pada berita mengenai kasus “Papa Minta Saham” pada bulan berita bulan Desember 2015?
2. Apa bingkai yang digunakan Oleh media online *vivanews.com* dan *tempo.com* pada berita mengenai kasus “Papa Minta Saham” pada bulan berita bulan Desember 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembingkai dan apa bingkai yang digunakan oleh media online *vivanews.com* dan *tempo.com* terkait berita kasus “Papa Minta Saham” pada bulan berita bulan Desember 2015

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian tentang Dugaan “Papa Minta Saham” Setya Novanto Kepada Pt. Freeport Dalam Rangka Perpanjangan Kontrak Perusahaan Kepada Pemerintah Indonesia (Analisis *Framing* Pemberitaan *Vivanews.com* dan *Tempo.co* Periode Bulan Desember 2015) ini

diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu komunikasi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta terutama tentang komunikasi massa yang berkaitan dengan model analisis framing model Robert N. Entman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian Dugaan “Papa Minta Saham” Setya Novanto Kepada Pt. Freeport Dalam Rangka Perpanjangan Kontrak Perusahaan Kepada Pemerintah Indonesia (Analisis *Framing* Pemberitaan Vivanews.com dan Tempo.co Periode Bulan Desember 2015) ini juga diharapkan memberi masukan tentang referensi yang berkaitan dengan data analisis kepada penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Ahmad Herma (2010) . *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 2, Mei - Agustus 2010, halaman 154 – 168 yang berjudul Analisis *Framing* Pemberitaan Konflik Israel-Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat konflik pada media massa (harian Kompas dan Radar Sulteng). Untuk menganalisis, peneliti menggunakan analisis kerangka framing oleh Robert N. Entman. Pada penelitian Ahmad terdapat hasil yang menunjukkan, bahwa ada perbedaan komunikasi antara keduanya dalam hal perihal moral. Kerangka analisis *framing* pada penelitian Ahmad

terdiri dari *Defining Problems, Causes's Diagnosis, Make is Judgement's Moral, and Treatment Recommendations*¹¹.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Maria Sarmento Gaio (2015) yang berjudul Analisis *Framing* Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik Kpk Vs Polri Di Vivanews.Co.Id Dan Detiknews.Com. Pada JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 3 (2015). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pembingkai media apa yang digunakan dan me-reka berita yang nyata dan relevan tentang konflik KPK dan Polri di *vivanews.co.id* dan *detik.com*. Hasil dari penelitian yang didapat pada skripsi Ana Maria yaitu pada pembingkai konflik KPK dan Polri dimana *vivanews.co.id* dan *detik.com* identik memiliki kesan yang berbeda yang mana *vivanews.co. id* dan *detiknews.com* saling bertolak belakang. *Vivanews.co.id* lebih mengacu dalam memojokkan Jokowi bahwa keputusannya dalam mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri adalah awal dari konflik tersebut seakan keputusan tersebut adalah momen yang tepat untuk dibahas, sedangkan *detiknews.com* mencoba mempertimbangkan masukan dari tim independennya yang mana meminta presiden Jokowi untuk mengakhiri konflik tersebut. Dalam hal ini, KPK mempunyai citra positif yang lebih unggul dari pada kepolisian. Dalam dua tahun terakhir terlihat citra positif KPK berada pada 75 persen sedangkan citra positif Polri berada hanya di angka 30,2 persen responden. Framing yang digunakan dalam penelitian Ana Maria menggunakan

¹¹ Ahmad Herman (2010) judul Analisis *Framing* Pemberitaan Konflik Israel - Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8, Nomor 2, Mei - Agustus 2010, halaman 154 – 168.*

framing Robert N Entman yang berfokus pada mendefinisikan masalah, penyebab masalah, keputusan moral yang terdapat pada berita tersebut dan apa penyelesaian yang dilakukan wartawan.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ayub Dwi Anggoro (2014) yang berjudul Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV. Penelitian pada skripsi ini menggunakan analisis Robert N. Entman. Dapat ditemukan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan analisis bahwa terdapat keberpihakan terhadap calon presiden yang cukup drastis dalam pemberitaan yang disiarkan. Pada TV One dan Metro TV pembingkai dilakukan dengan sistim yang sama tetapi terdapat hasil yang berbeda. TV One membingkai dengan penceritaan bahwa pemenang pemilu 2014-2019 dimenangkan oleh calon pasangan presiden Prabowo dan Hatta Rajasa. Sedangkan Metro TV bahwa pemenang pemilu 2014-2019 pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kedua media tersebut sangat berbeda dalam menentukan hasil kemenangan pilpres. Identifikasi dalam penelitian ini merupakan pencitraan pada khalayak dengan menggunakan media televisi untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan politik dengan mengelompokkan analisis pembingkai peristiwa yang diberitakan, yaitu tentang pilpres 2014. Sehingga merupakan kesempatan besar bagi kedua media dalam memberitakan sesuai keberpihakan pada kubu masing-masing. Pada kedua media tersebut menggunakan pembahasan

¹² Ana Maria Sarmiento Gaio (2015) dengan judul Analisis *Framing* Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik Kpk Vs Polri Di Vivanews.Co.Id Dan Detiknews.Com. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 3 (2015)

pendefinisian masalah, memperkirakan masalah atau sumber masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian berita hasil pemilihan presiden pada tanggal 9 juli 2014 pada TV One dan Metro TV¹³.

2. Kerangka Teori

a. Pers

Dalam masyarakat modern, jurnalistik telah menjadi media edukasi massa yang mengembangkan suplemen edukasi kepada pelajar dalam beragam tingkat dan masyarakat umum, baik yang berpendidikan atau tidak¹⁴. Hal ini sejalan dengan fungsi dari pers sendiri yaitu fungsi edukasi, penulis berpendapat bahwa dalam konteks masyarakat modern saat ini, fungsi pers yang seringkali nampak dominan yaitu kontrol semestinya sejalan dengan fungsi edukasi. Artinya pers tetap perlu memberikan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, namun juga tidak lupa untuk memberikan edukasi terhadap isu dan kebijakan yang berkembang, bukan kemudian malah mengarahkan masyarakat dengan pendekatan kontrol yang salah. Fungsi edukasi juga bisa berdiri sendiri, yakni dalam hal konten pers sendiri memiliki muatan edukatif seperti pengetahuan umum, sejarah dan lain-lain.

Beralih kepada pengertian istilah pers, kata “pers” sendiri

¹³ Ayub Dwi Anggoro (2014) judul Media, Politik Dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV)

¹⁴ *Ibid.*

berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti menekan atau mengepres, arti yang sama ditemukan pula dalam padanan kata pada bahasa Inggris melalui kata “*press*”¹⁵. Pengertian menekan atau mengepres ini sendiri berawal dari pengertian perantara berkomunikasi antar individu dalam masyarakat melalui mekanisme percetakan, namun pada perkembangannya hingga sekarang kata “*pers*” sendiri mengalami perluasan makna, dimana *pers* merujuk kepada seluruh kegiatan jurnalistik, mulai dari kegiatan mencari dan menghimpun berita sampai menyebarkannya, pengertian ini pun tidak hanya berlaku pada jurnalistik cetak, namun berlaku pula untuk jurnalistik elektronik¹⁶.

Pengertian *pers* yang semakin luas ini dipertegas pula dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang *Pers* yang berbunyi :

“*Pers* adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”¹⁷

Dalam arti sempit dan luas pengertian *pers* yaitu¹⁸ :

- 1) Pengertian *Pers* dalam arti sempit yaitu mengandung penyiaran pikiran, gagasan berita dalam jalan kata tertulis

¹⁵ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Op Cit*, hal 17.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Undang-undang tentang *pers*. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta : Erlangga, 1977, hal 13.

- 2) Pengertian Pers dalam arti luas yaitu memasukkan semua media massa komunikasi kepada pikiran dan perasaan baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan¹⁹.

Dari pengertian jurnalistik, media massa dan pers di atas, penulis berpendapat bahwa jurnalistik merupakan bentuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki profesi tertentu, sedangkan media massa merupakan wadah, perantara atau bahkan institusi formal dari pers yang mengesahkan kegiatan jurnalistik tersebut. Merujuk dari pengertian yang diuraikan Oemar Seno Adji di atas maka jelas bahwa media massa merupakan bagian dari pers yang berfungsi untuk memancarkan pikiran dan perasaan baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan, atau dalam konteks sekarang untuk menyalurkan aspirasi dan gagasan masyarakat.

Fungsi dari Media massa memiliki yaitu sebagai berikut ²⁰:

“ Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. Di lain pihak, insitusi media diatur oleh masyarakat. Media merupakan lokasi atau forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, baik nasional maupun internasional. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol tapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara mode, gaya hidup dan norma-norma. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif, media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan dengan berita dan hiburan”.

Dari kelima poin di atas, pada prakteknya sendiri di

¹⁹ Ibid

²⁰ Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Terjemahan Oleh Agus Dharma Aminuddin, Jakarta : Erlangga, 1987, hal 60.

Indonesia khususnya penulis menyoroti pada poin media massa sebagai industri yang berubah dan berkembang, bahwa meskipun telah menciptakan lapangan pekerjaan namun profesi orang-orang yang bekerja di media massa khususnya jurnalis belum sepenuhnya menjamin penghidupan, artinya industri media massa sendiri di Indonesia belum sampai pada tahapan industri yang maju, jumlah media massa memang banyak, namun banyak yang operasionalnya kembang kempis lalu lama-lama mati.

Media massa dalam hubungannya dengan masyarakat tidak bisa berdiri sendiri, ada beberapa aspek yang mempengaruhi misalnya politik dan budaya, Dennis McQuail menjelaskan bahwa dalam konteks respek terhadap politik, media massa berangsur-angsur menjadi dua bentuk yaitu ²¹:

- 1) Unsur yang esensial dalam proses demokratis dengan mengembangkan arena dan saluran untuk perdebatan yang lebih lebar, untuk membuat kandidat dalam pemilu dikenal publik secara luas dan mendistribusikan penyebaran informasi dan opini kepada publik atau audiens.
- 2) Sebuah alat melatih kekuatan virtual dari akses yang relatif istimewa bagi politisi dan agen pemerintah dapat digeneralisasikan klaim atas media sebagai hak legitimasi.

Pada poin pertama di atas media massa berkembang

²¹ Ibid

sebagai sebuah ruang publik dimana memang dibutuhkan saluran aspirasi dan ruang untuk menyampaikan pemikiran publik. Dalam hal kampanye kandidat dalam pemilu, sah-sah saja apabila media massa digunakan untuk penggunaan sarana kampanye dan pengenalan kandidat. Namun tentunya harus dengan ketentuan yang berlaku dan secara proporsional.

Dominasi informasi ini menjadi hal yang berbahaya apabila informasi yang disampaikan media massa bukan merupakan fakta yang benar, karena meskipun fakta dikonstruksi oleh media massa namun konstruksinya tidak boleh melupakan kepentingan publik, apalagi media massa merupakan ruang publik.

Sementara dalam konteks respek hubungan dengan budaya, media massa berangsur-angsur menjadi²² :

- 1) Membentuk sebuah sumber utama dari definisi dan gambaran realitas sosial dan ekspresi identitas yang diberikan dimana-mana
- 2) Merupakan fokus terbesar untuk ketertarikan terhadap waktu luang, mengembangkan lingkungan kultural untuk hampir semua orang dan lebih dari sekedar institusi tunggal.

Istilah media massa sendiri juga bergantung kepada alat pembentuk yang digunakan untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada jarak tertentu kepada banyak penerima informasi dalam

²² Dennis McQuail, *Op Cit*, hal 4.

jangka waktu yang pendek²³.

Peranan media menurut Dennis McQuail menyatakan, ada enam perspektif dalam hal melihat peran media²⁴ :

“Media massa sebagai *window on event and experience*. Artinya media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa²⁵. Media dianggap sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*. Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya²⁶. Memandang media massa sebagai *filter* atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak²⁷. Media massa ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. media massa sebagai *interlocutor*, yang tidak hanya sekadar tempat berlalu lalangya informasi, tetapi juga teman komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif²⁸.

Dalam konteks penelitian tesis ini yaitu media massa dan perannya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, peranan media massa yang diuraikan Dennis McQuail di atas bisa disimak lebih jauh, khususnya peran media massa yang memilih isu. Dalam pemberitaan kejahatan, bagaimana posisi media massa terhadap peristiwa kejahatan yang dipilih untuk dimuat atau ditayangkan dapat menunjukkan bagaimana konstruksi mereka kejahatan. Misalnya saja peristiwa salah paham yang berujung tawuran yang kebetulan terjadi antara dua suku, media massa harus pandai memilih dan merekonstruksinya agar jurnalisme yang dijalankan

²³ Dennis McQuail, *Op Cit*, hal 17.

²⁴ Dennis McQuail, *Op Cit, Mass Communication Theories*, page 66.

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

bukan malah menjadi pemanas peristiwa tersebut. Contoh lain bisa dilihat pada kasus pemerkosaan, media massa sebaiknya menghindari penggunaan deskripsi tubuh korban, kecantikan korban dan hal-hal fisik yang dapat menimbulkan konstruksi seolah-olah pemerkosaan tersebut terjadi karena “dipancing” oleh korban.

b. Ideologi Jurnalisme Media *Online*

Istilah ideologi banyak digunakan dalam ilmu sosial untuk menggambarkan ide-ide tertentu yang diungkapkan dalam komunikasi.

“Ideologi Jurnalisme Media *Online* mempunyai 2 (dua) pengertian. Dalam arti positif, ideologi sebagai pandangan dunia yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Dan pengertian negatif, ideologi sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial”²⁹.

Perdebatan tentang pengaruh ideologi dalam pembentukan realitas sesungguhnya telah berlangsung lama. Dalam sejarah pengetahuan dan filsafat, pertentangan ideologi bermula dari gerakan pembersihan teori dari kepentingan. Kelahiran ontologi yang menuntut adanya sikap teoretis murni, yaitu sikap mengambil jarak dan membersihkan pengetahuan dari dorongan-dorongan empiris menjadi titik awal pemurnian pengetahuan dari kepentingan dan ideologi tertentu³⁰.

Pemurnian ini diklaim sebagai cara untuk menjaga keilmiahan

²⁹ Dalam Ahmad Muttaqin. Agama Dalam Representasi Ideologi Media Massa. 2012. Journal komunika Vol.6 No.2 Juli - Desember 2012 pp.

³⁰ Ibid

suatu teori yang dirumuskan untuk menjawab persoalan-persoalan manusia secara universal. Gerakan pemurnian ini kemudian berlanjut pada era filsuf seperti Aristoteles yang diteruskan oleh filsuf modern Rene Descartes yang mengambil jalur pemurnian dengan mementingkan peranan rasio manusia sendiri. Gerakan ini yang kemudian melahirkan aliran rasionalisme dalam tradisi filsafat. Pada bagian lain, filsuf seperti Plato, Hobbes, Locke, Berkeley, dan Hume yang melakukan pemurnian pengetahuan dari kepentingan melalui penguatan peranan pengalaman empiris. Paradigma ini yang kemudian melahirkan aliran empirisisme dalam tradisi filsafat. Puncak gerakan pemurnian pengetahuan dari kepentingan ini terjadi pada masa positivisme dengan Auguste Comte sebagai tokoh utamanya. Pengetahuan diorientasikan untuk pengetahuan yang dipisahkan dari *praxis* hidup manusia. Positivisme menganggap pengetahuan mengenai fakta obyektif atau terbebas dari kepentingan sebagai pengetahuan yang sah. Melalui positivisme ini, metode produksi dan reproduksi pengetahuan yang dianggap ilmiah adalah saintisme yang biasa digunakan dalam ilmu-ilmu alam. Metode ini berlaku universal termasuk dalam ilmu-ilmu sosial. Maka untuk menjaga pengetahuan dari kepentingan, metode ilmu-ilmu sosial dapat secara langsung menggunakan metode ilmu alam.

Hal inilah yang kemudian melahirkan perdebatan metodologi

(*methodenstreit*) dalam ilmuilmu sosial terutama di Jerman³¹.

Penerapan metode ilmu alam pada kenyataan sosial mengandung masalah. Hal ini karena secara filosofis kenyataan sosial terdiri dari tindakan-tindakan manusia yang tidak dapat diprediksi ataupun ditempatkan dalam bingkai hukum-hukum tetap sebagaimana pada fakta alam. Untuk itu, ilmu-ilmu sosial harus membebaskan diri dari metodologi ilmu-ilmu alam (positivisme) dan menemukan pendasaran metodologi yang baru. Dalam konteks inilah tradisi teori kritis muncul. Teori kritis yang dipelopori kelompok Mazhab Frankfurt berpendirian bahwa teori atau pengetahuan memiliki keterkaitan dengan *praxis* kehidupan sosial manusia. Sebagai sebuah metodologi, teori kritis berada dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan (sosiologi)³².

Teori kritis merupakan dialektika antara pengetahuan yang bersifat transendental dan yang bersifat empiris³³. Dalam konteks masyarakat modern, teori kritis menjadi kritik ideologi yang diproyeksikan untuk membuka selubung ideologis positivisme. Positivisme dengan klaim ilmiah dan obyektifitasnya sesungguhnya mempunyai kepentingan atau ideologi besar dengan mengkampanyekan penggunaan metodologi tunggal dalam proses produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan. Paralel dengan itu, klaim

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Santosa irfan, Jurgen Habermas: Problem Dialektika Ilmu Sosial. Jurnal Dakwah Dan Komunikasi komunika Vol.3 No.1 Januari-Juni 2009 pp.101-113

kelompok pluralis atau positivist bahwa media massa dan jurnalis (wartawan, redaktur, dll) sebagai institusi otonom yang obyektif sarat dengan kepentingan tertentu. Analisis wacana dengan pendekatan teori kritis bermaksud untuk membongkar selubung ideologis kelompok pluralis atau positivist. Media massa dan jurnalisisme merupakan bagian dari salah satu ilmu sosial. Salah satu fungsi media massa adalah menyampaikan wacana tertentu kepada publik. Karena wacana dibentuk dari teks, percakapan, dan lainnya yang tertata sistematis maka ia mencerminkan praktik ideologi tertentu.

“Ideologi dibangun oleh suatu kelompok dominan untuk mereproduksi dengan strategi utamanya dan membuat kesadaran khalayak bahwa dominasi itu diterima secara apa adanya (*taken for granted*)”³⁴.

Dalam perspektif ini, ideologi mempunyai beberapa implikasi penting.

“*Pertama*, ideologi secara inheren bersifat sosial dan tidak personal. Ideologi membutuhkan *share* di antara anggota kelompok atau organisasi untuk membentuk solidaritas dan kesatuan langkah dalam bertindak dan bersikap. *Kedua*, meskipun bersifat sosial, ideologi digunakan secara internal di antara anggota kelompok atau komunitas. Ideologi bersifat umum, abstrak, dan nilai-nilai yang terbagi antar anggota kelompok untuk menyediakan dasar bagaimana suatu masalah harus dilihat”.

Dengan pandangan ini, wacana dipahami tidak netral dan berlangsung secara alamiah tetapi mengandung ideologi untuk mendominasi dan merebut pengaruh³⁵.

Dengan pengertian dan konteks operasinalisasi ideologi di atas, teks berita misalnya dapat dianalisis kecenderungan ideologisnya. Teks

³⁴ *ibid*

³⁵ Ahmad Muttaqien, Agama Dalam Representasi Ideologi Media Massa. Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto Vol.6 No.2 Juli - Desember 2012 pp.

tidak netral tetapi merepresentasikan ideologi seseorang atau kelompok yang bisa diidentifikasi misalnya kapitalis, pluralis, liberalis, fundamentalis, dll. Ideologi masuk dalam praktik kerja wartawan atau pelaku media massa diduga melalui bahasa. Hal ini karena bahasa digunakan untuk menuliskan realitas. Dalam memaknai realitas, dua proses besar yang dilakukan media, yaitu memilih dan menulis fakta. Satu peristiwa utuh terdiri dari beberapa fakta yang sangat mungkin seorang wartawan memiliki kecenderungan memilih fakta yang berbeda dengan wartawan lain. Karena fakta yang dipilih berbeda, maka penulisannya dipastikan juga berbeda. Dengan demikian, satu peristiwa akan menampilkan fakta-fakta berbeda yang seringkali saling bertentangan. Peran ideologi wartawan dalam konteks pertentangan ini semakin terlihat mendominasi proses produksi dan reproduksi realitas³⁶.

“Kajian jurnalisme politik memiliki pusat studi yang merupakan kapitalisme kondisi media massa, sehingga muncul keriuhan konglomerasi media. Bagi iklim demokrasi konglomerasi akan membawa dampak buruk. Iklim politik yang terguncang, justru menjadi perkembangan media yang subur. Kepemilikan media hanya dikuasai oleh beberapa elite saja, media sebagai kekuatan propaganda akan mengalir tak seimbang”³⁷.

“Jurnalis merupakan profesional, maksud profesional yang tertulis yaitu yang sesuai dengan kepustakaan wartawan akan senantiasa bertanggung jawab dan berhadapan dengan publik secara langsung.³⁸ Memiliki sifat profesional dan memiliki daya tawar yang kuat pada jurnalis dalam hubungan produksi berita. Sebaliknya, secara ekstrim jurnalis disebut buruh, atau mungkin karyawan, maka jurnalis tak memiliki daya tawar ketika

³⁶ Ibid

³⁷ Dedi Kurnia Syah. (2015). *Komunikasi CSR Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 102

³⁸ Sophia Damayanti. Analisis *framing* Robert N. Entman atas pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta di majalah Tempo. *Journal e-Proceeding of Management* : Vol.3, No.3 Desember 2016

profesionalitas disandera oleh kekuatan kepemilikan”³⁹.

c. Pengertian Analisis *Framing*

Menurut Eriyanto⁴⁰ pengertian dari analisis *framing* adalah bagaimana media memahami dan memaknai realitas, dan dengan cara apa realitas itu di tindakan, inilah yang menjadi pusat perhatian dari analisis *framing*.

Framing mempunyai pengertian yang sederhana yaitu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita ⁴¹

Definisi framing dari beberapa ahli diambil dari buku Eriyanto yaitu ⁴²:

“Menurut Robert Entman framing yaitu penyeleksian aspek realitas yang mewujudkan aspek tertentu dari suatu peristiwa yang lebih menonjol dari aspek lainnya. Agar mewujudkan alokasi yang lebih besar dari sisi lain menyajikan informasi-informasi dalam kontek yang khas”⁴³.

Pada pembentukan dan konstruksi realita tersebut hasil akhirnya ada bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian-bagian yang lain disamarkan atau bahkan dihilangkan, aspek yang tidak di tonjolkan kemudian atas terlupakan oleh khalayak karena khalayak digiring kepada satu realitas yang ditonjolkan oleh media tersebut.

Framming adalah sebuah cara bagaimana sebuah peristiwa disajikan

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Group. Hal. 3

⁴¹ *Ibid*. Hal. 68

⁴² *Ibid*

⁴³ Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Group. Hal. 67

oleh media. Ditambah dengan berbagai kepentingan, maka konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan dengan berita tersebut⁴⁴.

Aspek framing ada dua yaitu ⁴⁵:

1) Memiliki fakta atau realitas

Proses pemilihan fakta adalah memilih bagian realitas yang akan diberitakan dan yang akan dibuang berdasarkan asumsi dari wartawan. akan memilih bagian mana dari realitas yang akan di beritakan dan bagian mana yang akan dibuang. Kemudian wartawan memilih fakta dan *angel* tertentu untuk menentukan aspek tertentu yang akan menghasilkan berita berbeda dengan media yang menekankan aspek lain.

2) Menuliskan fakta

Menyajikan fakta yang akan dipilih kepada khalayak. Aspek menonjol akan mendapatkan perhatian dan alokasi yang lebih besar mempengaruhi khalayak dan diperhatikan dalam memahami suatu realitas. Penonjolan realitas mempunyai tahapan penulisan fakta. Cara penyajian yang meliputi kalimat, perposisi, kata, foto dan gambar pendukung yang akan ditampilkan.

F. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian tentang Dugaan “Papa Minta Saham” Setya Novanto

⁴⁴ Alex Sobur. 2006. Semiotika Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 67

⁴⁵ Ibid

Kepada Pt. Freeport Dalam Rangka Perpanjangan Kontrak Perusahaan Kepada Pemerintah Indonesia (Analisis *Framing* Pemberitaan Vivanews.com dan Tempo.co Periode Bulan Desember 2015) penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionis. Menurut Bogdan dan Bikien paradigma konstruksionis yaitu suatu cara berpikir pada penelitian yang diarahkan oleh konsep yang dipegang bersama pada kumpulan longgar dari sejumlah asumsi⁴⁶.

Paradigma konstruksionisme merupakan konstruksi yang berbeda-beda dalam suatu realitas pada setiap orang sehingga realitas menjadi plural, pembentukan realitas yang dibentuk dan dikonstruksi tidak menggunakan pembentukan secara alamiah⁴⁷. Realitas sosial akan ditafsirkan dengan sendirinya oleh setiap orang dengan konstruksinya masing-masing dengan pengalaman, pendidikan, pergaulan, lingkungan atau sosial tertentu⁴⁸.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian dalam kasus ini melihat adanya sesuatu yang terjadi pada dunia dan membawa temuan-temuan yang diperoleh didalamnya sehingga penelitian ini berada pada peristiwa di lapangan atau realita. Realitas sangat dipentingkan dalam penelitian ini karena media membutuhkan hasil yang relevan. Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan

⁴⁶ Moleong, Lexy J. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Hal. 30

⁴⁷ Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Group. Hal.38

⁴⁸ Ibid

untuk menjelaskan makna di balik peristiwa atau realita dan dapat membangun suatu perposisi di dalamnya. Maka dari itu penelitian ini diambil dari sumber-sumber yang sesuai dengan kenyataan⁴⁹.

Pekerja pada media terdapat faktor individu yang memiliki pengaruh pada teks dalam fungsi yang ditentukan oleh rutinitas media. Fungsi tersebut harus berada dalam fungsi yang ditetapkan oleh organisasi media. Media dapat memberikan efek positif atau negatif terhadap suatu masalah dan hal itu tergantung dengan pembingkaiian atau penyajian pada suatu berita agar dapat dicerna dengan mudah oleh pembaca. Menurut Shoemaker dan Reese dalam skripsi Mawardi secara individu pekerja media dapat mempengaruhi teks media, organisasi media, institusi di luar media, rutinitas media dan ideologi. Institusi di luar media menentukan kebijakan yang diambil oleh organisasi media. Kemudian ideologi masyarakatlah yang menentukan besar pada tingkat paling atas pada keseluruhan faktor⁵⁰.

Pada penelitian kualitatif peneliti menggunakan orientasi teoritis, pembatasan teori dalam pengertian kualitatif yaitu seperangkat perposisi berkaitan pada pernyataan yang sistematis yang terdapat pada data dan diuji kembali secara empiris⁵¹.

Penelitian tentang Dugaan “Papa Minta Saham” Setya Novanto Kepada Pt. Freeport Dalam Rangka Perpanjangan Kontrak Perusahaan

⁴⁹ Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya : Universitas. Airlangga. Hal. 82

⁵⁰ Gema Mawardi, 2012. Pembingkaiian berita media online. FISIUP UI

⁵¹ Moleong, Lexy J. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Hal. 8

Kepada Pemerintah Indonesia (Analisis *Framing* Pemberitaan Vivanews.com dan Tempo.co Periode Bulan Desember 2015) menggambarkan tentang sejumlah fenomena yang bersifat deskriptif yang dilakukan secara terpisah-pisah. Pengertian Penelitian deskriptif merumakan bentuk penelitian yang mendeskripsikan fenomena. fenomena dapat berupa bentuk karakteristik, aktivitas , hubungan, perubahan, bentuk, perbedaan dan kesamaan antara fenomena satu dengan yang lainnya.fenomena itu juga terdiri dari alamiah dan buatan manusia⁵².

Pemilihan berita pada penelitian ini menggunakan metode Non-Probability Sampling. Menurut Bogdan & Bikle teknik non-probability sampling adalah teknik dalam penelitian kualitatif yang disebut internal sampling karena pada suatu konteks tertentu dapat memperoleh kedalaman studi. Non-Probability sampling adalah teknik yang tidak memperbolehkan atau menonaktifkan populasi atau berita menjadi anggota sampel dengan tidak memberikan kesempatan pada setiap anggotanya. Dan teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling* yang memiliki arti bahwa pemilihan sampel atau berita ditujukan kepada sumber data yang tepat dan berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti yang dipandang memiliki data penting, sehingga penelitian dilakukan dengan memiliki tujuan agar memperoleh data yang akurat dan relevan serta tepat dengan tujuan penelitian

⁵² Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta:Bandung. Hal 230

tersebut⁵³.

3. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Situs berita Vivanews.com dan Tempo.co, dengan subyek kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto. Pertama Vivanews.com dipilih karena media ini memang lahir sebagai media *online* merupakan salah satu media *online* dengan pembaca yang cukup banyak di Indonesia. Kedua, Tempo.co dipilih karena sebagai media *online* nasional tentu saja memiliki jumlah pembaca yang tinggi mengingat Tempo.co merupakan salah satu konvergensinya media cetak yang berupa majalah Tempo, hanya saja media Tempo.com memiliki kecepatan dan perbedaan pada Tempo versi konvensionalnya. Untuk itu peneliti beranggapan bahwa kebijakan yang diusung Tempo.co bersifat universal terhadap semua pemberitaan yang ada. Kecenderungan Tempo.co terhadap satu pihak sangat kecil kemungkinannya. Tempo.co juga memberikan warna yang berbeda terhadap berita yang dikeluarkan berkenaan kasus “Papa Minta Saham”

Pencarian berita yang terkait dengan kasus korupsi Setya Novanto yaitu dengan menggunakan kata kunci “Papa Minta Saham” untuk mempersempit unit analisis yang akan diteliti. Selain itu penulis juga memilih unit analisis berdasarkan tema yang diangkat pada setiap berita yang akan diteliti. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan jika terdapat berita yang ada pada ketiga media online Vivanews.com,

⁵³ Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit. Alfabeta.

Tempo.co dan tidak menggunakan kata kunci sesuai dengan yang penulis sebutkan.

Ketiga media *online* atau situs berita yang berbeda ini dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing media tersebut. Sehingga penulis bisa membandingkan cara kerja konstruksi realitas dari media yang berbeda karakter. Dari ketiga media *online* di atas, penulis memilih berita yang terkait dengan kasus korupsi “Papa Minta Saham” dengan rentang waktu pada bulan Desember 2015. Rentang waktu tersebut dipilih karena pada bulan-bulan tersebut kasus “Papa Minta Saham” mulai banyak muncul di berbagai media tanpa terkecuali juga ketiga media *online* yang penulis teliti.

4. Metode Penelitian

Metode yang akan dipakai pada penelitian ini menggunakan model analisis framing yang dibuat oleh Robert Entman⁵⁴ dimana metode ini menitikberatkan pada penelitian terhadap struktur isi sebuah berita. Pada dasarnya framing (pembingkai) adalah sebuah instrumen metodologis yang dipakai untuk melihat cara media dalam mengkonstruksi sebuah wacana dan realitas sosial sehingga menjadi berita.

⁵⁴ Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Group. Hal.191

Tabel 1.1 Kerangka Analisis Framing

Defining Problems	a. Peristiwa dilihat sebagai apa b. Peristiwa sebagai masalah apa
Diagnose Cause	a. Siapa penyebab masalah ? b. Peristiwa disebabkan oleh apa ?
Make Moral Judgement/Evaluation	a. Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah ? b. Nilai apa yang dipakai untuk mendelegitimasai/suatu tindakan ?
Treatment Recommendation	a. Penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ? b. Jalan yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasinya ?

Sumber : Majalah Kajian Media Dictum Vol 1, No. 2 September 2007

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah⁵⁵:

- a. Studi dokumenter, yaitu data unit analisis dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan ter-posting pada media online *vivanews.com*, *tempo.co* yang memuat kasus “Papa Minta Saham “
- b. Studi kepustakaan (*Library Reaserch*), yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku, tulisan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Mengumpulkan data melalui sumber bacaan yang relevan dan mendukung peneliti untuk dipelajari.⁵⁶

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan memusatkan pada penelitian kualitatif dengan

⁵⁵ Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit. Alfabeta.

⁵⁶ Ibid

perangkat metode analisis isi memakai analisis framing Robert Entman. Unit analisis dipecah menjadi dua, yaitu berita (tabel 1.2) kemudian diuraikan struktur fisik analisis atau inti berita (tabel 1.3). Mengkoding unit-unit analisis (berita per edisi) dari subjek penelitian dalam penelitian tentang Dugaan “Papa Minta Saham” Setya Novanto Kepada Pt. Freeport Dalam Rangka Perpanjangan Kontrak Perusahaan Kepada Pemerintah Indonesia (Analisis *Framing* Pemberitaan Vivaneews.com dan Tempo.co Periode Bulan Desember 2015) dalam suatu tabel yang memuat kecenderungan framing dan kesimpulan (tabel 1.4). Setelah diuraikan, maka dilanjutkan pengkodean dalam sebuah tabel frame sehingga memudahkan peneliti meneliti setiap berita yang berhubungan dengan penelitian.

BAB II

PEMBERITAAN KORUPSI DALAM MEDIA ONLINE

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Situs berita Vivanews.com dan Tempo.co, dengan subyek kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Objek ini peneliti pilih dengan mempertimbangkan sisi kekuatan berita. Kedua media *online* yang penulis pilih dengan mempertimbangkan karakteristik dan kepentingan masing-masing media.

A. Kasus Dugaan Korupsi Setya Novanto

Berita tentang Setya Novanto yang secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI periode tahun 2014-2019. Keputusan yang diambil saat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan memberikan sanksi kepada Setya Novanto terkait dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia dengan Presiden Joko Widodo masuk ke dalam berita itu⁵⁷.

Setya Novanto melakukan pengunduran diri dengan disampaikannya melalui surat resmi dan dibacakan secara terbuka pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Sebelum pengunduran diri Setya Novanto, terjadi cerita tentang sidang MKD mulai dari menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan dugaan etik oleh Setya Novanto, dengan pemutaran rekaman, dan pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan hingga pada pengunduran diri Setya Novanto yang menjabat sebagai politisi Golkar⁵⁸.

⁵⁷ Sinta Fitriani. Tugas Ilmu Negara. http://www.academia.edu/19791607/Tugas_ilmu_negara. diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

⁵⁸ ibid

Banyak fakta baru terkait skandal "Papa Minta Saham" terungkap dari pengakuan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoedin dalam sidang perkara dugaan pelanggaran etika yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) awal mula pertemuan terjadi antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Maroef sendiri. Maroef menjelaskan sejak awal menjabat Presdir PTFI Januari 2015, ia sudah diminta sowan kepada Ketua DPR Setya Novanto melalui salah satu komisaris perusahaan itu, Marzuki Darusman. Permintaan tidak hanya datang dari DPR, tapi juga MPR dan DPD RI⁵⁹.

Pertemuan pertama ini seremonial dihadiri para staf dan terjadi di kompleks Parlemen, Jakarta. Kecuali ketika bertemu ke ruang Novanto, staf Ketua DPR menyampaikan yang boleh masuk hanya Maroef, sedangkan stafnya menunggu di luar. Ketika itu Maroef membawa profil perusahaan yang biasa untuk dibagikan. Pertemuan berlangsung sekitar 40-60 menit. Pertemuan Setya Novanto dengan presiden Pt Freeport Indonesia dan Reza Chalid yang di duga menjual nama presiden dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport mengindikasikan tindak pidana. Hal tersebut disebabkan pembicaraan yang dilakukan hal perpanjangan masih belum waktunya dibahas. Selain itu, perbuatan yang dilakukan Novanto bukan kewenangannya⁶⁰.

Reza Chalid selain menjadi pengusaha minyak ternyata mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam perpolitikan di Indonesia. Keberadaan Reza

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

Chalid yang bisa memberikan dana besar kepada pihak-pihak yang berkompetisi dalam merebut kekuasaan di negeri ini membuat Reza Chalid tidak bisa dipandang remeh. Kasus “Papa Minta Saham” merupakan kasus yang sangat menyita perhatian publik. Kasus ini menyeret nama mantan Ketua DPR Setya Novanto. Kejaksaan agung yang juga menangani kasus ini dalam dugaan tindak pidananya harus mempunyai keberanian tinggi. Setya Novanto salah satu politikus yang sudah lama tentu memiliki *backing* yang kuat⁶¹.

Pembentukan Panja kasus Freeport sebagai bentuk dukungan DpR untuk terus mengawal kasus “Papa Minta Saham” agar kinerja pendidik lebih meningka. Namun, disisi lain kasus yang kasus yang diusut oleh penyelidik saat ini adalah kasus perpanjangan Freeport yang menyangkut mantan ketua DPR sebagai pihak terlapor⁶².

B. Vivanews.com

VIVAnews.com merupakan salah satu media *online* berita yang dikelola oleh PT. Viva Media Baru, anak perusahaan PT Visi Media Asia Tbk, yang juga mengelola bisnis penyiaran televisi (Antv, TVOne, Sport One). VIVAnews diluncurkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu media online yang memberikan informasi dan berita dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman sebuah berita yang mampu menggabungkan teks, foto, video dan suara. Media *online* ini diperbaharui selama 24 jam secara rutin. Vivanews.com menerapkan standar jurnalisme berkualitas dalam meliput

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

peristiwa baik di lingkup nasional maupun internasional. Selain dapat diakses melalui perangkat komputer, media ini juga bisa diakses melalui telepon seluler maupun *smartphone* terlebih di saat sekarang banyak gadget mampu berjaringan internet yang memudahkan pengguna untuk mengaksesnya. Visi dan misinya sendiri adalah menjadikan VIVAnews bagian dari upaya mencerdaskan bangsa melalui jurnalisme cerdas, tajam, berimbang dan menghibur⁶³.

Vivanews tidak memiliki versi cetak seperti kebanyakan media *online*. Sebagai pendatang baru di dunia berita *online*, perkembangan media satu ini semakin pesat. Salah satu buktinya adalah dalam kurun waktu kurang lebih 2,5 tahun yang dilakukan oleh Vivanews.com akhirnya bisa merebut posisi Kompas di urutan kedua terbesar setelah Detik. Hal ini menjadi bukti pencapaian yang telah dilakukan oleh Vivanews, sebagai salah satu media *online* baru di Indonesia⁶⁴.

Jika dilihat dari isi beritanya, Vivanews sudah memenuhi 5W+1H sesuai dengan teknik penulisan berita yang baik dan benar, meskipun ada beberapa berita yang masih belum memenuhi kaidah jurnalistik yang ada.

Menu yang disajikan dalam berita yang ditampilkan Vivanews

“Terdiri dari beberapa kategori yang dapat dibaca dengan mudah oleh setiap pembaca. Berita tentang politik, bisnis, nasional, metro, dunia, sains dan teknologi, sport, bola, otomotif, showbiz, cosmopolitan, sorot, analisis, makan, focus, forum, dan *blog* merupakan kategori yang diambil⁶⁵”.

⁶³ PT. Visi Media Asia, Tbk. Profil Viva News. www.vivagroup.co.id. Diakses pada tanggal 21 oktober 2017

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

Daya tarik yang dimiliki vivanews yakni kelengkapan berita sehingga masyarakat dengan mudah mengakses Vivanews sebagai media untuk mendapatkan informasi yang baru dalam berita. Vivanews lebih dominan dalam hadil berita yang dicari yakni Vivanews sering muncul diawal pada berita dalam negri ataupun luar negeri karena viva news menampilkan berita yang sangat detail. Syarat yang benar sudah dipenuhi vivanews pada 5W1H. Tingkat pembaruan berita yang disajikan vivanews memberikan dampak baik sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses informasi secara nyata⁶⁶.

Isi berita yang terdapat pada vivanews sebagian besar terdiri dari informasi tentang kejadian peristiwa, berita yang dicari meliputi pengetahuan yang dapat memberikan pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, vivanews memiliki fungsi dari situs berita yang berjalan efektif apada Negara kita. Pada akhir-akhir ini banyak banyak situs berita yang telah bergeser dari fungsi education menjadi fungsi entertainment. Sedangkan vivanews juga lebih banyak menyajikan informasi yang bersifat entertainment dibandingkan dengan education. Karena masyarakat lebih menginginkan informasi yang menghibur tetapi jika tidak didorong dengan informasi yang bersifat pengetahuan maka hal ini dapat menghambat kemajuan khalayak, dan menjadi masalah besar ketika fungsi entertainment mendominasi dibanding fungsi education. Informasi yang bersifat menghibur tidak akan memberikan pola pikir yang baik untuk pembaca⁶⁷.

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

Iklan yang terdapat pada suatu berita membuat pembaca susah dan tidak tertarik untuk membaca satu artikel berita ke artikel berita lainnya karena penataan iklan yang tidak tertata dengan baik. Daya tarik pembaca untuk membaca berita yang disampaikan salah satunya dengan penempatan beberapa iklan yang ditata dengan baik karena iklan yang terlalu ramai membuat mata menjadi susah untuk mencari artikel yang akan dibaca. Vivanews memiliki banyak pelayanan untuk memudahkan pembaca dalam mengakses informasi kapan dan dimana saja yaitu pelayanan Vivanews *on-tv* atau *mobile*. Sarannya jangan terlalu banyak Iklan pada *layout* web agar tidak terkesan sangat memenuhi pada *layout* berita. Caranya dengan penataan yang lebih rapi dan sistematis pada *layout* berita⁶⁸.

C. Tempo.co

Gambaran umum tentang tempo.co. PT. Tempo Inti Media Tbk pada tahun 2015, memasuki usia perusahaan yang ke empat belas. pada tahun 2001 perseroan masuk ke bursa saham, dan PT. Tempo Inti Media Tbk menjadi perusahaan publik. Pada saat perusahaan go public itu, terdata sebanyak 725 juta lembar saham ditawarkan kepada seluruh masyarakat. Melalui aksi korporat itu, PT. Arsa Raya Perdana yang menjadi komposisi kepemilikan saham perusahaan yang sebelumnya lalu menjadi PT. Tempo Inti Media Tbk., berikut saham yang ada di PT. Tempo Inti Media Tbk yaitu pertama PT.Grafiti Pers memiliki 21,02%, kedua PT. Jaya Raya Utama (16,28%),

⁶⁸ Ibid

ketiga Yayasan Jaya Raya (8,54%), keempat Yayasan Tempo 21 Juni 1994 (25,01%), kelima Yayasan Karyawan Tempo (12,09%) dan keenam masyarakat 17,24%⁶⁹.

Pada tahun 1971 sejarah perusahaan PT. Tempo Inti Media Tbk sudah dimulai, ketika PT. Grafiti Pers sebagai penerbitnya majalah berita mingguan Tempo sudah diterbitkan, yang pertama terbit perdana pada 6 Maret 1971. Pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1998, penerbitan majalah berita mingguan Tempo pernah berhenti selama 4 tahun karena dibredel. Pada tahun 1978 hadir percetakan PT. Temprint untuk kelancaran penerbitan majalah Tempo. Pada sekarang ini mesin hibrida yang berasal dari negara Amerika Serikat mampu menggabungkan pencetakan format dari koran dan majalah secara bersama, dan PT. Temprint masuk katagori B (besar). PT. Temprint meraih rating bintang empat atau rating tertinggi dalam klasifikasi versi Persatuan Pengusaha Grafika Indonesia. Percetakan PT. Temprint, juga siap mencetak produk dari luar negeri. PT. Tempo Inti Media Tbk., lahir pada tahun yang sama yaitu tahun 2001, perseroan melahirkan Koran Tempo yang diterbitkan untuk berkompetisi di “lapak “ media harian. Koran Tempo yang menjadi kepala sebagai koran dalam format di Indonesia ini unggul dalam liputan pemberantasan korupsi, politik dan ekonomi. informasi yang disebar di bawah perusahaan PT Tempo Inti Media Tbk. Dan beralamat di Jl. Palmerah Barat no. 8, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terus berkembang

⁶⁹ Tempo Media Group. Profil Tempo Media Group. <https://korporat.tempo.co/tentang>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2017

dengan munculnya produk-produk baru. Majalah Tempo English kini menjadi majalah Travelounge dan media digital tempo.co serta Tempo News Room (TNR), kantor berita yang berfungsi sebagai pusat berita memperkuat Tempo Media Group⁷⁰.

Tempo Interaktif merupakan nama lama sebelum menjadi Tempo.co didirikan oleh PT Tempo Inti Media, Tbk. Tempo.co dipimpin Yusril Djalinus Dari, Bambang Bujono, S. Prinka, dan Saiful B. Ridwan yang dulu dengan nama *Tempo Interaktif* didirikan pada tahun 1996. Tempo Interaktif dibagi berdasarkan jenis-jenis berita, yaitu nasional, metro, bisnis, olahraga, teknologi, gaya hidup, internasional, seni dan hiburan, selebritas, dan otomotif.⁷¹ Nama perusahaan Tempo diambil karena kata tempo sangat mudah diucapkan oleh seluruh masyarakat dan terutama oleh para pengecer koran. Dan mempunyai sifat sebuah media berkala yang jarak terbitnya longgar, yakni mingguan. Edisi perdana majalah Tempo terbit pada 6 Maret tahun 1971. Rata-rata umur pengelola tempo.co sekitar 20 tahunan, Tempo tampil mempunyai khas dan beda dan diterima oleh masyarakat. Dengan mengedepankan peliputan berita yang jujur dan berimbang, serta tulisan yang disajikan dalam prosa yang menarik dan jenaka, Tempo diterima masyarakat. Pada tahun 1982, untuk pertama kalinya Tempo dibredel. Tempo dianggap pemerintah terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru, yaitu partai Golkar. Pada saat itu sedang dilangsungkan kampanye dan prosesi Pemilihan Umum. Dan akhirnya Tempo diperbolehkan terbit kembali setelah adanya

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Ibid

penandatanganan janji dengan tokoh Ali Moertopo, yaitu Menteri Penerangan Indonesia saat itu⁷².

D. Katagorisasi

Dari total keseluruhan berita pada bulan Desember yang peneliti temukan dari kedua media *online* Vivanews.com terdapat 108 berita, Tempo.Co dengan 18 berita. Untuk memudahkan proses pemilihan berita yang akan peneliti analisis, peneliti memilih berita-berita yang dimuat ke dalam topik-topik yang sering muncul dalam pemberitaan terkhusus berita yang mengarah atau masih dugaan korupsi. Peneliti memutuskan mengambil 12 berita dari masing-masing media. Berita-berita yang diambil melalui seleksi yang berkaitan dengan kasus yang mengarah terhadap kasus dugaan korupsi yang melibatkan Papa Minta Saham, pemeriksaan KPK, keterlibatan partai dan orang-orang partai serta judul yang mengarah pada “Dugaan”. Jumlah ini penulis anggap mewakili dari variasi berita dalam 1 bulan pemberitaan. Mengingat karakteristik berita, untuk pembagian topik penulis hanya mengambil sub judul dari judul besar berita yang ketiga media turunkan.

Berikut merupakan berita yang peneliti temukan dan sudah di seleksi dan dikategorisasi pada Vivanews.com, Tempo.co;

⁷² Ibid

1. Berita Vivanews.com “Papa Minta Saham” bulan Desember 2015

Tabel 2.1.

Berita Vivanews.com “Papa Minta Saham” bulan Desember 2015

No	Tanggal/Bulan	Judul Berita
1.	2 Des 2015	Pengamat: Kebijakan Menteri ESDM Anti Rakyat
2.	3 Des 2015	Transkrip Lengkap 'Papa Minta Saham'
3.	3 Des 2015	Cerita Jokowi Menentang Megawati soal Budi Gunawan
4.	3 Des 2015	Keabsahan Sidang MKD Terancam
5.	4 Des 2015	Ini yang Diselidiki Kejaksaan dari Rekaman Bos Freeport
6.	4 Des 2015	Tengah Malam, Bos Freeport Sambangi Kejaksaan Agung
7.	4 Des 2015	Ada Sidang Etik Setya Novanto, MKD Batal ke Rusia
8.	4 Des 2015	Kelompok Relawan Jokowi Minta MKD Panggil Andrinof
9.	4 Des 2015	Politikus PDIP: Luhut Panjaitan juga Harus Disidangkan
10.	4 Des 2015	Alasan Kejaksaan Agung Selidiki Rekaman Skandal Freeport
11.	4 Des 2015	Jaksa Agung Mau Periksa Lagi Bos Freeport Pekan Depan
12.	4 Des 2015	Sidang MKD 'Papa Minta Saham' Selesai Sebelum 18 Desember
13.	4 Des 2015	Polri Siap Bantu Usut Rekaman, Bila Diperlukan
14.	5 Des 2015	Perdebatan Sengit Sidang MKD, Apa Kata Kepala BIN?
15.	5 Des 2015	'Papa Mama Jual Pelabuhan' Ramaikan Pansus Pelindo II
16.	5 Des 2015	Gara-gara MKD, Rapat Bamus DPR Terbengkalai
17.	5 Des 2015	Pengamat: Perpanjangan Kontrak Freeport Sarat Korupsi
18.	6 Des 2015	Hina Provinsi Sumbar, Riza Chalid Digugat Warga Minang
19.	7 Des 2015	Sudirman Said Siap Diperiksa Kejaksaan Lagi
20.	7 Des 2015	Kejagung: Pemeriksaan Sudirman Said Belum Selesai

21.	7 Des 2015	Tidak Sekali Papa Minta Saham
22.	7 Des 2015	Kejagung Belum Tentukan Tersangka Soal 'Papa Minta Saham'
23.	8 Des 2015	Rekaman Maroef Diuji Forensik demi Pastikan Keaslian
24.	8 Des 2015	Menyoal Sidang MKD, Terbuka atau Tertutup
25.	8 Des 2015	Bamsuet Curiga Pimpinan DPR Mainkan Politik Saling Kunci
26.	8 Des 2015	Sudding: Wajar Presiden Jokowi Marah, Namanya Dicatut
27.	8 Des 2015	Riza Chalid Tinggalkan Indonesia
28.	8 Des 2015	Efek Rumah Kaca Meriahkan Peringatan Hari Anti Korupsi
29.	8 Des 2015	Ruhut Sitompul: Riza dan Novanto Kebangetan
30.	8 Des 2015	Kapolri Siap Usut 'Papa Minta Saham' Jika Diminta
31.	8 Des 2015	Sudirman Said Kembali Diperiksa Jampidsus 'Papa Minta Saham'
32.	8 Des 2015	Sudirman Said Dicecar Jaksa dengan 28 Pertanyaan
33.	9 Des 2015	Jokowi Marah, Sinyal Proses Hukum pada Setya Novanto?
34.	9 Des 2015	JK: Polisi Harus Bawa Riza Chalid
35.	10 Des 2015	Memburu Riza Chalid
36.	10 Des 2015	MKD Masih Fokus Uji Forensik Alat Bukti
37.	10 Des 2015	Ketua KPK Ogah Sebut Anggota DPR "Yang Terhormat"
38.	10 Des 2015	Kejaksaan Tolak Beri Rekaman Asli Milik Bos Freeport ke MKD
39.	10 Des 2015	Meski di Luar Negeri, Jaksa Agung Tetap Panggil Riza Chalid
40.	10 Des 2015	Skandal 'Papa Minta Saham', Kejagung Panggil Staf Ketua DPR
41.	10 Des 2015	Kasus 'Papa Minta Saham' Dinilai Rusak Citra Golkar
42.	10 Des 2015	Skandal Freeport Melebar, DPR Akan Bentuk Pansus Angket
43.	10 Des 2015	Ruhut Kritik Novanto yang Laporkan Sudirman Said ke Polisi

44.	10 Des 2015	Kejamnya Jakarta Menimpa Bapak RT-ku
45.	10 Des 2015	Senin Pekan Depan, Kejagung Panggil Setya Novanto
46.	10 Des 2015	Kejaksanaan Cek CCTV Pertemuan Novanto-Maroef di Ritz Carlton
47.	11 Des 2015	Wakil Ketua MKD: Kita Gontok-gontokan, Freeport Tetap Jaya
48.	11 Des 2015	Angket Freeport Sebaiknya Tunggu Putusan MKD
49.	11 Des 2015	Dukungan Pembentukan Hak Angket Freeport Mulai Digalang
50.	11 Des 2015	Menang 52%, Golkar Berhasil Tekan Efek 'Papa Minta Saham'
51.	11 Des 2015	Luhut Panjaitan Murka Disebut Ikut Melobi Freeport
52.	11 Des 2015	Jaksa Agung: Ada Bukti Rekaman CCTV Pertemuan Novanto-Maroef
53.	11 Des 2015	Luhut Ungkap Memo Penting ke Jokowi soal Freeport
54.	11 Des 2015	Luhut: Siapa yang Tuduh Saya, Datang ke Saya!
55.	11 Des 2015	Luhut Panjaitan: Saya Siap Dipanggil MKD
56.	11 Des 2015	Jaksa Agung Tak Gentar Dilaporkan Novanto ke Polisi
57.	12 Des 2015	Politisi PAN Nilai Kemarahan Luhut Salah Alamat
58.	13 Des 2015	PAN: Pansus Freeport Tak Urus 'Papa Minta Saham'
59.	14 Des 2015	Bamsuet: MKD Berusaha Menutup Kasus 'Papa Minta Saham'
60.	14 Des 2015	Setya Novanto Tak Hadiri Acara di Istana Negara
61.	14 Des 2015	Ruhut Sitompul: Jadikan Riza Chalid DPO
62.	14 Des 2015	Bos Freeport Kembali Diperiksa Kejaksaan Agung
63.	14 Des 2015	Akun Twitter @Riza_Cholid Palsu, Kata Pengacaranya
64.	14 Des 2015	Anggota MKD: Tak Ada Urgensinya Periksa Menko Luhut
65.	14 Des 2015	Pastikan Hadir di MKD, Luhut Minta Sidang Terbuka
66.	14 Des 2015	Menkumham Akui, Posisi Riza Chalid di Singapura

67.	14 Des 2015	MKD Pertimbangkan Panggil Paksa Riza Chalid
68.	14 Des 2015	Istana Sayangkan Anggota MKD Hadir Saat Luhut Jumpa Pers
69.	14 Des 2015	Anggota MKD: Pimpinan, Anda Seperti Diktator di Sini
70.	14 Des 2015	Luhut: Yang Meminta Saham Freeport Itu Lelucon
71.	14 Des 2015	Anggota MKD: Perasaan Kami juga Sama, Sakit
72.	14 Des 2015	Disebut Bertemu Pengacara Novanto, Luhut: Saya Belum Gila
73.	14 Des 2015	Luhut: Kenapa Harus Beli Mahal Saham Freeport
74.	14 Des 2015	Nizar Zahro: Kasus Papa Minta Saham Harus Dihentikan
75.	14 Des 2015	Kasus Papa Minta Saham Mengganggu Kinerja Parlemen
76.	14 Des 2015	Fraksi PDIP Mendadak Ganti Anggotanya di MKD
77.	14 Des 2015	Luhut: Saya Datang ke MKD untuk Meredam Kegaduhan
78.	14 Des 2015	MKD akan Putuskan Sanksi Novanto Rabu ini
79.	14 Des 2015	Nazar Amien Rais Jika Terbukti Jadi Komisariss Freeport
80.	14 Des 2015	Sudirman Said Resmi Dipolisikan Novanto
81.	15 Des 2015	Anggota MKD Ini Ngotot Setya Novanto Diberi Sanksi
82.	15 Des 2015	Jelang Putusan MKD, Jokowi Singgung #PapaMintaSaham
83.	15 Des 2015	Politisi Gerindra Dukung Pansus Freeport, Ini Alasannya
84.	15 Des 2015	Politisi PDIP Sangkal Tudingan Akbar Faizal MKD Masuk Angin
85.	15 Des 2015	Anggota MKD: Sanksi Ketua DPR Harusnya Akumulatif
86.	15 Des 2015	Tentukan Nasib Novanto, MKD Pastikan Tidak Ada Voting
87.	16 Des 2015	PAN: Anggota MKD Jangan Tergoda Uang
88.	16 Des 2015	Perintah Megawati, Anggota MKD dari PDIP Tidak Boleh Belok
89.	16 Des 2015	Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD
90.	16 Des 2015	Jelang Putusan, Tiga Fraksi Rotasi Anggota di MKD

91.	16 Des 2015	DPR Sibuk dengan MKD, Jokowi Undang Pelawak ke Istana
92.	16 Des 2015	Akhir dari Drama Sidang Etik 'Papa Minta Saham'
93.	17 Des 2015	Setelah Setya Novanto Mundur dari Kursi Ketua DPR
94.	17 Des 2015	PKS: Pansus Freeport Harus Tetap Ada Meski Novanto Mundur
95.	17 Des 2015	Setya Novanto Mundur, Ini Komentar Jokowi
96.	17 Des 2015	Pasca Mundur dari Ketua DPR, Kediaman Novanto Sepi
97.	17 Des 2015	Pengamat: Ketua DPR Baru Harus Hindari Kesalahan Novanto
98.	18 Des 2015	Usut Skandal Freeport, Jaksa Agung Jangan Tebang Pilih
99.	20 Des 2015	Masyarakat Diminta Soroti Kewajiban Freeport
100.	20 Des 2015	Jika Kontrak Habis, Freeport Bisa Dinasionalisasi
101.	21 Des 2015	Buru Riza Chalid, Kejagung Akan Gandeng Interpol
102.	23 Des 2015	Kasus 'Papa Minta Saham' Jadi Topik Terpanas Selama 2015
103.	29 Des 2015	Gaduh Reshuffle Kabinet Jokowi
104.	29 Des 2015	Bos Freeport McMoran Mengundurkan Diri
105.	30 Des 2015	Jaksa Agung Akui Kesulitan Panggil Riza Chalid
106.	30 Des 2015	Jaksa Agung: Kasus Freeport Kami Tidak Berhenti
107.	30 Des 2015	Kejagung Akui Telah Periksa Komisaris Freeport Indonesia
108.	31 Des 2015	Kegaduhan Kabinet Hingga Terbongkarnya Skandal Panas

Ada 12 berita yang diambil dari vivanews.com. Berikut berita yang diambil untuk diteliti dalam pembahasan.

Tabel 2.2

Daftar 12 Judul Berita yang diambil dalam Pembahasan “ Papa Minta Saham” di Situs *Vivanews.com*

No	Hari/ Tanggal	Judul Berita
1.	5 Desember 2015	Perdebatan Sengit Sidang MKD, Apa Kata Kepala BIN?
2.	7 Desember 2015	Tak Sekali Papa Minta Saham
3.	8 Desember 2015	Menyoal Sidang MKD, Terbuka atau Tertutup
4.	10 Desember 2015	Kejaksaaan Cek CCTV Pertemuan Novanto-Maroef di Ritz Carlton
5.	10 Desember 2015	Senin Pekan Depan, Kejagung Panggil Setya Novanto
6.	11 Desember 2015	Menang 52%, Golkar Berhasil Tekan Efek 'Papa Minta Saham'
7.	11 Desember 2015	Luhut Panjaitan Murka Disebut Ikut Melobi Freeport
8.	11 Desember 2015	Luhut Panjaitan: Saya Siap Dipanggil MKD
9.	14 Desember 2015	Bamsoet: MKD Berusaha Menutup Kasus 'Papa Minta Saham'
10.	16 Desember 2015	Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD
11.	16 Desember 2015	Akhir dari Drama Sidang Etik 'Papa Minta Saham'
12.	17 Desember 2015	Setya Novanto Mundur, Ini Komentar Jokowi

2. Berita Tempo.co “Papa Minta Saham” bulan Desember 2015

Tabel 2.3.

Berita Tempo.co “Papa Minta Saham” bulan Desember 2015

No	Tanggal	Judul Berita
1.	03 Des 2015	Kritisi Kasus Papa Minta Saham, Seniman Gelar Aksi Djamban DPR
2.	5 Des 2015	Papa Minta Saham, 2 Jerat yang Sulit Dielakkan Setya Novanto
3.	5 Des 2015	Papa Minta Saham, Setya Novanto Dibidik Percobaan Korupsi
4.	7 Des 2015	Papa Minta Saham, Sidang Setya Novanto Digelar Tertutup
5.	7 Des 2015	Jokowi Murka: Tak Apa Saya Dikatain Gila, Koppig, tapi kalau Minta Saham, Tak Bisa!
6.	7 Des 2015	Sidang MKD Setya Novanto Tertutup, Begini Tanggapan Jokowi
7.	7 Des 2015	Tak Sekali Papa Minta Saham
8.	8 Des 2015	Sidang Papa Minta Saham Kalla Desak Novanto Mundur
9.	09 Des 2015	Sindir Papa Minta Saham, Petugas TPS Ini Kenakan Kostum MKD
10.	14 Des 2015	Disebut 66 Kali, Luhut Hadiri Sidang MKD Terkait Kasus Papa Minta Saham
11.	14 Des 2015	Sidang Terbuka atau Tertutup, MKD: Terserah Luhut - Nasional ...
12.	14 Des 2015	Penyidik Minta Maroef Dengar Lagi Rekaman 'Papa Minta Saham'
13.	14 Des 2015	Ini Jejak Luhut di Rekaman 'Papa Minta Saham'
14.	15 Des 2015	Siasat Setya Novanto Loloskan Diri dari 'Papa Minta Saham'
15.	16 Des 2015	Putusan MKD, Prabowo Dukung Setya Novanto Dihukum?
16.	16 Des 2015	Akbar Faisal Dinonaktifkan Sebagai Anggota MKD di DPR
17.	17 Des 2015	MKD Tutup Kasus Setya Novanto Karena Pengunduran Diri
18.	30 Des 2015	Kaleidoskop 2015: Setya Novanto, Papa Mundur karena Saham

Ada 12 berita yang diambil dari Tempo.co. Berikut berita yang diambil untuk diteliti dalam pembahasan

Tabel 2.4

Daftar 12 Judul Berita yang diambil dalam Pembahasan “ Papa Minta Saham” di Situs *Tempo.co*

No	Hari/ Tanggal	Judul Berita
1.	5 Desember 2015	Papa Minta Saham, Setya Novanto Dibidik Percobaan Korupsi.
2.	7 Desember 2015	“Papa Minta Saham, Sidang Setya Novanto Digelar Tertutup”
3.	8 Desember 2015	Sidang “Papa Minta Saham” Kalla Desak Novanto Mundur.
4.	9 Desember 2015	Sindir Papa Minta Saham, Petugas TPS Ini Kenakan Kostum MKD
5.	14 Desember 2015	Ini Jejak Luhut di Rekaman 'Papa Minta Saham'
6.	14 Desember 2015	Disebut 66 kali, Luhut Hadiri Sidang MKD Terkait Kasus “Papa Minta Saham”
7.	14 Desember 2015	Penyidik Minta Maroef Dengar Lagi Rekaman 'Papa Minta Saham'
8.	15 Desember 2015	Siasat Setya Novanto Loloskan Diri dari 'Papa Minta Saham'
9.	16 Desember 2015	Putusan MKD, Prabowo Dukung Setya Novanto Dihukum?
10.	16 Desember 2015	Jelang putusan , Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD
11.	17 Desember 2015	MKD Tutup Kasus Setya Novanto Karena Pengunduran Diri
12.	30 Desember 2015	Kaleidoskop 2015 : Setya Novanto, Papa Mundur karena Saham

BAB III

KASUS DUGAAN KORUPSI SETYA NOVANTO “PAPA MINTA SAHAM DALAM *FRAMING* ROBERT ENTMAN

Pada bab ini akan menyajikan pembahasan mengenai frame yang dibentuk oleh Vivanews.com dan Tempo.co dalam berita-berita yang mengangkat berita “Papa Minta Saham”. Sampel berita akan diulas dengan menggunakan metode analisis *framing* Robert Entman.

Berita “Papa Minta Saham” menjadi Peristiwa panas pada bulan Desember 2015, berita utama di media-media di Indonesia karena nilai beritanya yang kuat, menyangkut hajat hidup orang banyak. Pertama pihak terlapor adalah Ketua DPR RI, Ketua Dewan yang mewakili suara rakyat, atas tuduhan pencatutan nama orang nomor satu di negeri ini yaitu Presiden Joko Widodo. Kedua, sidang ini menyangkut wacana Freeport yang telah lama beredar di tengah masyarakat.

Pertama berita ini terbentuk ditandai adanya laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Pada 18 November 2015 beliau membeberkan kronologis pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto. Dalam peristiwa tersebut Sudirman Said mengatakan bahwa Setya Novanto dengan seseorang pengusaha yaitu Riza Chalid telah melakukan pertemuan dengan Presiden PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengenai kontrak karya PT Freeport Indonesia. Tujuan pertemuan tersebut

adalah membahas mengenai kontrak perpanjangan PT Freeport Indonesia, dan dalam pertemuan tersebut Novanto meminta saham 20 persen pada perusahaan tersebut. Tentu saja ini melanggar kode etik DPR sehingga Novanto di meja hijau dan kemudian diadili oleh MKD.

Pada 29 November 2015 MKD menggelar sidang pertama yang dilakukan secara terbuka. Wakil ketua MKD Junimart Girsang menguatkan usulan agar perkara sidang Setya Novanto digelar secara terbuka. Ada beberapa keputusan yang akan di ambil oleh MKD, hal tersebut dibahas melalui rapat internal. Yaitu mengenai sidang Novanto dilakukan secara terbuka atau tertutup. Pada 7 Desember 2015 sidang kode etik digelar tertutup di MKD, hal ini menimbulkan tanggapan negatif dari beberapa aktor politik maupun pengamat politik atas keputusan oleh MKD yang menggelar sidang secara tertutup.

Akbar Faisal dari fraksi NASDEM yang merupakan anggota MKD dinonaktifkan dari keanggotaan MKD oleh pimpinan MKD. Akbar Faisal dinonaktifkan dari MKD karena dinilai telah membocorkan isi persidangan ke media televisi swasta. Hal tersebut kemudian menjadi indikasi bentuk pertarungan politik dalam MKD.

Pada 16 Desember 2015 Setya Novanto resmi mengundurkan diri dari Ketua DPR. Seharusnya pada waktu itu sidang MKD akan memberi sanksi terhadap Setya Novanto. Namun sebelum sanksi tersebut dibacakan Setya Novanto terlebih dahulu mengundurkan diri melalui surat resmi yang dibacakan langsung oleh pimpinan MKD.

Baik Vivanews.com maupun Tempo.co gencar memberitakan sidang

MKD dengan konstruksi masing-masing. Konstruksi ini disusun dengan perangkat- perangkat frame hingga tersusun menjadi berita yang sampai kepada khalayak. Sampel berita yang akan diteliti berjumlah 24 buah masing-masing 12 buah dari Tempo.co dan 12 buah dari Vivanews.com. Sampel akan diuraikan satu persatu dengan menggunakan analisis Framing model Robert Entman:

Berikut judul dan pembahasan 12 berita *Vivanews.com* tersebut:

Tabel 3.1
Daftar Judul Berita dengan Pembahasan “ Papa Minta Saham” di Situs
Vivanews.com

No	Hari/ Tanggal	Judul Berita
1.	5 Desember 2015	Perdebatan Sengit Sidang MKD, Apa Kata Kepala BIN?
2.	7 Desember 2015	Tak Sekali Papa Minta Saham
3.	8 Desember 2015	Menyoal Sidang MKD, Terbuka atau Tertutup
4.	10 Desember 2015	Kejaksanaan Cek CCTV Pertemuan Novanto-Maroef di Ritz Carlton
5.	10 Desember 2015	Senin Pekan Depan, Kejagung Panggil Setya Novanto
6.	11 Desember 2015	Menang 52%, Golkar Berhasil Tekan Efek 'Papa Minta Saham'
7.	11 Desember 2015	Luhut Panjaitan Murka Disebut Ikut Melobi Freeport
8.	11 Desember 2015	Luhut Panjaitan: Saya Siap Dipanggil MKD
9.	14 Desember 2015	Bamsoet: MKD Berusaha Menutup Kasus 'Papa Minta Saham'
10.	16 Desember 2015	Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD
11.	16 Desember 2015	Akhir dari Drama Sidang Etik 'Papa Minta Saham'
12.	17 Desember 2015	Setya Novanto Mundur, Ini Komentar Jokowi

Berikut judul dan pembahasan 12 berita *Tempo.co* tersebut:

Tabel 3.2
Daftar Judul Berita dengan Pembahasan “Papa Minta Saham” di Situs
Tempo.co

No	Hari/ Tanggal	Judul Berita
1.	5 Desember 2015	Papa Minta Saham, Setya Novanto Dibidik Percobaan Korupsi.
2.	7 Desember 2015	“Papa Minta Saham, Sidang Setya Novanto Digelar Tertutup”
3.	8 Desember 2015	Sidang “Papa Minta Saham” Kalla Desak Novanto Mundur.
4.	9 Desember 2015	Sindir Papa Minta Saham, Petugas TPS Ini Kenakan Kostum MKD
5.	14 Desember 2015	Ini Jejak Luhut di Rekaman 'Papa Minta Saham'
6.	14 Desember 2015	Disebut 66 kali, Luhut Hadiri Sidang MKD Terkait Kasus “Papa Minta Saham”
7.	14 Desember 2015	Penyidik Minta Maroef Dengar Lagi Rekaman 'Papa Minta Saham'
8.	15 Desember 2015	Siasat Setya Novanto Loloskan Diri dari 'Papa Minta Saham'
9.	16 Desember 2015	Putusan MKD, Prabowo Dukung Setya Novanto Dihukum?
10.	16 Desember 2015	Jelang putusan , Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD
11.	17 Desember 2015	MKD Tutup Kasus Setya Novanto Karena Pengunduran Diri
12.	30 Desember 2015	Kaleidoskop 2015 : Setya Novanto, Papa Mundur karena Saham

A. Analisis Framing *Vivanews.com*

1. Berita Sabtu, 5 Desember 2015. Perdebatan Sengit Sidang MKD, Apa Kata Kepala BIN?

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dalam beberapa hari ini menggelar sidang kode etik kasus 'papa minta saham'.

Dalam kasus ini, Ketua DPR RI Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin, dan Pengusaha Reza Chalid terlibat dalam percakapan yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam sidang tersebut, Maroef mengaku merekam pembicaraan tersebut.

Rekaman percakapan ketiganya dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD. Dalam sidang MKD tersebut banyak dikritik, karena mendudukkan Menteri ESDM Sudirman Said yang justru sebagai pihak pelapor seperti terdakwa.

"Awalnya, agak aneh-aneh. Jangan pelapor jadi pesakitan. Tapi lama-lama, mereka tahu kalau banyak yang tidak sepaham dengan perbuatan seperti itu," kata Kepala BIN Sutiyoso, usai menghadiri resepsi pernikahan putri Ketua DPR Setya Novanto di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 4 Desember 2015

Pria yang akrab disapa Bang Yos ini meminta para anggota MKD bekerja secara profesional dan adil. Bila tidak, rakyat akan memberi penilaian khusus.

"Profesional, yang fair. Kalau sebaliknya, rakyat tidak puas dan akan marah," ucap mantan Gubernur DKI tersebut.

Ketika dimintai keterangan saat bertemu dengan Setya Novanto dalam acara resepsi tersebut, Mantan Ketua Partai PKPI tersebut mengatakan, malam ini ekspresi Setya Novanto lagi bergembira, lantaran hari bersejarah bagi putrinya.

"Ekspresinya kan malam ini malam gembira. Orang lagi kena masalah, kita sebagai teman harus menghibur, andai kata saya akan terpengaruh," ungkapnya.

Sebelumnya, Sudirman Said dimintai keterangan oleh MKD pada Rabu lalu, 2 Desember 2015. Dalam sidang, MKD banyak mencecar dan terkesan mencari kesalahan eks Dirut Pindad ini.

Sudirman tampak selalu tenang, meski tak sekali dia protes jika pertanyaan menuduh. (asp)

Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan

Tabel 3.3. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Sudirman Said mengaku merekam pembicaraan. Rekaman percakapan kemudian dilaporkan oleh menteri ESDM tersebut ke MKD.
Causal Interpretation	Rekaman percakapan Setya Novanto dan Maroef di laporkan kepada MKD.
Moral evaluation	Dalam pelaksanaan sidang keterangan dari narasumber yang saling bertentangan

	memberikan dampak penilaian moral yang negatif dalam sidang kode etik kasus “Papa Minta Saham”
Treatment recommendation	Penekanan penyelesaian masalah dengan memberikan banyaknya pertanyaan terkesan mencari kesalahan.

Analisis:

Identifikasi Masalah. Percakapan antara Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Reza Chalid dibebaskan oleh menteri ESDM kepada MKD. Tetapi banyak kritik yang mendudukkan menteri ESDM Soedirman Said justru sebagai pihak seperti terdakwa. Melalui opini tersebut vivanews.com mengidentifikasi bahwa MKD telah memberikan pernyataan yang salah terhadap Soedirman Said karena menjadikan Soedirman Said menjadi tersangka dalam kasus “Papa Minta Saham”.

Menentukan Penyebab Masalah. Menteri ESDM Soedirman Said membeberkan percakapan dugaan kasus “Papa Minta Saham” kepada MKD. Setya Novanto dan Reza Chalid yang notabene sebagai ketua DPR dan pengusaha seharusnya tidak ikut campur dalam wewenang perpanjangan kontrak PT.Freeport.

Membuat Keputusan Moral. Bang Yos sebagai narasumber meminta kepada anggota MKD bekerja secara profesional dan adil. Rakyat tidak akan memberikan penilaian kepada kinerja MKD apabila tidak bekerja secara profesional dan fair. Bang Yos juga mengungkapkan dari

penilaian moral bagi MKD sangat penting terhadap kepuasan masyarakat, apabila rakyat tidak puas maka rakyat akan marah.

Menekankan Penyelesaian. Dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan, Sudirman said tetap tampak selalu tenang. Dengan begitu eks Dirut Pindadini ini tidak tambak seperti protes walaupun terkesan mencari kesalahan. Dengan opini ini vivanews.com memberikan penekanan bahwa Sudirman Said tetap menjadi terdakwa karena membela Setya Novanto.

2. Berita Senin, 7 Desember 2015. Tak Sekali Papa Minta Saham

Berikut isi berita:

Perpanjangan kontrak karya Freeport identik dengan persekongkolan. Jauh sebelum ribut-ribut kasus Freeport menyeret Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan importir minyak Muhammad Riza Chalid, kongkalikong serupa terjadi dua dekade silam. Jurusnya hampir sama: "Papa Minta Saham".

"Perpanjangan kontrak itu tidak lepas dari persekongkolan pada pemerintahan Orde Baru," kata ekonom Universitas Gadjah Mada yang juga mantan anggota Tim Anti-Mafia Migas, Fahmi Radhy, Kamis pekan lalu.

Berikut adalah tabulasi pembingkai yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pembingkai yang dilakukan

Tabel 3.4. tabulasi pembedakan yang dilakukan Vivanews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Persengkongkolan Setya Novanto dan Mochammad Reza Chalid sudah lama terjadi dan jurusnya hampir sama “Papa Minta Saham”
Causal Interpretation	Kerjasama antara ketua DPR Setya Novanto dan importir Minyak Mohammad Reza Chalid.
Moral evaluation	-
Treatment recommendation	-

Analisis:

Identifikasi Masalah. Pada alinea pertama berita, Vivanews menuliskan opini yang menyebutkan adanya persengkongkolan dan kerjasama dari Setya Novanto dan Mochammad Reza Chalid. Kongkalikong sudah terjadi dan hampir sama dengan persengkongkolan pada pemerintahan orde baru. Menurut ekonom Universitas Gajah Mada yang merupakan mantan anggota Tim Anti Mafia Migas, Fahmi Radhy. Perpanjangan kontrak PT. Freeport hampir sama dengan persengkongkolan pada masa orde baru.

Menentukan Penyebab Masalah. Dalam berita ini, sebagai penyebab masalah yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan importir minyak Muhammad Riza Chalid.

3. Berita Rabu, 8 Desember 2015. Judul “Menyoal Sidang MKD, Terbuka atau Tertutup”

Berita yang ditulis pada hari Rabu, 8 Desember 2015 merupakan berita tentang Menyoal Sidang MKD, Terbuka atau Tertutup. Berita tersebut selengkapnya adalah:

Menyoal Sidang MKD, Terbuka atau Tertutup

VIVA.co.id - Polemik kasus rekaman pembicaraan antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Ketua DPR Setya Novanto terus mengemuka. Kali ini adalah terkait apakah sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus terbuka atau justru wajib tertutup?

Pada pemeriksaan pengadu yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Rabu, 2 Desember 2015, dan saksi Maroef Sjamsoeddin, Kamis, 3 Desember 2015, sidang MDK digelar terbuka dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah media televisi nasional. Namun, pada pemeriksaan teradu, Setya Novanto, Senin, 7 Desember 2015, sidang MKD digelar tertutup.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sidang MKD justru diwajibkan untuk tertutup. Ini merujuk pada pasal 129 dan 132.

Pasal 129 menyatakan bahwa MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

Kemudian Pasal 132, ayat 1, menyatakan bahwa sidang MKD bersifat tertutup. Lalu kedua, MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang MKD.

Sementara itu, Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata beracara MKD, juga mengatur hal yang tidak jauh berbeda. Misalnya, Pasal 10 menyatakan bahwa MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

Aturan soal terbuka atau tertutup terdapat di Pasal 15 ayat 2 yakni sidang MKD bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh sidang MKD. Kemudian ayat 3, pimpinan dan anggota MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang MKD.

Kasus yang melibatkan perusahaan asing dan pimpinan lembaga tinggi negara ini membuat publik Tanah Air menjadi riuh. Isi dalam rekaman juga merembet ke banyak persoalan dari Pilpres 2014, masalah Komjen Budi Gunawan sampai menyinggung soal Presiden Jokowi. Selain MKD, perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Berikut **adalah** tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com dalam berita yang ber Judul “Menyoal Sidang MKD, Terbuka atau Tertutup”

Tabel 3.5 tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Sidang yang dilakukan MKD harus terbuka atau wajib tertutup.
Causal Interpretation	Sidang MKD kamis, 3 Desember 2015 digelar terbuka dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah media Televisi Nasional. Sedangkan hari senin 7 Desember 2015 sidang MKD digelar tertutup.
Moral evaluation	Dalam pasal 10 UU menyatakan bahwa MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses ferivikasi sampai dengan perkara diputus dan pasal 15 ayat 2 sidang MKD bersifat tertutup.
Treatment recommendation	Isi rekaman percakapan dugaan papa minta saham merembet ke banyak persoalan dan menyinggung pencatutan nama presiden dan wakil presiden.

Berita pertama pada tanggal 8 Desember 2015 mengangkat judul “Menyoal Sidang MKD, Terbuka atau Tertutup”. Di sini Vivanews.com menjelaskan:

Problem Identification atau identifikasi masalah dalam berita ini dilihat banyak terjadi keganjilan dalam pelaksanaan sidang MKD. Pada sidang yang menghadirkan terlapor yaitu Setya Novanto, anggota MKD sepakat melaksanakannya secara tertutup. Padahal sidang sebelumnya dilaksanakan secara terbuka yaitu ketika sidang menghadirkan Menteri

ESDM sebagai pelapor dan sidang yang menghadirkan saksi yaitu Direktur PT Freeport Indonesia. Tidak ada alasan yang jelas dari MKD mengenai perbedaan ini.

Vivanews.com menempatkan tertutupnya Sidang MKD dalam wilayah penyimpangan dengan menyandarkan konstruksinya pada penolakan dari masyarakat, kecurigaan masyarakat mengenai alasan kenapa sidang dilakukan secara tertutup. Dengan mengikut sertakan publik sebagai penilai, konstruksi berita dibandingkan langsung dengan nilai yang ada dalam masyarakat dan juga berita terkesan lebih objektif.

“sidang MDK digelar terbuka dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah media televisi nasional. Namun, pada pemeriksaan teradu, Setya Novanto, Senin, 7 Desember 2015, sidang MKD digelar tertutup..”

Dalam teks di atas Vivanews.com juga menggambarkan citra MKD dengan citra buruk. MKD dicitrakan melenceng dari fungsinya dengan tidak menjalankan amanat rakyat untuk menjaga kehormatan institusi DPR beserta anggotanya. Bahkan MKD dituding melakukan kompromi politik untuk menyelamatkan Setya Novanto sehingga sidang tersebut dilaksanakan secara tertutup.

Selain itu, keganjilan lainnya seperti pembelaan lawyer Setya Novanto yang ia samapaikan di media, yang dinilai tidak tepat bila menyangkut masalah etika, ia seharusnya membela karena masalah hukum pidana ataupun perdata.

“Nanti saya akan tanya ke pengacara Setya Novanto, kau mau bela masalah apa, kalau masalah hukum jelas tugas lawyer, kalau etika saya nggak ngerti, jadi di MKD ini apa yang harus dilakukan, merujuknya pada fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan”.

Causal Interpretation. Pada bagian ini, Vivanews.com menjelaskan bahwa Setya Novanto sebagai tokoh yang berperan dalam masalah ini.

Moral Evaluation. Ide atau pemikiran yang dikembangkan dalam teks berita ini didukung dengan perangkat penalaran untuk menekankan kepada khalayak bahwa “berita” yang disajikan dalam teks itu adalah benar. Vivanews.com menggunakan penalaran-penalaran yang mendasari konstruksi sidang MKD berpihak kepada Setya Novanto. Perangkat penalaran *Roots* yang dipakai untuk meyakinkan logika sebab-akibat khalayak adalah untuk menekankan keganjilan dan kecurangan pelaksanaan sidang MKD.

Perangkat *roots* yang pertama, dengan membandingkan sidang-sidang terdahulu yang dilaksanakan secara terbuka sedangkan ketika sidang Setya Novanto ditutup. Vivanews.com memberi spekulasi adanya maksud tersembunyi dan mencurigakan. Secara nalar hal yang perlu dicurigai adalah suatu yang tidak benar atau kejahatan. Vivanews.com menggiring kepada makna adanya kemungkinan kecurangan sidang dengan tujuan membebaskan Setya Novanto. Hal ini membuka penalaran bahwa ada sesuatu dibalik tertutupnya sidang.

Sementara itu, Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata beracara MKD, juga mengatur hal yang tidak jauh berbeda. Misalnya, Pasal 10 menyatakan bahwa MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

Treatment Recommendation. Solusi atas masalah ini pada sidang MKD secara tidak langsung mempengaruhi citra MKD dan juga

DPR di masyarakat. Citra yang terbentuk adalah MKD tidak jeli, tidak tegas dan tidak amanat. Penalarannya dengan menyertakan premis dasar (*appeals to principiel*) bahwa masalah ini merupakan masalah etik non hukum yang seharusnya merujuk pada kode etik yang melingkupi kinerja DPR yaitu legislasi, budgeting dan pengawasan. Secara tidak langsung Vivanews.com menyindir pihak terlapor karena tindakan pembelaannya melalui kuasa hukum yang menyiratkan adanya unsur politis.

“Kasus yang melibatkan perusahaan asing dan pimpinan lembaga tinggi negara ini membuat publik Tanah Air menjadi riuh. Isi dalam rekaman juga merembet ke banyak persoalan dari Pilpres 2014, masalah Komjen Budi Gunawan sampai menyinggung soal Presiden Jokowi. Selain MKD, perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Agung.”

4. Berita Kamis, 10 Desember 2015. Kejaksaan Cek CCTV Pertemuan Novanto-Maroeff di Ritz Carlton .

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Kejaksaan Agung mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV) di Hotel Ritz Carlton Pacific Plaze, Jakarta, Kamis, 10 Desember 2015.

Hotel itu disebut sebagai salah satu tempat pertemuan Ketua DPR RI Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroeff Sjamsoeddin, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. Pertemuan mereka membahas permintaan saham PT Freeport Indonesia, yang mencatat nama Presiden dan Wakil Presiden, dan belakangan populer juga disebut skandal ‘Papa Minta Saham’.

"Tim kami meminta rekaman CCTV dari Ritz Carlton untuk melengkapi informasi yang kami kumpulkan dalam penyelidikan," kata Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Adi Togarisman, saat dikonfirmasi, Kamis, 10 Desember 2015.

Dalam kasus itu, Kejaksaan Agung telah menelusuri rekaman asli pada ponsel milik Maroef Sjamsoeddin. Bahkan, Kejaksaan juga sudah meminta bantuan tim ahli teknologi informasi pada Institut Teknologi Bandung.

Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan

Tabel 3.6. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Pertemuan ketua DPR RI Setya Novanto, Reza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin dilakukan di hotel.
Causal Interpretation	Sebagai bukti dalam pencatutan nama presiden dan wakil presiden maka Kejaksaan agung meminta rekaman CCTV kepada hotel Ritz Carlton.
Moral evaluation	-
Treatment recommendation	Kejaksaan agung memilih untuk memeriksa ponsel Maroef Sjamsoeddin dan juga meminta bantuan terhadap rekaman tersebut.

Analisis:

Identifikasi Masalah. Pertemuan tiga orang terekam CCTV di salah satu hotel dan pertemuan mereka membahas permintaan saham PT. Freeport Indonesia yang mencatut nama Presiden dan wakil presiden dan menjadi populer sehingga disebut skandal. melalui opini tersebut vivanews mengidentifikasi masalah bahwa Kejaksaan Agung tetap meminta rekaman CCTV dan menelusuri rekaman asli pada ponsel milik Maroef Sjamsoeddin. Bahkan akan meminta bantuan tim ahli teknologi informasi kepada ITB.

Menentukan Penyebab Masalah. Kejaksaan Agung mengecek rekaman CCTV di hotel Ritz Carlton untuk memastikan bahwasanya terdapat tiga orang yang sedang melakukan pertemuan untuk membahas perpanjangan kontrak PT. Freeport yang mencatutkan nama presiden dan wakil presiden.

Menekankan Penyelesaian. Pada alinea terakhir, Vivanews kembali menulis opini yang menyebutkan bahwa Dalam kasus itu, Kejaksaan Agung telah menelusuri rekaman asli pada ponsel milik Maroef Sjamsoeddin. Bahkan, Kejaksaan juga sudah meminta bantuan tim ahli teknologi informasi pada Institut Teknologi Bandung. Dari sini terlihat upaya Vivanews memberi penekanan penyelesaian dengan memberikan keterangan Kejaksaan Agung telah menelusuri rekaman asli pada ponsel milik Maroef Sjamsoeddin.

5. Berita Kamis, 10 Desember 2015. Senin Pekan Depan, Kejagung Panggil Setya Novanto

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memanggil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, pada Senin pekan depan, 14 November 2015.

Pemanggilan itu terkait dengan kasus skandal PT Freeport Indonesia yang belakangan populer disebut kasus 'Papa Minta Saham' dan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

"*Enggak* bisa prediksi, karena sekretaris Pak Novanto tidak hadir, tapi pengacaranya datang, mengatakan akan hadir Senin," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Arminsyah, di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 10 Desember 2015.

Menurut dia, Kejagung belum berencana memanggil dan memeriksa Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan. Pemanggilan Luhut harus dirapatkan terlebih dahulu di internal Kejaksaan.

"Kita punya aturan, tidak bisa seketika memanggil orang. Kita akan rapatkan, kalau pun harus kita panggil, kita tentukan kapan akan kita panggil. Jadi tergantung rapat internal," katanya menambahkan.

Dalam kasus rekaman 'Papa Minta Saham', Kejaksaan telah memeriksa Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Berikut adalah tabulasi pembedingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pembedingkaian yang dilakukan

Tabel 3.7. tabulasi pembedingkaian yang dilakukan Vivanews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Kejaksanaan Agung memanggil ketua DPR Setya Novanto dalam kasus skandal PT.Freeport yang populer disebut kasus “Papa Minta Saham”.
Causal Interpretation	Kasus “Papa Minta Saham” dengan pencatutan nama presiden dan wakil presiden.
Moral evaluation	-
Treatment recommendation	-

Analisis:

Identifikasi Masalah. Kasus skandal PT. Freeport yang belakangan populer disebut kasus “Papa Minta Saham” yang menjadikan ketua DPR RI Setya Novanto akan disidangkan pada tanggal 14 November 2015. Kasus itu merupakan pelanggaran kode etik yang menyangkut hajat orang banyak. Dengan begitu viva.news memberikan opini yang sedikit membela Setya Novanto.

Menentukan Penyebab Masalah. Skandal PT Freeport mencuat ke permukaan dikarenakan adanya rekaman dari Sudirman Said atas percakapan Setya Novanto, Reza Chalid, dan Maroef dilaporkan kepada MKD yang mencatut nama Presiden dan wakil Presiden.

6. Berita Jumat, 11 Desember 2015. Menang 52%, Golkar Berhasil Tekan Efek 'Papa Minta Saham'

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengakui kasus 'Papa Minta Saham' yang melibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto cukup berpengaruh pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015

"Memang ada pengaruhnya," kata Idrus di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 11 Desember 2015.

Namun demikian kata Idrus, partai berlambang pohon beringin ini mampu menekan eksese negatif kasus 'Papa Minta Saham' dalam Pilkada serentak.

"Kita menatap Partai Golkar ini kekuatannya hanya pada sistem yang didukung kepemimpinan yang kuat dan kader-kader militan dimana-mana.

'Badai' apa pun yang ada *insya Allah* bisa dihadapi," ujar Idrus.

Menurut dia, keberhasilan Golkar dalam menghadapi 'badai' terbukti dari kemenangan para calon kepala daerah yang di usung.

"Berdasarkan informasi yang ada kita menang di semua daerah sebanyak 52 persen. Data-data yang ada seperti Banten kita menang 100 persen," ungkap Idrus.

Kemenangan ini lanjut Idrus, menyimpulkan Golkar masih tetap solid dan mampu mempertahankan eksistensinya. "Saya kira tatanan Partai Golkar

dengan kepemimpinan yang kuat walau menghadapi badai yang kuat *insya Allah* kita bisa hadapi," tegas Idrus.

Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan

Tabel 3.8. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivaneews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Partai Golkar mampu menekan akses negatif dari kasus “Papa Minta Saham” dalam pilkada serentak.
Causal Interpretation	Kasus “Papa Minta Saham” yang menjadi peran utama cukup berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah.
Moral evaluation	-
Treatment recommendation	Tetap optimis walau badai atau masalah sedang dihadapi. Karena partai Golkar tetap solid dan mampu bertahan mempertahankan eksistensinya dalam kancah dunia politik.

Analisis:

Identifikasi Masalah. Sekertaris Jendral partai Golkar, Idrus Marham mengakui kasus Setya Novanto cukup berpengaruh pada proses pemilihan kepala daerah. Dalam opini ini kasus “Papa Minta Saham” mempunyai dampak yang besar terhadap opini-opini masyarakat yang berkembang. Dari opini-opini tersebut masyarakat bisa memilih diantara mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dalam penyelesaian masalah Idrus Marham tetap optimis akan bisa memenangkan Pilkada kepala daerah.

Menentukan Penyebab Masalah. Kasus “Papa Minta Saham” memberikan dampak kepada pemilihan pilkada.

Menekankan Penyelesaian. Idrus Marham akan tetap positif dan yakin akan menang dalam pilkada walaupun kasus “Papa Minta Saham” menjadikan opini kuat dikalangan masyarakat disini terlihat upaya vivanews.com memberikan penekanan penyelesaian masalah atas ketenaran Golkar yang masih tetap solid dan mampu mempertahankan eksistensinya.

7. Berita Jumat, 11 Desember 2015. Luhut Panjaitan Murka Disebut Ikut Melobi Freeport

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan, murka dengan berbagai pemberitaan dan rumor yang menyebut bahwa dia ikut melobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Luhut mengaku tak sedikit pun berpikir untuk memperpanjang kontrak PT Freeport di Indonesia. Sikap tegasnya pun sudah diketahui Presiden Joko Widodo, sehingga tak ada bukti atau alasan yang kuat sehingga dia disebut terlibat melobi Presiden untuk memperpanjang kontrak Freeport.

Luhut secara tegas dan lugas bahwa dia terganggu dengan berbagai pemberitaan dan rumor yang mengait-ngaitkan namanya dalam skandal yang melibatkan Setya Novanto (Ketua DPR), Maroef Sjamsoeddin

(Presiden Direktur PT Freeport Indonesia), dan Riza Chalid (pengusaha minyak).

“Saya benar-benar terganggu. Menurut saya sudah keterlaluhan. Keluarga saya terganggu. Anak saya yang masih tentara aktif juga terganggu,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Polhukam d Jakarta pada Jumat, 11 Desember 2015.

Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan

Tabel 3.9. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Mentri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan Luhut bin Sar Panjaitan marah besar terhadap rumor yang menyebutkan nama bliau.
Causal Interpretation	Rumor adanya nama Luhut Binsar Panjaitan yang ikut melobi perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
Moral evaluation	-
Treatment recommendation	Luhut Binsar Panjaitan benar-benar terganggu dan juga mengganggu keluarga serta nama baik.

Analisis:

Identifikasi Masalah. Pemberitaan dan rumor yang mengikutsertakan nama Luhut Binsar Panjaitan menjadikan murka karena Luhut tidak pernah sedikitpun berfikir untuk memperpanjang kontrak PT. Freeport di Indonesia. Dan Presiden jokowi pun sudah mengetahui sikap

tegas nya tanpa alasan yang kuat dan bukti Luhut akan tetap memegang teguh prinsip. Dalam opini tersebut vivanews.com mengidentifikasi masalah bahwa menteri polhukam tetap berpegang teguh pada sikapnya.

Menentukan Penyebab Masalah. Pengikutsertaan nama Luhut Panjaitan menjadikan posisi beliau terancam, tetapi dengan sikap tegasnya Luhut Panjaitan tidak akan mundur karena beliau tidak pernah berfikir sedikitpun untuk mendapatkan atau memperpanjang kontrak PT. Freeport di Indonesia.

Menekankan Penyelesaian. Pada alinea terakhir, Vivanews kembali menulis opini yang menyebutkan “Saya benar-benar terganggu. Menurut saya sudah keterlaluhan. Keluarga saya terganggu. Anak saya yang masih tentara aktif juga terganggu,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Polhukam di Jakarta pada Jumat, 11 Desember 2015.. Dari sini terlihat upaya Vivanews memberi penekanan penyelesaian dengan memberikan keterangan tentang Luhut yang terganggu dengan pemberitaan.

8. Berita Jumat, 11 Desember 2015. Luhut Panjaitan: Saya Siap Dipanggil MKD

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan siap memenuhi panggilan Mahkamah

Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dijadwalkan pada Senin, 14 Desember 2015.

"Kalau ada orang yang memanggil saya, saya siap. Saya diundang hari Senin, saya minta sidang terbuka," katanya dalam wawancara dengan *TvOne* di Jakarta, Jumat 11 Desember 2015.

Dia mengaku terganggu dengan skandal pencatutan namanya dalam rekaman pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Direktur Utama PT Freepot Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Reza Chalid. Dalam rekaman "Papa Minta Saham" itu nama Luhut disebut sebanyak 66 kali.

Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan

Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan.

Tabel 3.10. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Vivanews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Pencatutan nama Luhut Panjaitan dalam kasus "Papa Minta Saham" dan namanya disebut sebanyak 66 kali.
Causal Interpretation	Nama Luhut Panjaitan disebut sebanyak 66 kali dalam percakapan direkaman.
Moral evaluation	-
Treatment recommendation	-

Analisis:

Identifikasi Masalah. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama presiden Jokowi dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport. Dengan disebutkan nama Luhut sebanyak 66 kali maka Luhut pun juga tidak tinggal diam. Dia akan angkat bicara terhadap kasus “Papa Minta Saham”. Opini VivaNews dalam berita ini menggiring publik terhadap keikutsertaan Luhut Panjaitan terhadap kasus “Papa Minta Saham”.

Menentukan Penyebab Masalah. Dalam berita ini, lebih menekankan Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan sebagai pemberitaanya.

9. Berita Senin, 14 Desember 2015. Bamsuet: MKD Berusaha Menutup Kasus 'Papa Minta Saham'

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Fraksi Partai Golkar DPR RI menuding Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berusaha menutup kasus skandal renegotiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia, yang belakangan populer juga disebut skandal ‘Papa Minta Saham’.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyebut sejumlah alasan yang ditengarai sebagai upaya mengaburkan, bahkan menutup, kasus skandal yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden itu.

Pertama, sejumlah anggota MKD berupaya memutarbalikkan fakta agar yang benar menjadi salah dan sebaliknya.

“Inilah bahaya dan risikonya jika sekumpulan orang picik menggenggam kekuasaan atau wewenang yang besar,” kata Soesatyo melalui keterangan tertulis kepada *VIVA.co.id* pada Senin, 14 Desember 2015.

Alasan kedua, beberapa anggota MKD lebih menitikberatkan aspek yang terlalu teknis untuk menggugurkan esensi persoalan. Hal itu dapat dilihat dari perdebatan tentang *legal standing* (dasar hukum) pelapor (Sudirman Said, Menteri ESDM) sehingga MKD harus menghadirkan seorang ahli bahasa.

“Artinya, ada keinginan dari beberapa anggota MKD untuk menutup kasus hanya karena pelapor tidak memenuhi syarat,” ujarnya

Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan

Tabel 3.11. tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Vivanews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	MKD berusaha menutup kasus skandal “Papa Minta Saham” atas tudingan dari fraksi partai Golkar.
Causal Interpretation	Pencatutan nama Presiden dan wakil presiden dalam kasus “Papa Minta Saham”
Moral evaluation	-
Treatment recommendation	-

Analisis:

Identifikasi Masalah. Pada alinea pertama berita, Vivanews menuliskan opini yang menyebut bahwa Fraksi Partai Golkar DPR RI menuding Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berusaha menutup kasus skandal renegotiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia, yang belakangan populer juga disebut skandal ‘Papa Minta Saham’.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyebut sejumlah alasan yang ditengarai sebagai upaya mengaburkan, bahkan menutup, kasus skandal yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden itu. Pertama, sejumlah anggota MKD berupaya memutarbalikkan fakta agar yang benar menjadi salah dan sebaliknya. Melalui opini tersebut, Tempo mengidentifikasi masalah bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dalam beberapa hari ini menggelar sidang kode etik kasus ‘papa minta saham’.

Menentukan Penyebab Masalah. Pencatutan nama Presiden dan wakil Presiden yang dilakukan oleh Setya Novanto dalam kasus “Papa Minta Saham” menjadikan kasus itu sebagai kasus yang dapat merugikan hajat orang banyak.

10. Berita 16 Desember 2015. Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD

VIVA.co.id - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal dinonaktifkan dari keanggotaan di MKD. Keputusan itu diambil jelang keputusan akhir persidangan etik Ketua DPR Setya Novanto.

Penonaktifan dari keanggotaan MKD itu lantaran adanya pengaduan terhadap Akbar oleh Ridwan Bae atas dugaan pelanggaran etik yang

dilakukan Akbar dengan membocorkan informasi persidangan tertutup saat MKD memeriksa Ketua DPR Setya Novanto.

"Kisah tentang MKD semakin menarik. Saya mendapatkan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk penonaktifan sementara pada MKD DPR untuk saya. Anda lihat di dalam daftar Nasdem tidak ada nama saya, dasarnya saya dalam posisi teradu yang diadakan oleh Ridwan Bae," ujar Akbar di depan ruang sidang MKD pada Rabu, 16 Desember 2015.

Akbar menilai keputusan itu sepihak dan tidak adil. Jika mengacu bahwa keputusan itu adalah keputusan pimpinan DPR, seharusnya trio Golkar yang antara lain, Kahar Muzakir, Ridwan Bae, dan Adies Kadir seharusnya juga dinonaktifkan dari MKD.

"Pada saat yang bersamaan saya sudah melaporkan tiga orang dan saya belum tahu diproses atau tidak. Jika mengikuti surat ini seharusnya tiga orang yang saya adukan itu juga tidak ada di MKD ini," ujar Akbar.

Politikus Nasdem itu menuding adanya upaya untuk membuat kasus pelanggaran etik Novanto ini dihentikan. "Sejak awal mereka merancang agar suara yang ingin menegakkan etika di DPR itu tersumbat," ucap Akbar.

Secara tegas, Akbar mengatakan tidak menerima keputusan itu dan akan memaksa untuk masuk ke ruang MKD untuk tetap mengikuti persidangan internal di MKD.

"Hari ini DPR mempertunjukkan sebuah tontonan yang luar biasa memalukan. Saya akan melawan dan masuk ke dalam," tegas Akbar.

Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan

Vivanews.com dalam berita yang ber Judul “Jelang Putusan, Akbar Faizal

Dipecat dari Keanggotaan MKD”

Tabel 3.12. tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Vivanews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Akbar Faisal dinonaktifkan dari keanggotaan MKD. Penonaktifan keanggotaan MKD lantaran adanya pengaduan dugaan pelanggaran etik yaitu membocorkan informasi persidangan tertutup di MKD.
Causal Interpretation	Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal dinonaktifkan dari keanggotaan di MKD.
Moral evaluation	Keputusan sepihak yang diambil oleh DPR

	sedangkan ada rtiga orang yang belum diproses.
Treatment recommendation	Pemaksaan Akbar Faisal untuk masuk keruang sidang MKD dan mengikuti sidang internal MKD.

Berita pertama pada tanggal 16 Desember 2015 mengangkat judul “Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD”. Di sini Vivanews.com menggambarkan bahwa Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal dinonaktifkan dari keanggotan di MKD. Keputusan itu diambil jelang keputusan akhir persidangan etik Ketua DPR Setya Novanto.

Problem Identification atau identifikasi masalah dalam berita ini Keganjilan sidang MKD juga dinilai saat Akbar Faisal dinonaktifkan dari MKD. Wakil dari fraksi Nasdem dalam MKD ini memang dikenal lantang dan kritis selama proses persidangan. Ia juga tidak segan berkomentar pedas di depan media. Penonaktifannya didasari oleh surat pemberhentian dari Ketua Dewan Fahri Hamzah yang kemudian dipatuhi oleh MKD. Vivanews.com menganggapnya sebagai sebuah kezaliman karena tidak menggunakan prosedur yang benar dan sekaligus dicap sebagai penyalahgunaan wewenang Wakil DPR Fahri Hamzah. Sehingga penonaktifan ini terkesan dilakukan untuk menyingkirkan lawan politik yang mengganggu penyelamatan Setya Novanto.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal dinonaktifkan dari keanggotan di MKD. Keputusan itu diambil jelang keputusan akhir persidangan etik Ketua DPR Setya Novanto...

Selanjutnya Vivanews.com secara tidak langsung melabeli pemecatan Akbar sebagai ketidakadilan MKD pasalnya sebelumnya Akbar Faisal juga melaporkan anggota MKD ke pimpinan DPR dan tidak ada tanggapan. Namun laporan dari pihak lain justru ditanggapi bahkan sekarang Akbar Faisal dikeluarkan dari MKD dengan surat langsung dari pimpinan dewan. Pemaparan ini memperkuat bingkai yang dibangun dalam berita. Teks beritanya sebagai berikut:

Penonaktifan dari keanggotaan MKD itu lantaran adanya pengaduan terhadap Akbar oleh Ridwan Bae atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Akbar dengan membocorkan informasi persidangan tertutup saat MKD memeriksa Ketua DPR Setya Novanto

Vivanews.com juga mengangkat penonaktifan Akbar Faisal sebagai kejadian yang bisa merusak citra DPR dikemudian hari karena tindakan yang tidak sesuai prosedur dan terkesan penyalahgunaan wewenang oleh Fahri Hamzah. Selain itu, perekaman jalannya sidang MKD yang dilaksanakan secara tertutup oleh Akbar Faisal dinilai sesuai dengan harapan rakyat yang ingin mengawal jalannya sidang. Kemudian berita juga menitik beratkan pada citra Akbar Faisal yang notabene adalah kader Partai Nasdem, sebagai harapan rakyat untuk parlemen bersih dikemudian hari. Berikut teks beritanya:

Kisah tentang MKD semakin menarik. Saya mendapatkan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk penonaktifan sementara pada MKD DPR untuk saya. Anda lihat di dalam daftar Nasdem tidak ada nama saya, dasarnya saya dalam posisi teradu yang diadakan oleh Ridwan Bae," ujar Akbar di depan ruang sidang MKD pada Rabu, 16 Desember 2015.

Causal Interpretation. Pada bagian ini, Vivanews.com menjelaskan bahwa Akbar Faisal sebagai tokoh yang berperan dalam masalah ini.

Moral Evaluation. Selanjutnya citra buruk pelaksanaan sidang MKD juga digambarkan pada peristiwa penonaktifan Akbar Faisal. Vivanews.com menilai proses pemecatannya tidak sesuai dengan aturan tata cara MKD sendiri. Dengan perangkat *cathchphrases*, diambil dari pernyataan kader Nasdem, yang menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR. Pernyataan ini mengesankan penonaktifan Akbar Faisal sebagai sebuah tindakan yang perlu dilawan dalam artian Vivanews.com menganggap tindakan ini sebagai serangan politik yang melemahkan fraksi Nasdem di MKD. Sebagai berikut:

Akbar menilai keputusan itu sepihak dan tidak adil. Jika mengacu bahwa keputusan itu adalah keputusan pimpinan DPR, seharusnya trio Golkar yang antara lain, Kahar Muzakir, Ridwan Bae, dan Adies Kadir seharusnya juga dinonaktifkan dari MKD.

"Pada saat yang bersamaan saya sudah melaporkan tiga orang dan saya belum tahu diproses atau tidak. Jika mengikuti surat ini seharusnya tiga orang yang saya adukan itu juga tidak ada di MKD ini," ujar Akbar.

Peristiwa tersebut dilabeli sebagai sebuah kezaliman (*Depiction*) yang dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan yaitu Fahri Hamzah dari fraksi PKS. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kezaliman berarti kebengisan; kekejaman; ketidakadilan. Dalam konteks berita, disebut kezaliman karena penonaktifan Akbar Faisal dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang ketua Dewan demi tujuan tertentu. Selain itu

pemecatan juga dicap sebagai kekeliruan yang perlu dibenarkan karena tidak memakai prosedur yang resmi.

Selanjutnya untuk memperkuat bingkai berita, Vivanews.com juga menyertakan perangkat *exemplaar* yang membandingkan peristiwa ini dengan aduan Akbar Faisal yang tidak ditanggapi oleh ketua Dewan. Sedangkan aduan lainnya ditanggapi bahkan sekarang beliau sendiri mendapat sanksi. Perangkat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pemecatan sebagai sebuah ketidakadilan, hal ini juga memperkuat bingkai berita. Kemudian proses pemecatan dianggap tidak menggunakan prosedur resmi MKD dengan memaparkan proses yang seharusnya dilakukan, sebagai berikut:

Politikus Nasdem itu menuding adanya upaya untuk membuat kasus pelanggaran etik Novanto ini dihentikan. "Sejak awal mereka merancang agar suara yang ingin menegakkan etika di DPR itu tersumbat," ucap Akbar.

Treatment Recommendation. Solusi atas masalah ini Perangkat *roots* yang selanjutnya mendasari bingkai penonaktifan Akbar Faisal sebagai sebuah kezaliman karena tindakan tersebut menyalahi etika dan penyalahgunaan wewenang. Sebagai Wakil dari fraksi Nasdem yang punya hak menjadi anggota MKD tidak sepatutnya dipecat dengan cara seperti ini, tidak menggunakan prosedur yang semestinya. Tindakan perekaman yang dilakukan Akbar Faisal mewakili kehendak rakyat. Karena tertutupnya sidang membatasi akses keingintahuan rakyat tentang jalannya sidang. Transparansi sidang MKD dinilai sebagai acuan kebersihan parlemen yang memang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada rakyat. Sebagai berikut:

Secara tegas, Akbar mengatakan tidak menerima keputusan itu dan akan memaksa untuk masuk ke ruang MKD untuk tetap mengikuti persidangan internal di MKD.

"Hari ini DPR mempertunjukkan sebuah tontonan yang luar biasa memalukan. Saya akan melawan dan masuk ke dalam," tegas Akbar.

11. Berita 16 Desember 2015. Judul “Akhir dari Drama Sidang Etik 'Papa Minta Saham'”

Akhir dari Drama Sidang Etik 'Papa Minta Saham'

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) resmi ditutup. Hasilnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto tidak lagi menjabat sebagai ketua.

Setelah melalui proses panjang berminggu-minggu, keputusan MKD ini akhirnya diambil, karena pertimbangan bahwa Setya Novanto menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MKD.

Seperti diketahui, dari 17 anggota MKD, 10 menyatakan Setya Novanto terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik sedang dalam kasus 'Papa Minta saham', yang melibatkan Presiden Direktur Freeport, Maroef Sjamsoedin, dan Pengusaha M. Riza Chalid.

Sementara itu, tujuh lainnya menyatakan bahwa surat Novanto melakukan pelanggaran berat.

Inilah keputusan Rapat MKD seperti dibacakan oleh Ketua MKD Surahman Hidayat.

1. Sidang MKD atas pengaduan saudara Sudirman Said terhadap Saudara Setya Novanto, dengan menerima surat pengunduran diri saudara Setya Novanto No. Anggota A.300 FPG sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 tertanggal 16 Desember 2015.
2. Terhitung sejak hari Rabu 16 Desember 2015, saudara Setya Novanto dinyatakan berhenti sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019.
3. Demikian keputusan rapat MKD ini dibacakan pada sidang MKD yang sifatnya terbuka untuk umum pada hari Rabu 16 Desember 2015.

Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Vivanews.com dalam berita yang ber Judul “Akhir dari Drama Sidang Etik 'Papa Minta Saham'”

Tabel 3.13 tabulasi pembedingkaian yang dilakukan Vivanews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Penutupan Sidang MKD dikarenakan Setya Novanto sudah mengajukan surat pengunduran diri dan tidak menjabat lagi sebagai ketua DPR.
Causal Interpretation	Hasilnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto tidak lagi menjabat sebagai ketua.
Moral evaluation	Sidang kode etik kasus “Papa Minta Saham” hanya sebagai bahan bercandaan dan tidak selesai tuntas.
Treatment recommendation	Surat pengunduran diri dari Setya Novanto adalah kunci dimana kasus “Papa Minta Saham “ akan segera berakhir.

Berita kedua pada tanggal 16 Desember 2015 mengangkat judul “Akhir dari Drama Sidang Etik 'Papa Minta Saham’”. Di sini Vivanews.com menggambarkan bahwa:

Problem Identification atau identifikasi masalah dalam berita ini Gagasan terakhir adalah ketika Setya Novanto mengundurkan diri sehingga sidang MKD dinyatakan selesai dan tidak bisa dilanjutkan. Di saat sidang tinggal menunggu keputusan, secara mengejutkan Setya Novanto menyatakan mengundurkan diri melalui surat pengunduran diri yang dibacakan ketua Sidang MKD yaitu Khahar Muzakir yang juga dari fraksi Golkar.

Dalam pandangan Vivanews.com, pengunduran diri Setya Novanto tidak perlu diapresiasi oleh semua pihak terutama masyarakat. Konstruksi

ini menyanggah pernyataan dari Setya Novanto sendiri perihal pengunduran dirinya dari jabatan Ketua DPR. Melalui surat pengunduran diri maupun konferensi pers, ia mengatakan mundur untuk menjaga kestabilan DPR dan ketenangan masyarakat.

Namun dalam berita ini, pengunduran diri Setya Novanto dianggap sebagai sebuah klimaks drama yang penuh dengan intrik politik. Tindakan ini dinilai untuk menghindari sanksi yang akan dijatuhkan oleh MKD yaitu pencabutan jabatan atau pemecatan. Teks beritanya sebagai berikut :

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) resmi ditutup. Hasilnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto tidak lagi menjabat sebagai ketua.

Dalam teks di atas, Vivanews.com juga menekankan sikap atau tindakan Setya Novanto mundur menjelang putusan MKD sebagai sikap seorang pengecut, bukan sikap ksatria. Pengunduran diri Setya Novanto dianggap sebagai strategi untuk mengelabui MKD. Dengan mundur sebelum putusan dibacakan, MKD tidak bisa menjatuhkan sanksi apapun kepadanya, bahkan keputusan sidang pun tidak ada. Setya Novanto berhasil menjaga statusnya sebagai anggota DPR aktif, walaupun tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPR. Untuk di masa yang akan datang, Setya Novanto masih berhak dan memenuhi syarat untuk menjabat semua posisi di DPR termasuk Ketua MKD sekalipun.

Setelah melalui proses panjang berminggu-minggu, keputusan MKD ini akhirnya diambil, karena pertimbangan bahwa Setya Novanto menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MKD

Causal Interpretation. Pada bagian ini, Vivanews.com menjelaskan bahwa Setya Novanto sebagai tokoh yang berperan dalam masalah ini.

Moral Evaluation. Vivanews.com mengembangkan konstruksi pengunduran diri sebagai strategi untuk menghindari sanksi. Karena ketika Setya Novanto mundur, MKD tidak bisa lagi menjatuhkan vonisnya. Dengan kata lain Setya Novanto berhasil mengakali peradilan MKD untuk kepentingannya di waktu sebelum vonis diputuskan. Oleh karenanya ia masih tercatat sebagai anggota DPR yang bersih dari pelanggaran. Setidaknya Novanto menghapus satu catatan buruk yang nantinya dapat mempengaruhi karir politiknya di masa yang akan datang.

Seperti diketahui, dari 17 anggota MKD, 10 menyatakan Setya Novanto terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik sedang dalam kasus 'Papa Minta saham', yang melibatkan Presiden Direktur Freeport, Maroef Sjamsoedin, dan Pengusaha M. Riza Chalid.

Dengan perangkat *consequences*, Vivanews.com menekankan citra parlemen yang akan memburuk sebagai akibat dari pemecatan Akbar Faisal ini sehingga kepercayaan publik pada parlemen pun akan menurun. Dan peristiwa ini akan diingat terus oleh publik sebagai citra buruk parlemen.

Dari perangkat ini juga diketahui bahwa Metro menitik beratkan konstruksi pada citra Setya Novanto yang tidak sportif, lari dari tanggung jawab. Perangkat ini juga sekaligus menjawab pernyataan dari Setya Novanto terkait pengunduran dirinya. Menurutnya, keputusan itu diambil

agar masyarakat tidak gelisah dan berlarut-larut sehingga mengganggu kinerja DPR.

Treatment Recommendation. Solusi atas masalah ini
Selanjutnya unsur gambar dalam berita menunjukkan citra pelaksanaan sidang MKD. Gambar gerombolan wartawan dan keamanan di luar ruang sidang MKD diberi keterangan “Mengadili Etika Setya Novanto”, yang terlihat menunggu informasi mengenai jalannya sidang yang pada saat itu sidang dilakukan secara tertutup. Dengan bantuan foto (visual image), secara tidak langsung membawa khalayak berita ke dalam emosi penasaran, ketegangan dengan harap harap cemas yang dirasakan oleh wartawan atas pelaksanaan tertutupnya sidang tersebut.

Tujuan ketiga yaitu untuk menjatuhkan citra Setya Novanto sebagai tokoh sentral dalam persidangan ini. Citra Novanto sangat erat kaitanya dengan konstruksi sidang MKD yang dibangun karena baik buruknya sidang MKD tergantung dimana memposisikan siapa lawan siapa kawan. Vivanews.com cenderung menempatkan Setya Novanto pada posisi musuh rakyat. Sebaliknya Vivanews.com mencitrakan Akbar Faisal kader Nasdem sebagai ikon anggota DPR yang amanah. Hal ini tentunya berkaitan dengan pemecatan karena membocorkan sidang MKD.

Untuk membangun konstruksinya tentang Setya Novanto, Vivanews.com menggunakan perangkat pembingkai *cathchphrases* yang menonjolkan tindakan pengunduran diri Setya Novanto sebagai perbuatan yang menyimpang. Dalam artian bahwa tindakan ini menyalahi tanggung

jawabnya sebagai Ketua wakil rakyat di DPR sehingga tidak perlu diapresiasi. Jika dirujuk kepada fungsinya, persidangan etik pun dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, menertibkan wakil rakyat yang melanggar kode etik pekerjaannya.

Vivanews.com juga menggunakan *depiction* untuk melabeli pengunduran diri Setya Novanto sebagai drama yang penuh dengan intrik politik. Pemakaian kata drama menunjukkan bahwa Metro menganggap tindakan- tindakan Setya Novanto selama persidangan MKD seperti tontonan yang penuh kepura-puraan. Kemudian pemakaian kalimat intrik yang berarti penyebaran kabar bohong yang sengaja untuk menjatuhkan lawan, yang menunjukkan bahwa pengunduran diri sebagai persengkongkolan Setya Novanto dengan MKD. Berikut keputusan rapat MKD:

Inilah keputusan Rapat MKD seperti dibacakan oleh Ketua MKD Surahman Hidayat.

1. Sidang MKD atas pengaduan saudara Sudirman Said terhadap Saudara Setya Novanto, dengan menerima surat pengunduran diri saudara Setya Novanto No. Anggota A.300 FPG sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 tertanggal 16 Desember 2015.
2. Terhitung sejak hari Rabu 16 Desember 2015, saudara Setya Novanto dinyatakan berhenti sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019.
3. Demikian keputusan rapat MKD ini dibacakan pada sidang MKD yang sifatnya terbuka untuk umum pada hari Rabu 16 Desember 2015.

12. Berita Kamis, 17 Desember 2015. Setya Novanto Mundur, Ini Komentar Jokowi

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat suara terkait mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mengapresiasi keputusan Novanto untuk mundur sebelum putusan Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Ya kita menghormati setiap keputusan yang sudah diberikan oleh Pak Setya Novanto," kata Jokowi, di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2015.

Presiden Jokowi mengaku sejauh ini tidak ada komunikasi antara dirinya dengan Novanto setelah memilih mundur.

Ke depan, menurut Jokowi, hubungan legislatif dan eksekutif akan semakin membaik. "Dari dulu kan baik-baik saja," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Diketahui, Setya Novanto memutuskan mundur pada Rabu malam, 16 Desember 2015. Keputusan Novanto hanya beberapa saat sebelum MKD mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran etik Novanto dalam kasus "Papa Minta Saham" Freeport.

Berikut adalah tabulasi pembingkai yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pembingkai yang dilakukan

Tabel 3.14. tabulasi pemingkaraan yang dilakukan Vivanews.com

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Presiden mengapresiasi Novanto untuk mundur dari ketua DPR.
Causal Interpretation	Presiden Jokowi memberi tanggapan
Moral evaluation	-
Treatment recommendation	-

Analisis:

Identifikasi Masalah. Pada alinea pertama berita, Vivanews menuliskan opini yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo akhirnya angkat suara terkait mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengapresiasi keputusan Novanto untuk mundur sebelum putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. "Ya kita menghormati setiap keputusan yang sudah diberikan oleh Pak Setya Novanto," kata Jokowi, di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2015. Presiden Jokowi mengaku sejauh ini tidak ada komunikasi antara dirinya dengan Novanto setelah memilih mundur. Ke depan, menurut Jokowi, hubungan legislatif dan eksekutif akan semakin membaik. "Dari dulu kan baik-baik saja," kata mantan Wali Kota Solo itu. Diketahui, Setya Novanto memutuskan mundur pada Rabu malam, 16 Desember 2015. Keputusan Novanto hanya beberapa saat sebelum MKD mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran etik Novanto dalam kasus "Papa Minta Saham" Freeport. Melalui opini tersebut, Vivanews mengidentifikasi masalah

bahwa Presiden Joko Widodo akhirnya angkat suara terkait mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Menentukan Penyebab Masalah. Dalam berita ini, sebagai penyebab masalah yaitu pengunduran diri Setya Novanto dari kursi ketua Dpr dan ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo.

B. Analisis Framing Tempo.co

1. Berita Sabtu, 5 Desember 2015. Papa Minta Saham, Setya Novanto Dibidik Percobaan Korupsi

Berikut isi berita:

Kejaksaan Agung menilai pembicaraan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, saudagar minyak Mohammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin patut diduga sebagai percobaan korupsi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan percobaan korupsi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagai tindak pidana.

Karena itu, kata dia, penyelidik masih mendalami isi rekaman untuk mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam pertemuan Setya, Riza, dan Maroef. "Ini kan *ngobrol* untuk beli apa? *Private jet* yang bagus dan representatif, kan?" kata Prasetyo di kantornya, Jumat, 4 Desember 2015, mengutip satu bagian rekaman. "Kami akan mencermati siapa yang bermufakat melakukan korupsi, siapa cari keuntungan."

Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan

Tabel 3.15. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Tiga orang sebagai percobaan korupsi dan melanggar pasal 15 undang-undang pemberantasan korupsi.
Causal Interpretation	Rekaman yang direkam sebagai bukti percobaan korupsi.
Moral evaluation	Kejaksaan Agung masih mendalami isi rekaman untuk memastikan peran masing-masing dalam pertemuan Setya, Riza, dan Maroef.
Treatment recommendation	mengutip satu bagian rekaman. "Kami akan mencermati siapa yang bermufakat melakukan korupsi, siapa cari keuntungan."

Analisis:

Identifikasi Masalah. Pada alinea pertama berita, Tempo menuliskan opini yang menyebut bahwa Kejaksaan Agung menilai pembicaraan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, saudagar minyak Mohammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin patut diduga sebagai percobaan korupsi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan percobaan korupsi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagai tindak pidana. Melalui opini tersebut, Tempo mengidentifikasi masalah bahwa pembicaraan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, saudagar

minyak Mohammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin patut diduga sebagai percobaan korupsi.

Menentukan Penyebab Masalah. Percakapan rekaman yang direkam oleh Sudirman Said menjadi bukti adanya percobaan korupsi yang mencatut nama presiden dan wakil presiden serta presiden direktur PT.Freeport.

Membuat Keputusan Moral. Berita ini memuat kutipan wawancara narasumber tentang Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan percobaan korupsi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagai tindak pidana. Karena itu, kata dia, penyelidik masih mendalami isi rekaman untuk mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam pertemuan Setya, Riza, dan Maroef. Dengan mengutip keterangan dari narasumber, tampak Tempo tidak memberi penilaian moral. Penilaian moral lebih kepada mendalami isi rekaman untuk mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam pertemuan Setya, Riza, dan Maroef.

Menekankan Penyelesaian. Pada alinea terakhir, Tempo kembali menulis opini yang menyebutkan bahwa mengutip satu bagian rekaman. "Kami akan mencermati siapa yang bermufakat melakukan korupsi, siapa cari keuntungan.". Dari sini terlihat upaya Tempo memberi penekanan penyelesaian dengan memberikan keterangan satu bagian rekaman yang akan dicermati siapa yang bermufakat melakukan korupsi, siapa cari keuntungan.

2. Berita 7 Desember 2015. Judul “Papa Minta Saham, Sidang Setya Novanto Digelar Tertutup”

Berita yang ditulis pada 7 Desember 2015 merupakan berita tentang Menyoal Papa Minta Saham, Sidang Setya Novanto Digelar Tertutup. Berita tersebut selengkapnya adalah:

Papa Minta Saham, Sidang Setya Novanto Digelar Tertutup

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan untuk meminta keterangan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto digelar tertutup. Seluruh staf ahli dan kru televisi diminta keluar dari ruangan sidang.

"Kami dilarang berada di dalam selama sidang internal," ujar Rifki, juru kamera TV Parlemen, Senin, 7 Desember 2015.

Rifki menjelaskan, larangan berada di ruang sidang disampaikan ketua sidang, Surahman Hidayat. Alasannya, seluruh anggota akan membahas opsi apakah pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto berlangsung terbuka atau tertutup.

Sidang pemeriksaan Setya Novanto baru dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Sesaat sebelum masuk ruang sidang MKD, Setya sempat mengelabui wartawan yang menanti kedatangannya dari arah tangga berjalan. Ia memilih datang lewat selasar selatan.

Pemeriksaan ini akan menentukan nasibnya atas tuduhan yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Dalam laporan tersebut, Setya diduga meminta jatah saham PT Freeport dengan mencatat nama Presiden Joko Widodo.

Hingga berita ini diturunkan, kru TV Parlemen belum diperkenankan masuk ruang sidang. Televisi layar lebar yang disediakan bagi wartawan, di muka ruang MKD, untuk menonton proses persidangan juga masih dalam keadaan mati.

Berikut adalah tabulasi pembedaan yang dilakukan Vivanews.com dalam berita yang ber Judul “Papa Minta Saham, Sidang Setya Novanto Digelar Tertutup”

Tabel 3.16. tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan digelar tertutup.
Causal Interpretation	Pihak media elektronik cetak maupun online dilarang berada diruang sidang karena Surahman hidayat ketua sidang mengatakan sidang digelar tertutup.
Moral evaluation	Pemeriksaan atas tuduhan yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumberdaya Minieran Sudirman Said sedang di godog dan menjadi permasalahan yang pelik.
Treatment recommendation	Hingga berita ini diturunkan, kru TV Parlemen belum diperkenankan masuk ruang sidang. Televisi layar lebar yang disediakan bagi wartawan, di muka ruang MKD, untuk menonton proses persidangan juga masih dalam keadaan mati.

Berita pertama pada tanggal 7 bulan Desember 2015 mengangkat judul “Papa Minta Saham, Sidang Setya Novanto Digelar Tertutup. Di sini Tempo.co menjelaskan:

Problem Identification atau identifikasi masalah dalam berita ini Tempo.co menempatkan tertutupnya sidang MKD dalam posisi kontroversi dalam artian sidang ini menuai perdebatan pro dan kontra. Namun Tempo.co sendiri setuju dengan tertutupnya sidang. Tempo.co bersandar pada UU yang mengatur jalannya sidang kode etik yang harusnya memang dilaksanakan secara tertutup.:

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan untuk meminta keterangan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto digelar tertutup. Seluruh staf ahli dan kru televisi diminta keluar dari ruangan sidang.

"Kami dilarang berada di dalam selama sidang internal," ujar Rifki, juru kamera TV Parlemen, Senin, 7 Desember 2015.

Sidang MKD yang dihadiri terlapor, Setya Novanto dilaksanakan secara tertutup dengan alasan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan merupakan permasalahan yang pribadi. Dengan kata lain jika sidang terbuka akan merusak harkat martabat yang bersangkutan. Tempo.co juga melabeli sidang bukan infotainment sehingga rakyat tidak perlu tahu.

Causal Interpretation. Pada bagian ini, Tempo.co menjelaskan bahwa sidang digelar tertutup sehingga tidak ada Media yang dapat meliput.

Moral Evaluation. Pemikiran atau gagasan Tempo.co ini didukung oleh pemakaian simbol- simbol untuk memberi penekanan citra baik pelaksanaan Sidang MKD. Perangkat framing ini setidaknya mengarahkan pada dua makna atas peristiwa sidang MKD yang dilaksanakan secara tertutup. Pertama, jika mengkaji pada UU sidang harus dilangsungkan dengan tertutup, walaupun pada sidang sebelumnya digelar secara terbuka. Perangkat framing (*catchprasse*) dibawah ini mengarahkan pemaknaan pada membenaran tertutupnya sidang berdasarkan UU dan menyampingkan kecurigaan mengenai alasan kenapa sidang tertutup pada saat menghadirkan Setya Novanto, sedangkan sidang yang menghadirkan Sudirman Said dan Ma'roef Sjamsoeddin dilaksanakan secara terbuka.

Sidang pemeriksaan Setya Novanto baru dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Sesaat sebelum masuk ruang sidang MKD, Setya sempat mengelabui wartawan yang menanti kedatangannya dari arah tangga berjalan. Ia memilih datang lewat selasar selatan. Pemeriksaan ini akan menentukan nasibnya atas tuduhan yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman

Said. Dalam laporan tersebut, Setya diduga meminta jatah saham PT Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo
Kedua, Tempo.co mengkonstruksi sidang kode etik digelar tertutup untuk menjaga kehormatan terlapor. Sidang MKD dilabeli (*depiction*) sebagai sidang yang *private* karena persoalan yang dibahas adalah persoalan etik. Selain itu persidangan dianggap tidak layak dan tabu untuk dilihat oleh masyarakat, mengingat persidangan menyangkut harkat dan martabat ketua DPR RI.

Treatment Recommendation. Solusi atas masalah ini Konstruksi dalam berita diperjelas dengan *exemplaar* yaitu membandingkan sidang MKD dengan kasus video porno. Seperti yang orang tahu, video porno adalah rekaman gambar yang bersifat asusila, melanggar norma masyarakat dan tabu, baik pelaku maupun yang melihat pasti merasa malu.

Hingga berita ini diturunkan, kru TV Parlemen belum diperkenankan masuk ruang sidang. Televisi layar lebar yang disediakan bagi wartawan, di muka ruang MKD, untuk menonton proses persidangan juga masih dalam keadaan mati.

3. Berita Selasa, 08 Desember 2015. Sidang Papa Minta Saham Kalla Desak Novanto Mundur

Berikut isi berita:

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memeriksa Ketua DPR Setya Novanto secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, memunculkan reaksi keras dari Istana. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kecewa atas sidang MKD. Menurut Kalla, Novanto seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya seperti desakan

publik melalui laman petisi online Change.org. "Ya itu lebih bagus sebenarnya, lebih sportif," kata dia di kantornya, kemarin.

Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan

Tabel 3.17. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan kecewa atas sidang MKD dan Jusuf Kalla mengatakan mengundurkan diri lebih baik.
Causal Interpretation	Presiden Jusuf Kalla menyatakan kecewa atas sidang MKD. Menurut Kalla, Novanto seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya
Moral evaluation	-
Treatment recommendation	-

Analisis:

Identifikasi Masalah. Pada alinea pertama berita, Tempo menuliskan opini yang menyebut bahwa Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memeriksa Ketua DPR Setya Novanto secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, memunculkan reaksi keras dari Istana. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kecewa atas sidang MKD. Menurut Kalla, Novanto seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya seperti desakan publik melalui laman petisi online Change.org. "Ya itu lebih bagus sebenarnya, lebih sportif," kata dia di kantornya,

kemarin. Melalui opini tersebut, Tempo mengidentifikasi masalah bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kecewa atas sidang MKD. Menurut Kalla, Novanto seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya seperti desakan publik.

Menentukan Penyebab Masalah. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kekecewaan terhadap sidang MKD.

4. Berita Rabu, 09 Desember 2015. Sindir Papa Minta Saham, Petugas TPS Ini Kenakan Kostum MKD

Berikut isi berita:

Warga Surabaya punya cara tersendiri untuk mengekspresikan perasaannya terhadap kasus “papa minta saham”. Salah satunya di tempat pemungutan suara Kampung Nagabonar, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan. Di TPS tersebut, petugas mengenakan seragam layaknya anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat saat menyidangkan kasus Setya Novanto.

"Ini bentuk sindiran kami kepada para politikus. Namanya bukan Mahkamah Kehormatan Dewan, tapi mahkamah kehormatan dagelan," kata Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara TPS 34 Soedjono saat ditemui *Tempo*, Rabu, 9 Desember 2015.

Soedjono memilih memakai baju hakim dengan riasan wajah bak badut. Ia mengibaratkan diri sebagai anggota Dewan yang menganggap rakyat bodoh dan dapat dipertainkan. "Padahal kita ini sudah melek politik.

Hasil sidang MKD sudah bisa ditebak, seperti lawak Srimulat pakai badut."

Selain berjajar layaknya sidang MKD, petugas lain berlagak sebagai warga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dengan mengenakan masker dan infus. Selain itu, ada yang mengenakan pakaian petugas pemadam kebakaran dan ada yang berpura-pura menjadi pohon dengan menempelkan daun-daun di tubuhnya.

"Harapannya, agar pejabat dan politikus jangan hanya ribut politik, tapi ingat rakyat butuh makan, termasuk korban kebakaran hutan kemarin," tutur M. Shaleh, yang berdandan layaknya pohon.

Tak hanya kali ini saja warga Kampung Nagabonar mengusung tema saat pemilu. Pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, mereka menggunakan tema-tema unik lain. Di antaranya TPS superhero, TPS hantu, dan TPS Wali Sanga.

Tema dan kostum unik diyakininya mampu mendongkrak antusiasme warga mencoblos. "Pemilu legislatif kemarin sampai 72 persen. Sebelum pakai kostum unik, paling enggak sampai 60 persen," ujar Soedjono.

Terbukti, baru dibuka dua setengah jam, warga yang datang mencapai 50 persen dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 495 orang. Sedangkan jumlah pemilih di DPT dalam pilkada Surabaya sebanyak 2.034.307 yang tersebar di 3.936 TPS.

Berikut adalah tabulasi pembingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pembingkaian yang dilakukan

Tabel 3.18. tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Ekspresi perasaan terhadap kasus “Papa Minta Saham” dari kampung Naga Bonar Kelurahan Moro Krembangan Kecamatan Krembangan.
Causal Interpretation	Kasus “Papa Minta Saham” menjadikan polemik terhadap Pilkada di Surabaya.
Moral evaluation	"Harapannya, agar pejabat dan politikus jangan hanya ribut politik, tapi ingat rakyat butuh makan, termasuk korban kebakaran hutan kemarin," tutur M. Shaleh, yang berdandan layaknya pohon.
Treatment recommendation	Tema dan kostum unik diyakininya mampu mendongkrak antusiasme warga mencoblos. "Pemilu legislatif kemarin sampai 72 persen. Sebelum pakai kostum unik, paling enggak sampai 60 persen," ujar Soedjono. Terbukti, baru dibuka dua setengah jam, warga yang datang mencapai 50 persen dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 495 orang. Sedangkan jumlah pemilih di DPT dalam pilkada Surabaya sebanyak 2.034.307 yang tersebar di 3.936 TPS

Analisis:

Identifikasi Masalah. Pada alinea pertama berita, Tempo menuliskan opini yang menyebut bahwa Warga Surabaya punya cara tersendiri untuk mengekspresikan perasaannya terhadap kasus “papa minta saham”. Salah satunya di tempat pemungutan suara Kampung Nagabonar, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan. Di TPS tersebut,

petugas mengenakan seragam layaknya anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat saat menyidangkan kasus Setya Novanto. Melalui opini tersebut, Tempo mengidentifikasi masalah bahwa warga Surabaya mengekspresikan diri dengan meniru berpakaian seperti seragam MKD .

Menentukan Penyebab Masalah. Kasus “PapaMinta Saham menjadi polemik di pemilihan Kepala Daerah sehingga pihak penyelenggara menggunakan kostum layaknya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Membuat Keputusan Moral. Berita ini memuat kutipan "Ini bentuk sindiran kami kepada para politikus. Namanya bukan Mahkamah Kehormatan Dewan, tapi mahkamah kehormatan dagelan," kata Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara TPS 34 Soedjono saat ditemui *Tempo*, Rabu, 9 Desember 2015.

Soedjono memilih memakai baju hakim dengan riasan wajah bak badut. Ia mengibaratkan diri sebagai anggota Dewan yang menganggap rakyat bodoh dan dapat dipertontonkan. "Padahal kita ini sudah melek politik. Hasil sidang MKD sudah bisa ditebak, seperti lawak Srimulat pakai badut."

Selain berjajar layaknya sidang MKD, petugas lain berlagak sebagai warga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dengan mengenakan masker dan infus. Selain itu, ada yang mengenakan pakaian petugas pemadam

kebakaran dan ada yang berpura-pura menjadi pohon dengan menempelkan daun-daun di tubuhnya.

"Harapannya, agar pejabat dan politikus jangan hanya ribut politik, tapi ingat rakyat butuh makan, termasuk korban kebakaran hutan kemarin," tutur M. Shaleh, yang berdandan layaknya pohon.

Tak hanya kali ini saja warga Kampung Nagabonar mengusung tema saat pemilu. Pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, mereka menggunakan tema-tema unik lain. Di antaranya TPS superhero, TPS hantu, dan TPS Wali Sanga. Dengan mengutip keterangan dari kedua narasumber yang saling bertentangan ini, tampak Tempo tidak memberi penilaian moral bagi klaim keduanya. Penilaian moral lebih kepada cara warga Surabaya berharap agar pejabat dan politikus jangan hanya ribut politik .

Menekankan Penyelesaian. Pada alinea terakhir, Tempo kembali menulis opini yang menyebutkan bahwa Tema dan kostum unik diyakininya mampu mendongkrak antusiasme warga mencoblos. "Pemilu legislatif kemarin sampai 72 persen. Sebelum pakai kostum unik, paling enggak sampai 60 persen," ujar Soedjono. Terbukti, baru dibuka dua setengah jam, warga yang datang mencapai 50 persen dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 495 orang. Sedangkan jumlah pemilih di DPT dalam pilkada Surabaya sebanyak 2.034.307 yang tersebar di 3.936 TPS. Dari sini terlihat upaya Tempo memberi penekanan penyelesaian dengan memberikan keterangan tema dan kostum unik diyakininya mampu mendongkrak antusiasme warga mencoblos .

5. Berita Senin, 14 Desember 2015. Ini Jejak Luhut di Rekaman 'Papa Minta Saham'

Berikut isi berita:

Rekaman lengkap percakapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton pada 8 Juni 2015, sudah diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Kini rekaman asli itu sudah ada di tangan Kejaksaan Agung yang tengah menyelidiki kasus tersebut. Dalam percakapan itu, nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sering disebut-sebut.

Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan

Tabel 3.19. tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Rekaman lengkap percakapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid didengarkan di dalam sidang MKD.
Causal Interpretation	Penyelidik menyelidiki rekaman asli yang sudah ada ditangan Kejangung dan nama Menkopolhukan Luhut Binsar Panjaitan sering disebut-sebut.
Moral evaluation	-

Treatment recommendation	Kejaksaan Agung sedang menyelidiki rekaman asli dari Sudirman Said dan nama Luhut Panjaitan sering disebut dalam rekaman tersebut.
---------------------------------	--

Analisis:

Identifikasi Masalah. Rekaman CCTV di hotel Ritz Carlton yang disebut tempat pertemuan tiga orang yaitu Setya Novanto, Mochammad Reza Chalid, dan Maroef Sjamsoeddin senang dalam proses penyelidikan. Tempo mengidentifikasi masalah bahwa adanya rekaman lengkap percakapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan Pengusaha Reza Chalid serta Pressdir PT. Freeport Maroef Sjamsoeedin sebagai barang bukti.

Menentukan Penyebab Masalah. Percakapan rekaman ketiga orang tersebut menjadi barang bukti di persidangan MKD.

Menekankan Penyelesaian. Pada alinea terakhir, Tempo kembali menulis opini yang menyebutkan bahwa Kini rekaman asli itu sudah ada di tangan Kejaksaan Agung yang tengah menyelidiki kasus tersebut. Dalam percakapan itu, nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sering disebut-sebut.. Dari sini terlihat upaya Tempo memberi penekanan penyelesaian dengan memberikan keterangan bahwa rekaman asli itu sudah ada di tangan Kejaksaan Agung.

6. Berita senin, 14 desember 2015. Disebut 66 Kali, Luhut Hadiri Sidang MKD Terkait Kasus Papa Minta Saham

Berikut isi berita:

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan berjalan menuju ruang sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut.

Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan

Tabel 3.20. tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut.
Causal Interpretation	Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan
Moral evaluation	-
Treatment recommendation	-

Analisis:

Identifikasi Masalah. Pada alinea pertama berita menuliskan opini yang menyebut bahwa Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Dalam pemberitaan juga disebutkan Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut. Melalui opini tersebut mengidentifikasi masalah munculnya Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport.

Menentukan Penyebab Masalah. Dalam berita ini, lebih menekankan Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan sebagai pemberitaanya.

7. Berita senin, 14 desember 2015. Penyidik Minta Maroef Dengar Lagi Rekaman 'Papa Minta Saham'

Berikut isi berita:

Kejaksaan Agung kembali meminta keterangan kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin terkait dengan kasus "Papa Minta Saham". Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah mengatakan pemanggilan Maroef untuk melengkapi keterangan sebelumnya.

Pada pemeriksaan pekan lalu, Maroef dikonfirmasi mengenai rekaman pembicaraan antara dirinya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, serta taipan minyak Mohammad Riza Chalid. Pembicaraan ketiganya berlangsung di Hotel Ritz Charlton pada 8 Juni 2015 yang direkam oleh Maroef. Lalu rekaman ini diserahkan ke Kejaksaan Agung.

"Kami minta, pelan-pelan, Pak Maroef dengarkan ulang rekaman tersebut dan dicocokkan dengan transkrip yang sudah ada," kata Arminsyah di kantornya, Senin, 14 Desember 2015.

Rekaman yang diperdengarkan lagi kepada Maroef itu berdurasi 1 jam 30 menit. Isinya soal permintaan saham terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport sampai dengan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Arminsyah, pencocokan rekaman dengan transkrip diperlukan ketenangan sehingga Maroef dipanggil lima kali. Ia mengatakan rekaman tersebut menjadi keterangan dari Maroef. Arminsyah mengatakan penyidik ingin mencari bukti-bukti dari ucapan Maroef, Riza, dan Novanto. Karena itu, tim penyidik belum memutuskan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.

Pada pemeriksaan kali ini, Maroef tiba di Kejagung sejak pukul 10.00 WIB. "Saya datang untuk memberikan keterangan lanjutan, substansinya saja," ujar Maroef.

Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan.

Tabel 3.21. tabulasi pemingkaraan yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Kejaksanaan Agung kembali meminta keterangan kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin terkait dengan kasus "Papa Minta Saham". Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan Agung Arminsyah mengatakan pemanggilan Maroef untuk melengkapi keterangan sebelumnya.
Causal Interpretation	Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin terkait dengan kasus "Papa Minta Saham"
Moral evaluation	Arminsyah mengatakan penyidik mencari bukti-bukti dari ucapan Maroef, Riza, dan Novanto.
Treatment recommendation	Maroef tiba di Kejangung pukul 10.00 WIB.

Analisis:

Identifikasi Masalah. Tempo.co menuliskan opini yang mengidentifikasi masalah munculnya pemeriksaan atas Maroef mengenai rekaman pembicaraan antara dirinya dan ketua DPR Setya Novanto yang dilangsungkan di hotel Ritz Carlton pada tanggal 08 Juni 2015. Dengan begitu Tempo.co sedikit tidak memihak terhadap Setya Novanto.

Menentukan Penyebab Masalah. Dalam berita ini, yang menyebabkan masalah yaitu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Membuat Keputusan Moral. Berita ini memuat kutipan wawancara narasumber tentang pencocokan rekaman dengan transkrip diperlukan ketenangan sehingga Maroef dipanggil lima kali. Ia mengatakan rekaman tersebut menjadi keterangan dari Maroef. Arminsyah mengatakan penyidik ingin mencari bukti-bukti dari ucapan Maroef, Riza, dan Novanto. Karena itu, tim penyidik belum memutuskan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Dengan mengutip keterangan dari kedua narasumber yang saling bertentangan ini, tampak Tempo tidak memberi penilaian moral bagi klaim keduanya. Penilaian moral lebih kepada bukti rekaman keterangan dari Maroef.

Menekankan Penyelesaian. Pada alinea terakhir, Tempo kembali menulis opini yang menyebutkan Pada pemeriksaan kali ini, Maroef tiba di Kejakung sejak pukul 10.00 WIB. "Saya datang untuk memberikan keterangan lanjutan, substansinya saja," ujar Maroef. Dari sini terlihat upaya Tempo memberi penekanan penyelesaian dengan rekomendasi yaitu dengan melakukan wawancara dengan Maroef dan maroef akan datang untuk memberikan keterangan.

8. Berita Selasa, 15 Desember 2015. Siasat Setya Novanto Loloskan Diri dari 'Papa Minta Saham'

Berikut isi berita:

Politikus Setya Novanto mengerahkan segala upaya agar lolos lagi dari sanksi etik Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) yang dijadwalkan diputus pekan ini. Ketua DPR ini menyusun

sejumlah siasat agar terbebas dari sengkabut kasus pelanggaran etik, rekaman, dan kasus 'papa minta saham'.

Salah seorang politikus Golkar menuturkan, siasat sudah disusun sejak dua pekan lalu. Salah satunya sudah dieksekusi pada Senin pekan lalu ketika Novanto meminta pemeriksaannya ditunda empat jam. Pagi-pagi, dia mengirim surat agar pemeriksaannya ditunda empat jam dengan dalih ada acara yang tak bisa ditinggalkan.

Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan

Tabel 3.22. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Ketua DPR Setya Novanto menyusun sejumlah siasat agar bisa lolos dan terbebas dari kasus pelanggaran kode etik.
Causal Interpretation	Penyusunan siasat dari Setya Novanto agar terbebas dari kasus pelanggaran kode etik.
Moral evaluation	-
Treatment recommendation	Penyusunan siasat untuk membebaskan Setya Novanto sudah dibuat sejak dua pekan lalu.

Analisis:

Identifikasi Masalah. Pada alinea pertama berita, Tempo menuliskan opini yang menyebut bahwa Politikus Setya Novanto mengerahkan segala upaya agar lolos lagi dari sanksi etik Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) yang dijadwalkan diputus

pekan ini. Setya Novanto mengatur siasat sedemikian rupa untuk bisa keluar dari jeratan kasus “Papa Minta Saham” dengan begitu Setya Novanto mendapatkan kartu hijau dan terlepas dari kasus tersebut. Ketua DPR ini menyusun sejumlah siasat agar terbebas dari sengkabut kasus pelanggaran etik, rekaman, dan kasus 'papa minta saham'. Melalui opini tersebut, Tempo mengidentifikasi masalah bahwa setya novanto membuat rencana untuk terbebas dari kasus papa minta saham.

Menentukan Penyebab Masalah. Dua pekan sebelumnya Setya Novanto sudah membuat siasat dan atur strategi untuk membebaskan dirinya terhadap kasus “Papa Minta Saham”. Tempo menuliskan opini tersebut karena Tempo tidak melihat Setya Novanto menjadi orang yang bertanggung jawab dan berjiwa kesatria.

Menekankan Penyelesaian. Pada alinea terakhir, Tempo kembali menulis opini yang menyebutkan bahwa wawancara dengan politikus Golkar menuturkan, siasat sudah disusun sejak dua pekan lalu. Salah satunya sudah dieksekusi pada Senin pekan lalu ketika Novanto meminta pemeriksaannya ditunda empat jam. Pagi-pagi, dia mengirim surat agar pemeriksaannya ditunda empat jam dengan dalih ada acara yang tak bisa ditinggalkan. Dari sini terlihat upaya Tempo memberi penekanan penyelesaian dengan memberikan keterangan dari politikus Golkar yang mengatakan bahwa setya novanto meminta menunda pemeriksaan selama empat jam.

9. Berita Rabu, 16 Desember 2015. Putusan MKD, Prabowo Dukung Setya Novanto Dihukum?

Berikut isi berita:

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dikabarkan telah memerintahkan Gerindra agar mendukung penegakan etika di kasus "papa minta saham" yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dikabarkan Gerindra telah sepakat dengan Presiden Joko Widodo agar MKD bisa mendengarkan suara publik, Rabu, 16 Desember 2015.

Saat dikonfirmasi, sejumlah pengurus Partai Gerindra kompak tutup mulut rapat-rapat. "Tidak, saya tak mau komentar soal itu," ujar Wakil Ketua MKD Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi *Tempo* pada Rabu, 16 Desember 2015. Meski demikian, Sufmi mengatakan ia memang sedang sibuk menyiapkan berita acara untuk sidang etik Setya Novanto yang tengah menjadi sorotan masyarakat saat ini

Berikut adalah tabulasi peminjaman yang dilakukan Berikut adalah tabulasi peminjaman yang dilakukan

Tabel 3.23. tabulasi peminjaman yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Prabowo Subianto memberikan perintah kepada Gerindra agar tetap mendukung penegakkan etika kasus "Papa Minta Saham".
Causal Interpretation	Sejumlah pengurus partai Gerindra kompak untuk tutup mulut.

Moral evaluation	-
Treatment recommendation	Wakil Ketua MKD fraksi Gerindra Suvmi Dasco Ahmad tidak mau berkomentar tentang sidang etik.

Analisis:

Identifikasi Masalah. Tempo.co menuliskan opini bahwa Prabowo Subianto agar tetap memberikan dukungan dalam penegakkan etika pada kasus “Papa Minta Saham”. Kasus tersebut yang menjerat Setya Novanto harus diselesaikan dengan tuntas. Tempo.co dari opini ini tidak memihak kepada Setya Novanto dan justru malah menyerang Setya Novanto sebagai penyebab kasus ini mencuat.

Menentukan Penyebab Masalah. Partai Gerindra dikonfirmasi mengenai kesepakatannya dengan Presiden Jokowi tetapi dari sejumlah pengurus partai Gerindra kompak untuk tutup mulut rapat-rapat. Begitu pula dengan wakil ketua MKD fraksi Gerindra. Suvmi Dasco Ahmad, ia sedang sibuk menyiapkan berita acara untuk sidang kodeetik Setya Novanto.

Menekankan Penyelesaian. Pada alinea terakhir, Tempo kembali menulis opini yang menyebutkan bahwa sejumlah pengurus Partai Gerindra kompak tutup mulut rapat-rapat. Opini ini mencuat karena dari pihak wakil ketua MKD dari fraksi Gerindra juga sedang sibuk mengurus dan menyiapkan berkas acara untuk persidangan kode etik yang

melibatkan Setya Novanto. Dengan begitu opini ini sangat tidak memihak kepada setya novanto selaku terdakwa dari kasus “papa minta Saham”.

10. Berita Rabu, 16 Desember 2015. Judul “Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD”

Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Akbar Faisal, memberikan keterangan terkait dengan penonaktifan dirinya sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2015. Akbar Faisal menyatakan dirinya diberhentikan dari MKD karena ada pelaporan oleh anggota MKD lainnya yaitu Ridwan Bae dengan tuduhan telah membocorkan kepada media materi sidang tertutup MKD sebelumnya

Berikut adalah tabulasi pembedingkaian yang dilakukan Vivanews.com dalam berita yang ber Judul “Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD”

Tabel 3.24. tabulasi pembedingkaian yang dilakukan Vivanews.com dalam Tabel 3.15. tabulasi pembedingkaian yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Akbar Faisal memberikan keterangan terkait dengan penonaktifan dirinya sebagai anggota MKD.
Causal Interpretation	Pemecatan Akbar Faisal dari keanggotaan MKD.
Moral evaluation	Akbar Faisal menyatakan dirinya diberhentikan dari MKD karena ada pelaporan oleh anggota MKD lainnya yaitu Ridwan Bae dengan tuduhan telah membocorkan kepada media materi sidang tertutup MKD sebelumnya
Treatment	Tuduhan dari Ridwan Bae yang

recommendation	menyatakan bahwa Akbar Faisal membocorkan isi persidangan kepada media sehingga Akbar Faisal diberhentikan.
-----------------------	---

Berita kedua pada tanggal 16 Desember 2015 mengangkat judul “Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD”. Di sini Tempo.co menggambarkan bahwa Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal dinonaktifkan dari keanggotaan di MKD. Keputusan itu diambil jelang keputusan akhir persidangan etik Ketua DPR Setya Novanto.

Problem Identification atau identifikasi masalah dalam berita ini Tempo.co juga menekankan baiknya pelaksanaan sidang MKD ketika terjadi penonaktifan Akbar Faisal sebagai anggota MKD. Dalam pandangan Tempo.co penonaktifan Akbar Faisal dari MKD merupakan tindakan yang memang seharusnya dilakukan untuk menertibkan jalannya persidangan. Peristiwa ini juga menandakan bahwa sidang MKD benar-benar mengikuti tata cara persidangan yang benar dengan mengeluarkan anggota yang melakukan pelanggaran.

Penonaktifan Akbar Faisal berawal dari aduan yang dilakukan oleh Ridwan Bae atas tuduhan membocorkan isi persidangan kepada media massa. Kemudian ditindak lanjuti oleh Wakil Ketua Dewan dengan menurunkan surat keputusan penonaktifan tersebut. Sidang MKD yang dihadiri Setya Novanto ini memang telah disepakati bersifat tertutup. Keputusan tersebut diambil dari rapat anggota MKD sebelumnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Akbar Faisal, memberikan keterangan terkait dengan penonaktifan dirinya sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II

Dari teks di atas pula, Tempo.co menekankan pelanggaran tersebut sebagai alasan penonaktifan Akbar Faisal dan menyanggah kecurigaan publik bahwa Akbar Faisal disingkirkan untuk melancarkan kongkalikong sidang MKD karena terlalu kritis. Akbar Faisal adalah anggota MKD dari fraksi Nasdem yang sering keras dalam berpendapat di MKD untuk menuntut Setya Novanto.

Untuk menyanggah atau melawan Akbar Faisal, Tempo.co mengangkat gagasan lain dalam berita ini yaitu keraguan keputusan MKD karena validitas alat bukti tidak bisa diverifikasi oleh MKD. Secara tidak langsung, pernyataan ini membantah apa yang dituntutkan oleh Akbar Faisal dan mengarah pada pembenaran penonaktifan Akbar Faisal. Harapannya agar khalayak ikut menyetujui penonaktifan ini. Teks beritanya sebagai berikut:

Akbar Faisal menyatakan dirinya diberhentikan dari MKD karena ada pelaporan oleh anggota MKD lainnya yaitu Ridwan Bae dengan tuduhan telah membocorkan kepada media materi sidang tertutup MKD sebelumnya

Causal Interpretation. Pada bagian ini, Vivanews.com menjelaskan bahwa Akbar Faisal sebagai tokoh yang berperan dalam masalah ini.

Moral Evaluation. Kemudian perangkat penalaran *roots* digunakan oleh Tempo.co untuk meyakinkan khalayak bahwa tindakan

penonaktifan Akbar Faisal oleh MKD adalah tindakan yang benar-benar atas dasar menertibkan jalannya sidang MKD. Tindakan MKD berdasarkan keputusan MKD murni tanpa ada maksud politik tertentu.

Akbar Faisal menyatakan dirinya diberhentikan dari MKD karena ada pelaporan oleh anggota MKD lainnya yaitu Ridwan Bae dengan tuduhan telah membocorkan kepada media materi sidang tertutup MKD sebelumnya

Treatment Recommendation. Solusi atas masalah ini Dengan teks berita dia atas Tempo.co sekaligus membantah opini publik yang mencurigai pemecatan Akbar Faisal sebagai salah satu upaya untuk melancarkan penyelamatan Setya Novanto. Mengingat dia adalah salah satu tokoh yang keras suaranya untuk menuntut Setya Novanto. Sebaliknya, Tempo.co menyandarkan frame berita ini pada premis (*appeals to principle*) sidang telah disepakati anggota MKD untuk dilaksanakan secara tertutup. oleh karenanya siapapun yang membocorkan jalannya persidangan kepada public akan dikenai sanksi. Termasuk Akbar Faisal yang kedapatan merekam dan memberikan rekaman jalannya sidang kepada media masa.

11. Berita 17 Desember 2015. Judul “MKD Tutup Kasus Setya Novanto Karena Pengunduran Diri ”

MKD Tutup Kasus Setya Novanto Karena Pengunduran Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mengatakan sidang kasus dugaan pelanggaran etika atas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dinyatakan ditutup karena adanya surat pengunduran diri Setya Novanto.

"Jadi keputusan MKD menyatakan, kasus dugaan pelanggaran etik ditutup sejak diterimanya surat pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto," kata

Ketua MKD Surahman Hidayat saat membacakan keputusan MKD di Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2015 malam.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto melayangkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI 2014-2019.

Menurut Surahman, sejak 16 Desember 2015 Setya Novanto tidak lagi menjabat Ketua DPR RI. "Jadi alhamdulillah sudah berakhir, happy ending," kata Surahman.

Sebelumnya, Wakil Ketua MKD Sufni Dasco membacakan surat pengunduran diri Setya Novanto.

"Sehubungan dengan perkembangan proses di MKD yang saat ini sedang berlangsung, untuk menjaga martabat, harkat, dan kehormatan DPR RI serta menciptakan ketenangan dalam masyarakat, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI 2014-2019," kata Sufni Dasco saat membacakan surat Setya Novanto.

Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Vivanews.com dalam berita yang ber Judul “MKD Tutup Kasus Setya Novanto Karena Pengunduran Diri”

Tabel 3.25. tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Pengunduran diri Setya Novanto menjadikan sidang MKD ditutup atas kasusnya.
Causal Interpretation	Jadi keputusan MKD menyatakan, kasus dugaan pelanggaran etik ditutup sejak diterimanya surat pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto
Moral evaluation	Surat pengunduran diri Setya Novantomembuat persidangan MKD ditutup sehingga tidak ada kejelasan dari kasus kode etik “Papa Minta Saham”
Treatment recommendation	Pengunduran diri Setya Novanto menjadi kunci ditutupnya kasus “Papa Minta Saham”

Berita pertama pada tanggal 17 Desember 2015 mengangkat judul “MKD Tutup Kasus Setya Novanto Karena Pengunduran Diri”. Di sini Tempo.co menggambarkan :

Problem Identification atau identifikasi masalah dalam berita ini Tempo.co menempatkan Setya Novanto seolah-olah menjadi korban. Terjadinya polemik akan kasus ini karena penggiringan opini publik oleh media, secara terang-terangan Tempo.co menyebut media tersebut yaitu Vivanews.com. Kegaduhan terjadi karena media ini terus menyerang Setya Novanto dengan pemberitaan yang memberatkannya.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mengatakan sidang kasus dugaan pelanggaran etika atas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dinyatakan ditutup karena adanya surat pengunduran diri Setya Novanto.

Dari teks berita di atas jelas Tempo.co ingin menyelamatkan citra Setya Novanto dimata publik. Dengan menempatkan media sebagai dalang kegaduhan, Setya Novanto dicitrakan sebagai orang yang tegar dan bijaksana.

Causal Interpretation. Pada bagian ini, Tempo.co menjelaskan bahwa surat keputusan diri yang diberikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan itu menjadi penyebab persidangan masalah kode etik yang sedang diperbincangkan dan Tempo.co juga menuliskan opini bahwa Setya Novanto tidak bertanggung jawab.

Moral Evaluation. Mengenai pengunduran diri Setya Novanto, frame Tempo.co dibentuk dengan perangkat *cathchphrases* yang menonjolkan Setya Novanto sebagai korban penggiringan opini oleh

media massa yang dinilai selalu menyerangnya dalam berita-beritanya. Sehingga nama Novanto buruk di hadapan khalayak media. Selain itu polemik seputar kasus pencatutan nama Presiden ini dianggap hanya karena kuatnya pengaruh media terhadap opini publik. Selain itu polemik seputar kasus pencatutan nama Presiden ini dianggap hanya karena kuatnya pengaruh media terhadap opini publik. Teks beritanya sebagai berikut:

Jadi keputusan MKD menyatakan, kasus dugaan pelanggaran etik ditutup sejak diterimanya surat pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto," kata Ketua MKD Surahman Hidayat saat membacakan keputusan MKD di Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2015 malam.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto melayangkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI 2014-2019.

Menurut Surahman, sejak 16 Desember 2015 Setya Novanto tidak lagi menjabat Ketua DPR RI. "Jadi alhamdulillah sudah berakhir, happy ending," kata Surahman. Sebelumnya, Wakil Ketua MKD Sufni Dasco membacakan surat pengunduran diri Setya Novanto.

Kemudian citra Novanto sebagai korban juga didukung pada bantuan gambar pada background pembawa acara/ *news anchor* yang diberi keterangan "Sidang MKD". *Background* tersebut menampilkan foto Sudirman Said dan Ma'roef Sammsuoddin bukan foto Setya Novanto. Pemberitaan ini merupakan manipulasi simbol untuk membela Setya Novanto, padahal tokoh sentral dalam kasus papa minta saham ini adalah Setya Novanto, akan tetapi pada gambar tersebut tidak ditampilkan foto Setya Novanto. Tempo.co berusaha menjaga citra Setya Novanto dengan tidak menampilkan fotonya sebagai pihak terlapor, seakan-akan dia tidak terlibat dengan kasus ini melainkan hanya sebagai korban. Gambar sebagai berikut:



Kemudian Tempo.co mengangkat cacatnya pelaksanaan sidang MKD dalam hal alat bukti yang tidak bisa divalidasi oleh MKD. Pernyataan ini terkesan memihak kepada Setya Novanto pula.

Treatment Recommendation. **Solusi atas masalah ini** Penalaran selanjutnya adalah keraguan MKD akan bisa menjatuhkan vonis kepada Setya Novanto karena alat bukti yang tidak valid. Hal ini secara tidak langsung membantah apa yang sering Akbar Faisal suarakan dalam persidangan MKD yaitu untuk menuntut Setya Novanto. Sehingga pada akhirnya, penonaktifan Akbar Faisal dianggap wajar. Teks beritanya sebagai berikut:

Sehubungan dengan perkembangan proses di MKD yang saat ini sedang berlangsung, untuk menjaga martabat, harkat, dan kehormatan DPR RI serta menciptakan ketenangan dalam masyarakat, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI 2014-2019," kata Sufni Dasco saat membacakan surat Setya Novanto

Dari teks diatas juga bisa ditarik pemahaman bahwa Setya Novanto tidak bisa diadili karena kelemahan alat bukti. Tempo.co memperkuat citra baik Setya Novanto dengan penalaran *roots* yaitu ketika pengunduran diri dilakukan Setya Novanto yang dilakukan bukan karena ia bersalah melanggar kode etik anggota DPR, namun lebih karena

mengedepankan moralnya sebagai Ketua DPR. Ia tidak ingin mengahiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Berikut teks beritanya:

Agar konstruksi pengunduran diri dapat diterima secara logis, Tempo.co membangun citra Setya Novanto sebagai pihak yang tidak bersalah dengan cara ditempatkan oleh Tempo.co sebagai korban penggiringan opini oleh media. Oleh karena itu konsekuensi dari bingkai ini adalah tim tindakan kuasa hukum Setya Novanto melaporkan Vivanews.com ke dewan pers atas dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik.

12. Berita Rabu, 30 Desember 2015. Kaleidoskop 2015: Setya Novanto, Papa Mundur karena Saham'

Berikut isi berita:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya pada 16 Desember lalu setelah kontroversi kasus "Papa Minta Saham". Kasus ini bermula ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sudirman menuding Setya mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak karya Freeport. Setya diketahui pernah bertemu hingga tiga kali dengan bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. Dalam dua pertemuan terakhir, Setya bahkan mengajak pengusaha minyak, Muhammad Riza Chalid.

Pemeriksaan kasus "Papa Minta Saham" di Mahkamah Kehormatan Dewan diwarnai berbagai kontroversi, termasuk drama pergantian anggota Mahkamah yang merupakan pendukung Setya. Belakangan, mayoritas hakim di Mahkamah Kehormatan meminta Setya dijatuhi sanksi sedang dan mesti mengundurkan diri dari jabatannya.

Sesaat sebelum vonis dijatuhkan, Setya menyatakan mundur. Setya menjadi Ketua DPR pertama yang lengser di tengah jalan sesudah Orde Baru tumbang.

Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaian yang dilakukan

Tabel 3.26. tabulasi pemingkaian yang dilakukan Tempo.co

Variabel	Keterangan
Problem Identification	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya pada 16 Desember lalu setelah kontroversi kasus "Papa Minta Saham".
Causal Interpretation	Pengunduran diri Setya Novanto menjadikan berakhirnya atau ditutupnya sidang kasus "Papa Minta Saham"
Moral evaluation	Pemeriksaan kasus "Papa Minta Saham" di MKD diwarnai berbagai kontroversi termasuk drama pergantian anggota yang merupakan pendukung Setya Novanto.
Treatment recommendation	Sesaat sebelum vonis dijatuhkan, Setya menyatakan mundur. Setya menjadi Ketua DPR pertama yang lengser di tengah jalan sesudah Orde Baru tumbang.

Analisis:

Identifikasi Masalah. Pada alinea pertama berita, Tempo menuliskan opini yang menyebut bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya pada 16 Desember lalu setelah kontroversi kasus "Papa Minta Saham". Kasus ini bermula ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan.. Melalui opini tersebut, Tempo mengidentifikasi masalah bahwa mengundurkan diri dari jabatannya pada 16 Desember lalu.

Menentukan Penyebab Masalah. Dalam berita ini, sebagai penyebab masalah yaitu Setya Novanto

Membuat Keputusan Moral. Berita ini memuat kutipan wawancara narasumber tentang menuding Setya mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak karya Freeport. Setya diketahui pernah bertemu hingga tiga kali dengan bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. Dalam dua pertemuan terakhir, Setya bahkan mengajak pengusaha minyak, Muhammad Riza Chalid. Dengan mengutip keterangan dari kedua narasumber yang saling bertentangan ini, tampak Tempo tidak memberi penilaian moral. Penilaian moral lebih kepada Setya mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak karya Freeport.

Menekankan Penyelesaian. Pada alinea terakhir, Tempo kembali menulis opini yang menyebutkan bahwa Pemeriksaan kasus "Papa Minta

Saham" di Mahkamah Kehormatan Dewan diwarnai berbagai kontroversi, termasuk drama pergantian anggota Mahkamah yang merupakan pendukung Setya. Belakangan, mayoritas hakim di Mahkamah Kehormatan meminta Setya dijatuhi sanksi sedang dan mesti mengundurkan diri dari jabatannya. Sesaat sebelum vonis dijatuhkan, Setya menyatakan mundur. Setya menjadi Ketua DPR pertama yang lengser di tengah jalan sesudah Orde Baru tumbang. Dari sini terlihat upaya Tempo memberi penekanan penyelesaian dengan memberikan keterangan mayoritas hakim di Mahkamah Kehormatan meminta Setya dijatuhi sanksi sedang dan mesti mengundurkan diri dari jabatannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Media sebagai pengamat dan Sebagai agen konstruksi sosial, media cenderung memaknai suatu peristiwa dengan sudut pandangnya sendiri. Analisis Framming adalah bagaimana cara media membingkai pemberitaan yang sedang mencuat dengan bahasa dan caranya media itu sendiri. Dalam analisis framing media akan selalu memberikan dampak yang positif atau pun negatif terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi. Maka dari itu analisis framing tidak akan pernah objektif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi malah justru akan subjektif. Analisis Framming memberikan pengertian bahwa kasus yang diangkat seperti kasus “Papa minta saham” ini tidak akan sama dengan kenyataan yang terjadi. Media yang memberitakan kasus ini pun akan selalu menyoroti dan membela dari pihak mana yang akan menguntungkan media tersebut.

Salah satunya adalah media Vivanews.com, dimana media tersebut adalah media yang mempunyai keterikatan dengan peran utama dalam kasus “Papa Minta Saham” yaitu Setya Novanto. Dan karena itu Vivanews.com sedikit membela dan menggiring opini publik untuk tidak menyalahkan Setya Novanto. Vivanews.com yang notabene masih dalam Partai Golkar akan selalu membela dan mengusahakan Ketua DPR bisa lolos dalam kasus tersebut.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa ada bingkai yang berbeda diantara berita yang ditayangkan oleh Vivanews.com dan Tempo.co.

Vivanews.com membingkai sidang MKD memihak kepada Setya Novanto. Konstruksi disusun dengan memilih fakta tentang keganjilan-keganjilan prosesi sidang. Vivanews.com menganggap sidang MKD yang dilaksanakan secara tertutup untuk menyembunyikan kompromi politik antara Setya Novanto dan MKD sendiri. Selanjutnya gagasan pemecatan Akbar Faisal yang dilabeli sebagai kezaliman, penyalahgunaan wewenang oleh Wakil Ketua Dewan Fahri Hamzah untuk menyingkirkan anggota MKD yang tidak mau bekerja sama menyelamatkan Setya Novanto.

Sedangkan Tempo.co di arah berbeda dengan Vivanews.com. Bingkai Tempo.co adalah Sidang MKD dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang. Dalam pandangan Tempo.co, sidang MKD dilaksanakan secara tertutup sudah sesuai dengan Undang-Undang walaupun rangkaian sidang MKD sebelumnya dilaksanakan secara terbuka. Tempo.co menghilangkan sisi kecurigaan publik atas kemungkinan kecurangan dalam sidang MKD tersebut. Mengenai pemecatan Akbar Faisal, Tempo.co lebih menekankan ketertiban sidang MKD. Pemecatan ini dilakukan karena Akbar Faisal melanggar kesepakatan anggota MKD untuk menggelar sidang secara tertutup dengan merekam dan membocorkan jalannya sidang kepada media massa. Dalam Tempo.co Setya Novanto yang mengundurkan diri dinilai sebagai rasa ketidak tanggung jawaban dan tidak memiliki rasa berjiwa Kesatria. Tetapi hanya untuk memberikan ketenaran dalam kasus ”papa Minta Saham”. Dengan begitu pengunduran dirinya sebagai ketua DPR menyisakan ribuan pertanyaan dari khalayak terhadap

kasus Pelanggaran kode Etik yang mencatutkan nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak perusahaan PT Freeport Terhadap pemerintah Indonesia.

Kasus “papa minta saham” akhirnya tidak selesai dan tidak ada ujung dari permasalahan tersebut. Setelah surat pengunduran diri Setya Novanto dilayangkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan Pencatutan nama presiden dan wakil presiden tidak terbukti dalam panggung kasus “Papa Minta Saham”.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Vivanews.com dan Tempo.co sebagai portal berita *online* besar di Indonesia dapat dimengerti jika mengejar kecepatan penyampaian berita, namun portal berita *online* harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah penulisan artikel berita yang lengkap, misalnya kekurangan dalam melengkapi unsur 5W+1H yang menjadi syarat kelengkapan penulisan artikel berita.
2. Media adalah sebagai alat untuk penyampaian berita yang dimana berita tersebut akan dibaca atau disebar luaskan kepada audiens. Media memandang masalah dengan sudut pandang dari kacamata permasalahan. Dan membingkai pemberitaan tersebut dengan sudut pandang penulis. Sehingga apabila dalam penulisan media tidak akan pernah objektif

terhadap kasus yang diangkat. Maka dari itu media hanya untuk memberikan pesan kepada audiens. Dalam hal ini Vivanews.com yang sedikit memihak kepada Setya Novanto berimbas kepada cara penyampaian berita yang kurang seimbang dan berita satu ke berita lain. Sedangkan dalam Tempo.co penulisan sangat berhati-hati dalam pemilihan diksi dan kosa kata yang di buat agar tampak seimbang dalam pemberitaan kasus ini.

3. Media online merupakan media yang dapat dengan mudah di akses dari seluruh penjuru dunia dan menggunakan berbagai alat. Media online dengan sangat mudah memberikan informasi kepada audiens dalam beberapa jam dan bahkan dalam setiap waktu. Dengan demikian perlu adanya filter dalam penyampaian berita sehingga tidak semua berita harus di unggah dalam portal atau situs. Dari mulai hal sepele dan sampai hal yang tidak perlu di unggah. Media online menjadi tren yang mengedepankan kecepatan dan ketepatan pembuatan berita.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, 1977. *Mass Media dan Hukum*, Jakarta : Erlangga,
- Anggoro, Ayub Dwi. 2014. Media, Politik Dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV). *Jurnal Aristo Vol.2 No. 2 Juli 2014*.
- Ardianto, Elvinaro dan Erdinaya, Lukiat Komala. 2004. *Komunikasi Massa (Suatu Pengantar)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- B.N. Ahuja, *Theory and Practice of Journalism*, Delhi : Surjeet Publications, 1998,
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Universitas. Airlangga.
- C. Teguh Dalyono. 2010. Pengaruh Media Massa Dan Pengetahuan Tentang Teknologi Informasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Tingkat Modernitas Generasi Muda Kota Yogyakarta. *Jurnal FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*
- Damayanti, Sophia. 2016. Analisis *framing* robert n. Entman atas pemberitaan reklamasi teluk jakarta di majalah tempo. *Journal e-Proceeding of Management : Vol.3, No.3 December 2016*
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Group.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Group.
- Gaio, Ana Maria Sarmiento. 2015. Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik Kpk Vs Polri Di Vivanews.Co.Id Dan Detiknews.Com. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 3 (2015)*
- Kusumaningrat, Hikmat Kusumaningrat dan Purnama, 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Bandung : Remaja Rosdakarya,
- Mawardi, Gema, 2012. Pembingkai berita media online. *Jurnal FISIUP UI*
- McQuail, Dennis, McQuail's. 2000. *Mass Communication Theory*, London : Sage Publications
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Muttaqin, Ahmad, 2012. Agama Dalam Representasi Ideologi Media Massa. 2012. *Journal komunika Vol.6 No.2 Juli - Desember 2012 pp.*

Rivers, William L., Jay W. Jensen dan Theodore Peterson, 2008. *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Terjemahan Oleh Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Severin, Werner J. & James W. Tankard, Jr., 2011. *Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa edisi kelima*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sobur, Alex. 2006. *Semiotika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta:Bandung.

Syah, Dedi Kurnia. 2015. *Komunikasi CSR Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Internet:

Merdeka.com. Kronologi lengkap kasus Papa Minta Saham sampai bikin Setnov mundur. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html>. diakses pada 7 September 2017

PT.Visi Media Asia, Tbk.Profil Viva News. www.vivagroup.co.id. Diakses pada tanggal 21 oktober 2017

Sinta Fitriani. Tugas Ilmu Negara. http://www.academia.edu/19791607/Tugas_ilmu_negara. diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.

Tempo Media Group. Profil Tempo Media Group. <https://korporat.tempo.co/tentang>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2017

LAMPIRAN

LAMPIRAN BERITA

Berita Vivanews.com

1. Berita Rabu, 8 Desember 2015. Judul “Menyoal Sidang MKD, Terbuka atau Tertutup”

Menyoal Sidang MKD, Terbuka atau Tertutup

VIVA.co.id - Polemik kasus rekaman pembicaraan antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Ketua DPR Setya Novanto terus mengemuka. Kali ini adalah terkait apakah sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus terbuka atau justru wajib tertutup?

Pada pemeriksaan pengadu yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Rabu, 2 Desember 2015, dan saksi Maroef Sjamsoeddin, Kamis, 3 Desember 2015, sidang MDK digelar terbuka dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah media televisi nasional. Namun, pada pemeriksaan teradu, Setya Novanto, Senin, 7 Desember 2015, sidang MKD digelar tertutup.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sidang MKD justru diwajibkan untuk tertutup. Ini merujuk pada pasal 129 dan 132.

Pasal 129 menyatakan bahwa MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

Kemudian Pasal 132, ayat 1, menyatakan bahwa sidang MKD bersifat tertutup. Lalu kedua, MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang MKD.

Sementara itu, Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata beracara MKD, juga mengatur hal yang tidak jauh berbeda. Misalnya, Pasal 10 menyatakan bahwa MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

Aturan soal terbuka atau tertutup terdapat di Pasal 15 ayat 2 yakni sidang MKD bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh sidang MKD. Kemudian ayat 3, pimpinan dan anggota MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang MKD.

Kasus yang melibatkan perusahaan asing dan pimpinan lembaga tinggi negara ini membuat publik Tanah Air menjadi riuh. Isi dalam rekaman juga merembet ke banyak persoalan dari Pilpres 2014, masalah Komjen Budi Gunawan sampai menyinggung soal Presiden Jokowi. Selain MKD, perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Agung.

2. Berita Senin, 7 Desember 2015. Tak Sekali Papa Minta Saham

Berikut isi berita:

Perpanjangan kontrak karya Freeport identik dengan persekongkolan. Jauh sebelum ribut-ribut kasus Freeport menyeret Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan importir minyak Muhammad Riza Chalid, kongkalikong serupa terjadi dua dekade silam. Jurusnya hampir sama: "Papa Minta Saham".

"Perpanjangan kontrak itu tidak lepas dari persekongkolan pada pemerintahan Orde Baru," kata ekonom Universitas Gadjah Mada yang juga mantan anggota Tim Anti-Mafia Migas, Fahmi Radhy, Kamis pekan lalu.

3. Berita Sabtu, 5 Desember 2015. Perdebatan Sengit Sidang MKD, Apa Kata Kepala BIN?

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dalam beberapa hari ini menggelar sidang kode etik kasus 'papa minta saham'.

Dalam kasus ini, Ketua DPR RI Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin, dan Pengusaha Reza Chalid terlibat dalam percakapan yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sidang tersebut, Maroef mengaku merekam pembicaraan tersebut.

Rekaman percakapan ketiganya dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD. Dalam sidang MKD tersebut banyak dikritik, karena mendudukkan Menteri ESDM Sudirman Said yang justru sebagai pihak pelapor seperti terdakwa.

"Awalnya, agak aneh-aneh. Jangan pelapor jadi pesakitan. Tapi lama-lama, mereka tahu kalau banyak yang tidak sepaham dengan perbuatan seperti itu," kata Kepala BIN Sutiyoso, usai menghadiri resepsi pernikahan putri Ketua DPR Setya Novanto di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 4 Desember 2015

Pria yang akrab disapa Bang Yos ini meminta para anggota MKD bekerja secara profesional dan adil. Bila tidak, rakyat akan memberi penilaian khusus.

"Profesional, yang fair. Kalau sebaliknya, rakyat tidak puas dan akan marah," ucap mantan Gubernur DKI tersebut.

Ketika dimintai keterangan saat bertemu dengan Setya Novanto dalam acara resepsi tersebut, Mantan Ketua Partai PKPI tersebut mengatakan, malam ini ekspresi Setya Novanto lagi bergembira, lantaran hari bersejarah bagi putrinya.

"Ekspresinya kan malam ini malam gembira. Orang lagi kena masalah, kita sebagai teman harus menghibur, andai kata saya akan terpengaruh," ungkapnya.

Sebelumnya, Sudirman Said dimintai keterangan oleh MKD pada Rabu lalu, 2 Desember 2015. Dalam sidang, MKD banyak mencecar dan terkesan mencari kesalahan eks Dirut Pindad ini.

Sudirman tampak selalu tenang, meski tak sekali dia protes jika pertanyaan menuduh. (asp)

4. Berita Kamis, 17 Desember 2015. Setya Novanto Mundur, Ini Komentar Jokowi

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat suara terkait mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mengapresiasi keputusan Novanto untuk mundur sebelum putusan Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Ya kita menghormati setiap keputusan yang sudah diberikan oleh Pak Setya Novanto," kata Jokowi, di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2015.

Presiden Jokowi mengaku sejauh ini tidak ada komunikasi antara dirinya dengan Novanto setelah memilih mundur.

Ke depan, menurut Jokowi, hubungan legislatif dan eksekutif akan semakin membaik. "Dari dulu kan baik-baik saja," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Diketahui, Setya Novanto memutuskan mundur pada Rabu malam, 16 Desember 2015. Keputusan Novanto hanya beberapa saat sebelum MKD mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran etik Novanto dalam kasus "Papa Minta Saham" Freeport.

5. Berita Jumat, 11 Desember 2015. Menang 52%, Golkar Berhasil Tekan Efek 'Papa Minta Saham'

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengakui kasus 'Papa Minta Saham' yang melibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto cukup berpengaruh pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 "Memang ada pengaruhnya," kata Idrus di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 11 Desember 2015.

Namun demikian kata Idrus, partai berlambang pohon beringin ini mampu menekan ekses negatif kasus 'Papa Minta Saham' dalam Pilkada serentak.

"Kita menatap Partai Golkar ini kekuatannya hanya pada sistem yang didukung kepemimpinan yang kuat dan kader-kader militan dimana-mana. 'Badai' apa pun yang ada *insya Allah* bisa dihadapi," ujar Idrus.

Menurut dia, keberhasilan Golkar dalam menghadapi 'badai' terbukti dari kemenangan para calon kepala daerah yang di usung.

"Berdasarkan informasi yang ada kita menang di semua daerah sebanyak 52 persen. Data-data yang ada seperti Banten kita menang 100 persen," ungkap Idrus. Kemenangan ini lanjut Idrus, menyimpulkan Golkar masih tetap solid dan mampu mempertahankan eksistensinya. "Saya kira tatanan Partai Golkar dengan kepemimpinan yang kuat walau menghadapi badai yang kuat *insya Allah* kita bisa hadapi," tegas Idrus.

6. Berita Jumat, 11 Desember 2015. Luhut Panjaitan Murka Disebut Ikut Melobi Freeport

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan, murka dengan berbagai pemberitaan dan rumor yang menyebut bahwa dia ikut melobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Luhut mengaku tak sedikit pun berpikir untuk memperpanjang kontrak PT Freeport di Indonesia. Sikap tegasnya pun sudah diketahui Presiden Joko Widodo, sehingga tak ada bukti atau alasan yang kuat sehingga dia disebut terlibat melobi Presiden untuk memperpanjang kontrak Freeport.

Luhut secara tegas dan lugas bahwa dia terganggu dengan berbagai pemberitaan dan rumor yang mengait-ngaitkan namanya dalam skandal yang melibatkan Setya Novanto (Ketua DPR), Maroef Sjamsoeddin (Presiden Direktur PT Freeport Indonesia), dan Riza Chalid (pengusaha minyak).

“Saya benar-benar terganggu. Menurut saya sudah keterlaluan. Keluarga saya terganggu. Anak saya yang masih tentara aktif juga terganggu,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Polhukam di Jakarta pada Jumat, 11 Desember 2015.

7. Berita Kamis, 10 Desember 2015. Kejaksaaan Cek CCTV Pertemuan Novanto-Maroeff di Ritz Carlton

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Kejaksaaan Agung mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV) di Hotel Ritz Carlton Pacific Plaze, Jakarta, Kamis, 10 Desember 2015.

Hotel itu disebut sebagai salah satu tempat pertemuan Ketua DPR RI Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroeff Sjamsoeddin, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. Pertemuan mereka membahas permintaan saham PT Freeport Indonesia, yang mencatat nama Presiden dan Wakil Presiden, dan belakangan populer juga disebut skandal 'Papa Minta Saham'.

"Tim kami meminta rekaman CCTV dari Ritz Carlton untuk melengkapi informasi yang kami kumpulkan dalam penyelidikan," kata Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Adi Togarisman, saat dikonfirmasi, Kamis, 10 Desember 2015.

Dalam kasus itu, Kejaksaaan Agung telah menelusuri rekaman asli pada ponsel milik Maroeff Sjamsoeddin. Bahkan, Kejaksaaan juga sudah meminta bantuan tim ahli teknologi informasi pada Institut Teknologi Bandung.

8. Berita Kamis, 10 Desember 2015. Senin Pekan Depan, Kejagung Panggil Setya Novanto

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memanggil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, pada Senin pekan depan, 14 November 2015.

Pemanggilan itu terkait dengan kasus skandal PT Freeport Indonesia yang belakangan populer disebut kasus 'Papa Minta Saham' dan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

"*Enggak* bisa prediksi, karena sekretaris Pak Novanto tidak hadir, tapi pengacaranya datang, mengatakan akan hadir Senin," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Arminsyah, di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 10 Desember 2015.

Menurut dia, Kejagung belum berencana memanggil dan memeriksa Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan. Pemanggilan Luhut harus dirapatkan terlebih dahulu di internal Kejaksaan.

"Kita punya aturan, tidak bisa seketika memanggil orang. Kita akan rapatkan, kalau pun harus kita panggil, kita tentukan kapan akan kita panggil. Jadi tergantung rapat internal," katanya menambahkan.

Dalam kasus rekaman 'Papa Minta Saham', Kejaksaan telah memeriksa Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

9. Berita Rabu, 16 Desember 2015. Judul “Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD”

Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD

VIVA.co.id - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal dinonaktifkan dari keanggotaan di MKD. Keputusan itu diambil jelang keputusan akhir persidangan etik Ketua DPR Setya Novanto.

Penonaktifan dari keanggotaan MKD itu lantaran adanya pengaduan terhadap Akbar oleh Ridwan Bae atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Akbar dengan membocorkan informasi persidangan tertutup saat MKD memeriksa Ketua DPR Setya Novanto.

"Kisah tentang MKD semakin menarik. Saya mendapatkan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk penonaktifan sementara pada MKD DPR untuk saya. Anda lihat di dalam daftar Nasdem tidak ada nama saya, dasarnya saya dalam posisi teradu yang diadakan oleh Ridwan Bae," ujar Akbar di depan ruang sidang MKD pada Rabu, 16 Desember 2015.

Akbar menilai keputusan itu sepihak dan tidak adil. Jika mengacu bahwa keputusan itu adalah keputusan pimpinan DPR, seharusnya trio Golkar yang antara lain, Kahar Muzakir, Ridwan Bae, dan Adies Kadir seharusnya juga dinonaktifkan dari MKD.

"Pada saat yang bersamaan saya sudah melaporkan tiga orang dan saya belum tahu diproses atau tidak. Jika mengikuti surat ini seharusnya tiga orang yang saya adukan itu juga tidak ada di MKD ini," ujar Akbar.

Politikus Nasdem itu menuding adanya upaya untuk membuat kasus pelanggaran etik Novanto ini dihentikan. "Sejak awal mereka merancang agar suara yang ingin menegakkan etika di DPR itu tersumbat," ucap Akbar.

Secara tegas, Akbar mengatakan tidak menerima keputusan itu dan akan memaksa untuk masuk ke ruang MKD untuk tetap mengikuti persidangan internal di MKD.

"Hari ini DPR mempertunjukkan sebuah tontonan yang luar biasa memalukan. Saya akan melawan dan masuk ke dalam," tegas Akbar.

10. Berita 16 Desember 2015. Judul “Akhir dari Drama Sidang Etik 'Papa Minta Saham'”

Akhir dari Drama Sidang Etik 'Papa Minta Saham'

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) resmi ditutup. Hasilnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto tidak lagi menjabat sebagai ketua. Setelah melalui proses panjang berminggu-minggu, keputusan MKD ini akhirnya diambil, karena pertimbangan bahwa Setya Novanto menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MKD.

Seperti diketahui, dari 17 anggota MKD, 10 menyatakan Setya Novanto terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik sedang dalam kasus 'Papa Minta saham', yang melibatkan Presiden Direktur Freeport, Maroef Sjamsoedin, dan Pengusaha M. Riza Chalid.

Sementara itu, tujuh lainnya menyatakan bahwa surat Novanto melakukan pelanggaran berat.

Inilah keputusan Rapat MKD seperti dibacakan oleh Ketua MKD Surahman Hidayat.

1. Sidang MKD atas pengaduan saudara Sudirman Said terhadap Saudara Setya Novanto, dengan menerima surat pengunduran diri saudara Setya Novanto No. Anggota A.300 FPG sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 tertanggal 16 Desember 2015.
2. Terhitung sejak hari Rabu 16 Desember 2015, saudara Setya Novanto dinyatakan berhenti sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019.
3. Demikian keputusan rapat MKD ini dibacakan pada sidang MKD yang sifatnya terbuka untuk umum pada hari Rabu 16 Desember 2015.

11. Berita Jumat, 11 Desember 2015. Luhut Panjaitan: Saya Siap Dipanggil MKD

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan siap memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dijadwalkan pada Senin, 14 Desember 2015.

"Kalau ada orang yang memanggil saya, saya siap. Saya diundang hari Senin, saya minta sidang terbuka," katanya dalam wawancara dengan *TvOne* di Jakarta, Jumat 11 Desember 2015.

Dia mengaku terganggu dengan skandal pencatutan namanya dalam rekaman pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Direktur Utama PT Freepot Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Reza Chalid. Dalam rekaman "Papa Minta Saham" itu nama Luhut disebut sebanyak 66 kali.

Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan Berikut adalah tabulasi pemingkaiian yang dilakukan

12. Berita Senin, 14 Desember 2015. Bamsuet: MKD Berusaha Menutup Kasus 'Papa Minta Saham'

Berikut isi berita:

VIVA.co.id - Fraksi Partai Golkar DPR RI menuding Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berusaha menutup kasus skandal renegotiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia, yang belakangan populer juga disebut skandal 'Papa Minta Saham'.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyebut sejumlah alasan yang ditengarai sebagai upaya mengaburkan, bahkan menutup, kasus skandal yang mencatat nama Presiden dan Wakil Presiden itu. Pertama, sejumlah anggota MKD berupaya memutarbalikkan fakta agar yang benar menjadi salah dan sebaliknya.

"Inilah bahaya dan risikonya jika sekumpulan orang picik menggenggam kekuasaan atau wewenang yang besar," kata Soesatyo melalui keterangan tertulis kepada *VIVA.co.id* pada Senin, 14 Desember 2015.

Alasan kedua, beberapa anggota MKD lebih menitikberatkan aspek yang terlalu teknis untuk menggugurkan esensi persoalan. Hal itu dapat dilihat dari perdebatan tentang *legal standing* (dasar hukum) pelapor (Sudirman Said, Menteri ESDM) sehingga MKD harus menghadirkan seorang ahli bahasa.

"Artinya, ada keinginan dari beberapa anggota MKD untuk menutup kasus hanya karena pelapor tidak memenuhi syarat," ujarnya

Berita Tempo.co

1. Berita Sabtu, 5 Desember 2015. Papa Minta Saham, Setya Novanto Dibidik Percobaan Korupsi

Berikut isi berita:

Kejaksaan Agung menilai pembicaraan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, saudagar minyak Mohammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin patut diduga sebagai percobaan korupsi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan percobaan korupsi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagai tindak pidana.

Karena itu, kata dia, penyelidik masih mendalami isi rekaman untuk mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam pertemuan Setya, Riza, dan Maroef. "Ini kan *ngobrol* untuk beli apa? *Private* jet yang bagus dan representatif, kan?" kata Prasetyo di kantornya, Jumat, 4 Desember 2015, mengutip satu bagian rekaman. "Kami akan mencermati siapa yang bermufakat melakukan korupsi, siapa cari keuntungan."

2. Berita Selasa, 08 Desember 2015. Sidang Papa Minta Saham Kalla Desak Novanto Mundur

Berikut isi berita:

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memeriksa Ketua DPR Setya Novanto secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, memunculkan reaksi keras dari Istana. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kecewa atas sidang MKD. Menurut Kalla, Novanto seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya seperti desakan publik melalui laman petisi online Change.org. "Ya itu lebih bagus sebenarnya, lebih sportif," kata dia di kantornya, kemarin.

3. Berita Rabu, 09 Desember 2015. Sindir Papa Minta Saham, Petugas TPS Ini Kenakan Kostum MKD

Berikut isi berita:

Warga Surabaya punya cara tersendiri untuk mengekspresikan perasaannya terhadap kasus “papa minta saham”. Salah satunya di tempat pemungutan suara Kampung Nagabonar, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan. Di TPS tersebut, petugas mengenakan seragam layaknya anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat saat menyidangkan kasus Setya Novanto. "Ini bentuk sindiran kami kepada para politikus. Namanya bukan Mahkamah Kehormatan Dewan, tapi mahkamah kehormatan dagelan," kata Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara TPS 34 Soedjono saat ditemui *Tempo*, Rabu, 9 Desember 2015.

Soedjono memilih memakai baju hakim dengan riasan wajah bak badut. Ia mengibaratkan diri sebagai anggota Dewan yang menganggap rakyat bodoh dan dapat dipermainkan. "Padahal kita ini sudah melek politik. Hasil sidang MKD sudah bisa ditebak, seperti lawak Srimulat pakai badut."

Selain berjajar layaknya sidang MKD, petugas lain berlagak sebagai warga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dengan mengenakan masker dan infus. Selain itu, ada yang mengenakan pakaian petugas pemadam kebakaran dan ada yang berpura-pura menjadi pohon dengan menempelkan daun-daun di tubuhnya.

"Harapannya, agar pejabat dan politikus jangan hanya ribut politik, tapi ingat rakyat butuh makan, termasuk korban kebakaran hutan kemarin," tutur M. Shaleh, yang berdandan layaknya pohon.

Tak hanya kali ini saja warga Kampung Nagabonar mengusung tema saat pemilu. Pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, mereka menggunakan tema-tema unik lain. Di antaranya TPS superhero, TPS hantu, dan TPS Wali Sanga.

Tema dan kostum unik diyakininya mampu mendongkrak antusiasme warga mencoblos. "Pemilu legislatif kemarin sampai 72 persen. Sebelum pakai kostum unik, paling enggak sampai 60 persen," ujar Soedjono.

Terbukti, baru dibuka dua setengah jam, warga yang datang mencapai 50 persen dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 495 orang. Sedangkan jumlah pemilih di DPT dalam pilkada Surabaya sebanyak 2.034.307 yang tersebar di 3.936 TPS.

4. Berita Senin, 14 Desember 2015. Ini Jejak Luhut di Rekaman 'Papa Minta Saham'

Berikut isi berita:

Rekaman lengkap percakapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton pada 8 Juni 2015, sudah diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Kini rekaman asli itu sudah ada di tangan Kejaksaan Agung yang tengah menyelidiki kasus tersebut. Dalam percakapan itu, nama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sering disebut-sebut.

5. Berita 7 Desember 2015. Judul “Papa Minta Saham, Sidang Setya Novanto Digelar Tertutup”

Berita yang ditulis pada 7 Desember 2015 merupakan berita tentang Menyoal Papa Minta Saham, Sidang Setya Novanto Digelar Tertutup. Berita tersebut selengkapnya adalah:

Papa Minta Saham, Sidang Setya Novanto Digelar Tertutup

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan untuk meminta keterangan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto digelar tertutup. Seluruh staf ahli dan kru televisi diminta keluar dari ruangan sidang.

"Kami dilarang berada di dalam selama sidang internal," ujar Rifki, juru kamera TV Parlemen, Senin, 7 Desember 2015.

Rifki menjelaskan, larangan berada di ruang sidang disampaikan ketua sidang, Surahman Hidayat. Alasannya, seluruh anggota akan membahas opsi apakah pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto berlangsung terbuka atau tertutup.

Sidang pemeriksaan Setya Novanto baru dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Sesaat sebelum masuk ruang sidang MKD, Setya sempat mengelabui wartawan yang menanti kedatangannya dari arah tangga berjalan. Ia memilih datang lewat selasar selatan.

Pemeriksaan ini akan menentukan nasibnya atas tuduhan yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Dalam laporan tersebut, Setya diduga meminta jatah saham PT Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Hingga berita ini diturunkan, kru TV Parlemen belum diperkenankan masuk ruang sidang. Televisi layar lebar yang disediakan bagi wartawan, di muka ruang MKD, untuk menonton proses persidangan juga masih dalam keadaan mati.

6. Berita senin, 14 desember 2015. Disebut 66 Kali, Luhut Hadiri Sidang MKD Terkait Kasus Papa Minta Saham

Berikut isi berita:

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan berjalan menuju ruang sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut.

7. Berita senin, 14 desember 2015. Penyidik Minta Maroef Dengar Lagi Rekaman 'Papa Minta Saham'

Berikut isi berita:

Kejaksaan Agung kembali meminta keterangan kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin terkait dengan kasus "Papa Minta Saham". Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah mengatakan pemanggilan Maroef untuk melengkapi keterangan sebelumnya.

Pada pemeriksaan pekan lalu, Maroef dikonfirmasi mengenai rekaman pembicaraan antara dirinya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, serta taipan minyak Mohammad Riza Chalid. Pembicaraan ketiganya berlangsung di Hotel Ritz Charlton pada 8 Juni 2015 yang direkam oleh Maroef. Lalu rekaman ini diserahkan ke Kejaksaan Agung.

"Kami minta, pelan-pelan, Pak Maroef dengarkan ulang rekaman tersebut dan dicocokkan dengan transkrip yang sudah ada," kata Arminsyah di kantornya, Senin, 14 Desember 2015.

Rekaman yang diperdengarkan lagi kepada Maroef itu berdurasi 1 jam 30 menit. Isinya soal permintaan saham terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport sampai dengan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Arminsyah, pencocokan rekaman dengan transkrip diperlukan ketenangan sehingga Maroef dipanggil lima kali. Ia mengatakan rekaman tersebut menjadi keterangan dari Maroef. Arminsyah mengatakan penyidik ingin mencari bukti-bukti dari ucapan Maroef, Riza, dan Novanto. Karena itu, tim penyidik belum memutuskan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.

Pada pemeriksaan kali ini, Maroef tiba di Kejagung sejak pukul 10.00 WIB. "Saya datang untuk memberikan keterangan lanjutan, substansinya saja," ujar Maroef.

8. Berita Selasa, 15 Desember 2015. Siasat Setya Novanto Loloskan Diri dari 'Papa Minta Saham'

Berikut isi berita:

Politikus Setya Novanto mengerahkan segala upaya agar lolos lagi dari sanksi etik Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) yang dijadwalkan diputus pekan ini. Ketua DPR ini menyusun sejumlah siasat agar terbebas dari sengkarut kasus pelanggaran etik, rekaman, dan kasus 'papa minta saham'.

Salah seorang politikus Golkar menuturkan, siasat sudah disusun sejak dua pekan lalu. Salah satunya sudah dieksekusi pada Senin pekan lalu ketika Novanto meminta pemeriksaannya ditunda empat jam. Pagi-pagi, dia mengirim surat agar pemeriksaannya ditunda empat jam dengan dalih ada acara yang tak bisa ditinggalkan.

9. Berita Rabu, 16 Desember 2015. Putusan MKD, Prabowo Dukung Setya Novanto Dihukum?

Berikut isi berita:

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dikabarkan telah memerintahkan Gerindra agar mendukung penegakan etika di kasus "papa minta saham" yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dikabarkan Gerindra telah sepakat dengan Presiden Joko Widodo agar MKD bisa mendengarkan suara publik, Rabu, 16 Desember 2015.

Saat dikonfirmasi, sejumlah pengurus Partai Gerindra kompak tutup mulut rapat-rapat. "Tidak, saya tak mau komentar soal itu," ujar Wakil Ketua MKD Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi *Tempo* pada Rabu, 16 Desember 2015. Meski demikian, Sufmi mengatakan ia memang sedang sibuk menyiapkan berita acara untuk sidang etik Setya Novanto yang tengah menjadi sorotan masyarakat saat ini

10. Berita Rabu, 16 Desember 2015. Judul “Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD”

Jelang Putusan, Akbar Faizal Dipecat dari Keanggotaan MKD

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Akbar Faisal, memberikan keterangan terkait dengan penonaktifan dirinya sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2015. Akbar Faisal menyatakan dirinya diberhentikan dari MKD karena ada pelaporan oleh anggota MKD lainnya yaitu Ridwan Bae dengan tuduhan telah membocorkan kepada media materi sidang tertutup MKD sebelumnya

11. Berita 17 Desember 2015. Judul “MKD Tutup Kasus Setya Novanto Karena Pengunduran Diri ”

MKD Tutup Kasus Setya Novanto Karena Pengunduran Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mengatakan sidang kasus dugaan pelanggaran etika atas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dinyatakan ditutup karena adanya surat pengunduran diri Setya Novanto.

"Jadi keputusan MKD menyatakan, kasus dugaan pelanggaran etik ditutup sejak diterimanya surat pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto," kata Ketua MKD Surahman Hidayat saat membacakan keputusan MKD di Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2015 malam.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto melayangkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI 2014-2019.

Menurut Surahman, sejak 16 Desember 2015 Setya Novanto tidak lagi menjabat Ketua DPR RI. "Jadi alhamdulillah sudah berakhir, happy ending," kata Surahman.

Sebelumnya, Wakil Ketua MKD Sufni Dasco membacakan surat pengunduran diri Setya Novanto.

"Sehubungan dengan perkembangan proses di MKD yang saat ini sedang berlangsung, untuk menjaga martabat, harkat, dan kehormatan DPR RI serta menciptakan ketenangan dalam masyarakat, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI 2014-2019," kata Sufni Dasco saat membacakan surat Setya Novanto.

12. Berita Rabu, 30 Desember 2015. Kaleidoskop 2015: Setya Novanto, Papa Mundur karena Saham'

Berikut isi berita:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya pada 16 Desember lalu setelah kontroversi kasus "Papa Minta Saham". Kasus ini bermula ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sudirman menuding Setya mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak karya Freeport. Setya diketahui pernah bertemu hingga tiga kali dengan bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. Dalam dua pertemuan terakhir, Setya bahkan mengajak pengusaha minyak, Muhammad Riza Chalid.

Pemeriksaan kasus "Papa Minta Saham" di Mahkamah Kehormatan Dewan diwarnai berbagai kontroversi, termasuk drama pergantian anggota Mahkamah yang merupakan pendukung Setya. Belakangan, mayoritas hakim di Mahkamah Kehormatan meminta Setya dijatuhi sanksi sedang dan mesti mengundurkan diri dari jabatannya.

Sesaat sebelum vonis dijatuhkan, Setya menyatakan mundur. Setya menjadi Ketua DPR pertama yang lengser di tengah jalan sesudah Orde Baru tumbang.